

LAPORAN KINERJA 2024

BALAI BESAR KEKARANTINAAN
KESEHATAN MAKASSAR



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2024 dapat tersusun.

Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban BBKK Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 1 (satu) tahun yang memberikan gambaran tentang pencapaian program-program kegiatan serta evaluasi kinerja BBKK Makassar tahun 2024 yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif guna peningkatan kinerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar pada tahun berikutnya.

Makassar, 30 Januari 2025
Kepala Balai Besar Kekarantinaan
Kesehatan Makassar,

\$_{ttd}\$

dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar selaku Pihak Pertama dan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI sebagai pihak kedua. Dalam perjanjian kinerja tahun 2024 terdapat 9 (sembilan) indikator yang harus dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun terdapat 1 (satu) indikator yang belum berproses sampai akhir Oktober 2024, karena BBKK Makassar tidak termasuk dalam lokus pemeriksaan BPK sampai dengan Oktober 2024, sehingga pada tanggal 16 November 2024 Perjanjian Kinerja 2024 direvisi menjadi 8 (delapan) indikator.

Adapun 8 (delapan) indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN.
Target bernilai 1, realisasi bernilai 1, sehingga capaian kinerja menjadi 100%.
Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.160.531.000,- realisasi Rp. 2.129.260.843,- sebesar 98,55%.
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
Target 100%, realisasi 100%, serta capaian sebesar 100%.
Pagu Anggaran sebesar Rp. 506.610.000,- realisasi Rp. 503.754.800, sebesar 99,44%
3. Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
Target bernilai 0,96, realisasi 1, sehingga capaian menjadi 104,17%
Pagu Anggaran Rp. 564.754.000,- realisasi Rp. 543.268.496, sebesar 96,20%
4. Nilai kinerja anggaran
Target 85, realisasi 95,92, serta capaian sebesar 112,85%
Pagu Anggaran Rp. 361.285.000,- realisasi Rp. 356.768.762,- sebesar 98,75%
5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran
Target 90, realisasi 99,88, dengan capaian sebesar 110,98%
Pagu Anggaran Rp. 26.050.200.000,- realisasi Rp. 25.980.461.371,- sebesar 99,73%
6. Kinerja implementasi WBK satker
Target nilai 81, realisasi 86,94, serta capaian sebesar 107,33%

Pagu Anggaran Rp. 106.664.000,- realisasi Rp. 105.366.918,- sebesar 98,78%

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Target 85%, realisasi 100%, serta capaian sebesar 117,65%.

Pagu Anggaran Rp. 448.497.000,- realisasi Rp. 445.381.150,- sebesar 99,31%

8. Persentase realisasi anggaran

Target 96%, realisasi 99,52%, serta capaian 103,67%

Pagu Anggaran Rp. 30.367.500.000,- realisasi Rp. 30.222.089.364,- sebesar 99,52%

Capaian tertinggi terdapat pada indikator 7 yaitu Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan besaran capaian 117,65%. Sehingga rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 107,08%.

Pencapaian target indikator yang telah ditetapkan BBKK Makassar tahun 2024 bersumber dari pagu sebesar Rp. 30.367.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.222.089.364,- atau sebesar 99,52%.

Dalam laporan kinerja ini Balai Besar Kekarantinaaan Kesehatan Surabaya, Balai Besar Kekarantinaaan Kesehatan Denpasar, dan Balai Besar Kekarantinaaan Kesehatan Medan, dijadikan sebagai pembandingan capaian kinerja untuk ke 8 indikator kinerja, hal ini karena BBKK tersebut dengan BBKK Makassar memiliki karakteristik yang hampir sama, meliputi :

1. Klasifikasi kelas yang sama yaitu Balai Besar;
2. Lingkup kawasan yang memiliki Pelabuhan Laut atau Bandar Udara;
3. Melayani embarkasi/debarkasi haji.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	ix
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Visi dan Misi	4
D. Struktur Organisasi	5
E. Sumber Daya Manusia	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	15
A. Perencanaan Kinerja	15
1. Rencana Aksi Kegiatan	15
2. Rencana Kinerja Tahunan	17
B. Perjanjian Kinerja	17
BAB III Akuntabilitas Kinerja	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	122
BAB IV Penutup	128
A. Kesimpulan	128
B. Rencana Tindak Lanjut	130
Pustaka Acuan	131
Penyusun	132
Lampiran	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi BBKK Makassar Tahun 2024	6
Gambar III.1	Screenshoot Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada dashboard Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Tahun Anggaran 2024	68
Gambar III.2	Screenshoot Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada dashboard Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Tahun Anggaran 2024	68
Gambar III.3	Screenshoot Nilai Kinerja Anggaran pada dashboard Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Tahun Anggaran 2024 ..	69
Gambar III.4	Dashboard Aplikasi OM-SPAN Hasil Perhitungan Capaian Kinerja IKPA BBKK Makassar Tahun Anggaran 2024	76
Gambar III.5	Screenshot Persentase Realisasi Anggaran BBKK Makassar Tahun Anggaran 2024	117

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jabatan Struktural BBKK Makassar Tahun 2024	9
Tabel I.2	Jabatan Fungsional Teknis BBKK Makassar Tahun 2024	9
Tabel I.3	Jabatan Fungsional Administrasi BBKK Makassar Tahun 2024	10
Tabel I.4	Jabatan Pelaksana Teknis BBKK Makassar Tahun 2024	10
Tabel I.5	Jabatan Pelaksana Administrasi BBKK Makassar Tahun 2024	10
Tabel II.1	Matriks RAK BBKK Makassar Tahun 2020-2024	15
Tabel II.2	Indikator Kinerja RKT BBKK Makassar Tahun 2024	17
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Tahun 2024	18
Tabel II.4	Anggaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Tahun 2024	19
Tabel III.1	Pengukuran Kinerja BBKK Makassar dibandingkan Dengan Target RAP dan Target RAK Tahun 2024	20
Tabel III.2	Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Persentase Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan yang diperiksa Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan BBKK Makassar Tahun 2024	24
Tabel III.3	Perhitungan Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN BBKK Makassar Tahun 2024	25
Tabel III.4	Capaian Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/ PLBDN BBKK Makassar Tahun 2024.....	26
Tabel III.5	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Orang BBKK Makassar Tahun 2024	34
Tabel III.6	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Alat Angkut BBKK Makassar Tahun 2024	36
Tabel III.7	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Barang BBKK Makassar Tahun 2024	36
Tabel III.8	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Lingkungan BBKK Makassar Tahun 2024	36
Tabel III.9	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan BBKK Makassar Tahun 2024	37
Tabel III.10	Perbandingan RAP dengan RAK Indikator kedua BBKK	

	Makassar Tahun 2024	37
Tabel III.11	Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara BBKK Makassar Tahun 2024	46
Tabel III.12	Perhitungan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara BBKK Makassar Tahun 2024	47
Tabel III.13	Capaian Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara BBKK Makassar Tahun 2024	47
Tabel III.14	Capaian Indeks Pengendalian FR di Pintu Masuk Negara BBKK Makassar Tahun 2024 Parameter Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 jam dengan Kelengkapan 80%	48
Tabel III.15	Nilai Indeks Pinjal di Wilker BBKK Makassar Tahun 2024	49
Tabel III.16	Hasil Suevey Tingkat Kepadatan Larva Anopheles di Wilayah BBKK Makassar Tahun 2024.....	50
Tabel III.17	Kepadatan Kecoa Di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2024	51
Tabel III.18	Kepadatan Lalat di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2024	52
Tabel III.19	Kepadatan Jentik Aedes Aegypti Area Perimeter di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2024	53
Tabel III.20	Kepadatan Jentik Aedes Aegypti Area Buffer < 1 di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2024	54
Tabel III.21	Pemeriksaan TTU di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2024	55
Tabel III.22	Pemeriksaan TPP di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2024	56
Tabel III.23	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2024	57
Tabel III.24	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	75
Tabel III.25	Revisi DIPA BBKK Makassar Tahun 2024	78
Tabel III.26	Parameter Deviasi Halaman III DIPA BBKK Makassar Tahun 2024	80
Tabel III.27	Parameter Penyerapan Anggaran BBKK Makassar	

	Tahun 2024	81
Tabel III.28	Parameter Belanja Kontraktual BBKK Makassar	
	Tahun 2024	86
Tabel III.29	Pengukuran Kinerja Indikator Implementasi WBK BBKK	
	Makassar Tahun 2024	97
Tabel III.30	Jumlah ASN BBKK Makassar yang Ditingkatkan	
	Kompetensinya sebanyak paling sedikit 20 JPL	
	Tahun 2024	105
Tabel III.31	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana BBKK	
	Makassar Tahun 2024	122
Tabel III.32	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja BBKK	
	Makassar Tahun 2024	123
Tabel III.33	Realisasi Anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output	
	(KRO) dan Rincian Output (RO) Kegiatan BBKK	
	Makassar Tahun 2024	123
Tabel III.34	Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja	
	BBKK Makassar Tahun 2024	127

DAFTAR GRAFIK

Grafik	I.1	Distrtribusi ASN berdasarkan Jenis Jabatan BBKK Makassar Tahun 2024	11
Grafik	I.2	Distribusi ASN berdasarkan Golongan BBKK Makassar Tahun 2024	12
Grafik	I.3	Distribusi ASN menurut Jenjang Pendidikan BBKK Makassar Tahun 2024	12
Grafik	III.1	Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Indikator ke-1 BBKK Makassar Tahun 2024	26
Grafik	III.2	Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Indikator ke1 BBKK Makassar Tahun 2020 dan 2021	27
Grafik	III.3	Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Indikator ke1 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, dan 2024	27
Grafik	III.4	Grafik Perbandingan Target RAP dengan Realsiasi Indikator Ke-1 BBKK Makassar Tahun 2024	28
Grafik	III.5	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-1 Tahun 2024 BBKK Makassar dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar	29
Grafik	III.6	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-2 BBKK Makassar Tahun 2024	39
Grafik	III.7	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-2 BBKK Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024	38
Grafik	III.8	Perbandingan Target Renstra Kemenkes dengan Realisasi Indikator ke-2 BBKK Makassar tahun 2024	39
Grafik	III.9	Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Indikator ke-2 BBKK Makassar tahun 2024	40
Grafik	III.10	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-2 BBKK Makassar, BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar Tahun 2024	41
Grafik	III.11	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-3 BBKK Makassar Tahun 2024	58
Grafik	III.12	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-3 KKP Makassar Tahun 2020 dan 2021	58

Grafik	III.13 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-3 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, dan 2024	59
Grafik	III.14 Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Kinerja Indikator Ke-3 BBKK Makassar Tahun 2024	60
Grafik	III.15 Perbandingan Capaian Indikator Ke-3 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar Tahun 2024	60
Grafik	III.16 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-4 BBKK Makassar Tahun 2024	69
Grafik	III.17 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024	70
Grafik	III.18 Perbandingan Target Renstra Kemenkes dengan Realisasi Indikator ke-4 BBKK Makassar Tahun 2024	71
Grafik	III.19 Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Indikator ke-4 BBKK Makassar Tahun 2024.....	71
Grafik	III.20 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar Tahun 2024	72
Grafik	III.21 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-5 BBKK Makassar Tahun 2024	89
Grafik	III.22 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-5 BBKK Makassar Tahun 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024	89
Grafik	III.23 Perbandingan Target Renstra Kemenkes dengan Realisasi Indikator ke-5 BBKK Makassar Tahun 2024	90
Grafik	III.24 Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Indikator ke-5 BBKK Makassar Tahun 2024.....	91
Grafik	III.25 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-5 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar Tahun 2024	92
Grafik	III.26 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-6 BBKK Makassar Tahun 2024	98
Grafik	III.27 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6 BBKK Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024	98
Grafik	III.28 Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Indikator ke-6	

	BBKK Makassar Tahun 2024.....	100
Grafik	III.29 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar Tahun 2024	100
Grafik	III.30 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-7 BBKK Makassar Tahun 2024	111
Grafik	III.31 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-7 BBKK Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024	112
Grafik	III.32 Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Indikator ke-7 BBKK Makassar Tahun 2024	112
Grafik	III.33 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-7 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar Tahun 2024	113
Grafik	III.34 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-8 BBKK Makassar Tahun 2024	118
Grafik	III.35 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Pagu Anggaran BBKK Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024	118
Grafik	III.36 Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Indikator ke-8 BBKK Makassar Tahun 2024	119
Grafik	III.37 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-8 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar Tahun 2024	120

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, maka mulai 1 Januari 2024 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar nama menjadi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar. BBKK Makassar merupakan unit pelaksana teknis (UPT) bidang Kekarantinaan Kesehatan yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBKK Makassar dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan rencana kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan. Penyusunan LKj mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Petunjuk Teknis dari Perpres tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 terdapat 2 (dua) kegiatan untuk BBKK Makassar yaitu :

1. Dukungan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah;
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut mengacu pada 8 indikator, yaitu :

1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

3. Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
4. Nilai kinerja anggaran
5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran
6. Kinerja implementasi WBK satker
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
8. Persentase realisasi anggaran

Capaian indikator tersebut akan dibahas dan dianalisa dalam bentuk laporan yaitu Laporan Kinerja (LKj) BBKK Makassar tahun 2024.

Beberapa isu strategis Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar adalah sebagai berikut :

1. Tidak semua wilayah kerja memiliki gedung kantor sendiri sehingga harus menyewa ruangan.
2. Tenaga di wilker masih terbatas sedangkan kegiatan yang dilaksanakan mewakili semua kelompok Tim Kerja yang ada di induk, sehingga terdapat pendampingan petugas dari induk BBKK Makassar serta pemanfaatan tenaga kader untuk kegiatan tertentu sesuai dengna kompetensinya.
3. Pembentukan Wilker baru dalam rangka peningkatan layanan di wilayah Pelabuhan/Bandara yang telah memiliki aset tanah untuk didirikan gedung kantor. BBKK Makassar telah mengusulkan 2 (dua) Pos yanitu Pos Bira dan Pos Pasangkayu untuk dijadikan Wilker ke Ditjen P2P, karena keduanya telah memiliki tanah sebagai aset BBKK Makassar.
4. Sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Untia Makassar yang masih minim yang beroperasi di Oktober 2024. UPP Pelabuhan Untia menyediakan ruangan beserta meja dan kursi kepada BBKK Makassar sebagai tempat pelayanan dokumen kesehatan alat angkut.
5. Masih terdapat beberapa Pelabuhan (Pelabuhan Pajukukang, Pelabuhan Jeneponto, dan Pelabuhan Sinjai) yang belum dilayani oleh BBKK Makassar karena kurangnya sumber daya. Pelabuhan Pajukukang dikelola oleh Pelabuhan Untia, sehingga BBKK Makassar masih terlibat dalam pengawasan alat angkut tersebut karena terdapat Pos BBKK Makassar di Pelabuhan Untia.
6. Pelaksanaan sanitasi pesawat dan pengawasan SSHP yang tidak konsisten dilaksanakan oleh seluruh BKK, sehingga BBKK Makassar

terkendala dalam pelaksanaannya di lapangan karena tidak adanya keseragaman pelaksanaan dengan BKK lainnya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko Kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas di atas, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

C. VISI DAN MISI

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar menjabarkan visinya yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia ;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa ;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pemberdayaan GERMAS;
5. Memperkuat sistem kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni :

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaikan Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi yakni :

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di Pelabuhan/Bandara/PLBDN;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan tata kerja BBKK Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023. Struktur organisasi BBKK Makassar terdiri atas :

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Administrasi dan Umum
3. Wilayah Kerja
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Instalasi

Struktur organisasi BBKK Makassar tahun 2024 lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar I.1 berikut.



Gambar I.1
Struktur Organisasi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2024

Uraian tugas masing-masing adalah :

1. Sub Bagian Administrasi Umum
 - a. Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.
2. Instalasi
 - a. Unit pelayanan non struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala BBKK Makassar.
 - b. Dipimpin oleh kepala instalasi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BBKK Makassar
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi instalasi.
3. Wilayah Kerja BBKK Makassar
 - a. Memberikan pelayanan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BBKK Makassar.
 - b. Dipimpin oleh kepala Wilker, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BBKK Makassar.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBKK Makassar sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
 - b. Dalam pelaksanaan tugas kelompok fungsional ditetapkan Ketua Tim Kerja.
 - c. Ketua Tim Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- d. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Jumlah jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- f. Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar tahun 2024 sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang ASN berdasarkan DUK Desember 2024 yang terdiri dari 125 PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 7 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja) dan ditambah tenaga Non ASN berdasarkan data RKAKL 2024 yakni 2 orang PPNPN serta tenaga outsourcing satpam sebanyak 7 orang, sopir sebanyak 13 orang, dan cleaning service sebanyak 9 orang.

1. Menurut Jabatan:

a) ASN	=	132 orang
1) Jabatan Struktural	=	2 orang
2) Jabatan Fungsional Teknis	=	95 orang
3) Jabatan Fungsional Administrasi	=	13 orang
4) Jabatan Pelaksana Teknis	=	16 orang
5) Jabatan Pelaksana Administrasi	=	6 orang
b) Non ASN	=	31 orang
1) Pengamanan Kantor (Satpam)	=	7 orang
2) Pengemudi (Sopir)	=	13 orang
3) Cleaning Service	=	9 orang
4) PPNPN	=	2 orang

Tabel I.1, I.2, I.3, I.4, dan I.5 menunjukkan pengelompokan ASN berdasarkan jabatan.

Tabel I.1 Jabatan Struktural BBKK Makassar Tahun 2024

No.	Pejabat Struktural	Jumlah (Orang)
1.	Kepala BBKK Makassar	1
2.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	1
Jumlah		2

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat bahwa di BBKK Makassar terdapat 2 pejabat struktural yaitu Kepala BBKK Makassar dan Kasubag Adum.

Tabel I.2 Jabatan Fungsional Teknis BBKK Makassar Tahun 2024

No.	Fungsional Teknis	Jumlah (Orang)
1	Dokter Ahli Madya (JFT)	4
2	Dokter Gigi Ahli Madya (JFT)	1
3	Dokter Ahli Muda (JFT)	11
4	Dokter Ahli Pertama (JFT)	2
5	Perawat Ahli Muda (JFT)	4
6	Perawat Ahli Pertama (JFT)	5
7	Perawat Penyelia (JFT)	4
8	Perawat Mahir (JFT)	9
9	Perawat Terampil (JFT)	3
10	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (JFT)	1
11	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	1
12	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia (JFT)	1
13	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	7
14	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	7
15	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	5
16	Epidemiolog Kesehatan Mahir (JFT)	1
17	Epidemiolog Kesehatan Terampil (JFT)	2
18	Entomolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	2
19	Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	3
20	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	2
21	Entomolog Kesehatan Penyelia (JFT)	1
22	Entomolog Kesehatan Mahir (JFT)	3
23	Entomolog Kesehatan Terampil (JFT)	2
24	Sanitarian Ahli Madya (JFT)	1
25	Sanitarian Ahli Muda (JFT)	4
26	Sanitarian Ahli Pertama (JFT)	6
27	Sanitarian Mahir (JFT)	2
28	Sanitarian Terampil (JFT)	1
Jumlah		95

Tabel I.3 Jabatan Fungsional Administrasi BBKK Makassar Tahun 2024

No.	Fungsional Administrasi	Jumlah (Orang)
1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (JFT)	1
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JFT)	2
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (JFT)	1
4	Pranata Keuangan APBN Penyelia (JFT)	1
5	Pranata Keuangan APBN Mahir (JFT)	2
6	Pranata Keuangan APBN Terampil (JFT)	2
7	Perencana Ahli Muda (JFT)	1
8	Perencana Ahli Pertama (JFT)	1
9	Arsiparis Ahli Muda (JFT)	1
10	Arsiparis Ahli Pertama (JFT)	1
Jumlah		13

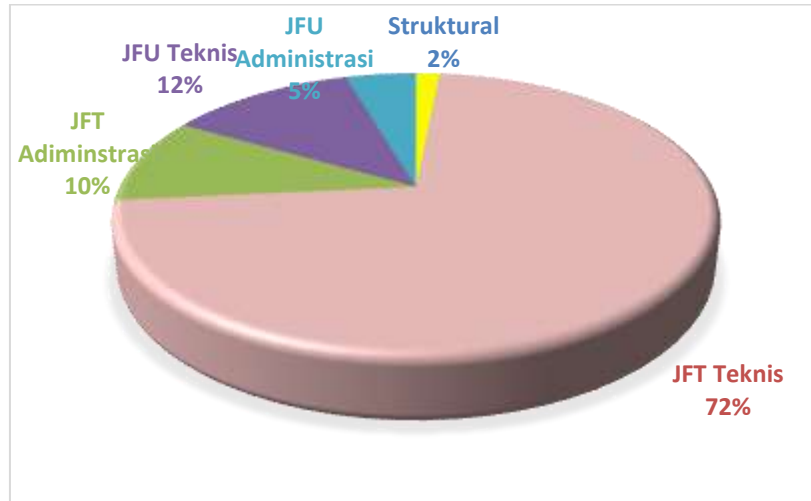
Tabel I.4 Jabatan Fungsional Umum Teknis BBKK Makassar Tahun 2024

No.	Pelaksana Teknis	Jumlah (Orang)
1	Dokter (JFU)	3
2	Perawat Ahli (JFU)	2
3	Perawat / Pengelola Keperawatan (JFU)	5
4	Pranata Laboratorium Kesehatan (JFU)	1
5	Pembimbing Kesehatan Kerja / Analisis Kesehatan Kerja (JFU)	1
6	Epidemiolog Kesehatan / Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi (JFU)	1
7	Entomolog Kesehatan / Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (JFU)	2
8	Sanitarian Ahli / Pemeriksa Sanitasi (JFU)	1
Jumlah		16

Tabel I.5 Jabatan Fungsional Umum Administrasi BBKK Makassar Tahun 2024

No.	Pelaksana Administrasi	Jumlah (Orang)
1	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JFU)	1
2	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara / Analisis Barang Milik Negara (JFU)	1
3	Arsiparis Ahli / Penyuluh Kearsipan (JFU)	1
4	Pengelola Barang Milik Negara (JFU)	3
Jumlah		6

Grafik I.1 Distribusi ASN berdasarkan Jenis Jabatan
BBKK Makassar Tahun 2024



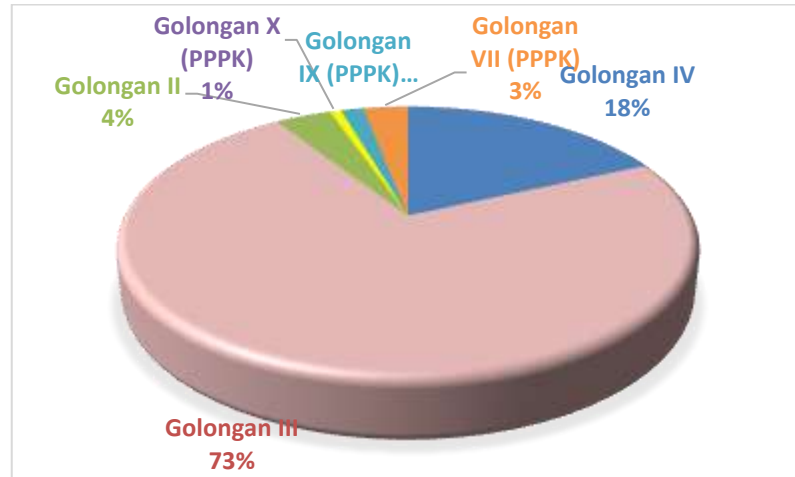
Grafik I.1 menunjukkan 72% pegawai BBKK Makassar adalah JFT Teknis, 12% JFU teknis, 10% JFU Teknis, 5% JFU administrasi, dan 2 % adalah pejabat struktural.

JFU teknis dan administrasi akan berproses menjadi JFT sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Menurut Golongan :

a) Golongan IV	=	24 orang
b) Golongan III	=	96 orang
c) Golongan II	=	5 orang
d) Golongan X (PPPK)	=	1 orang
e) Golongan IX (PPPK)	=	2 orang
f) Golongan VII (PPPK)	=	4 orang

Grafik I.2 Distribusi ASN berdasarkan Golongan BBKK Makassar Tahun 2024

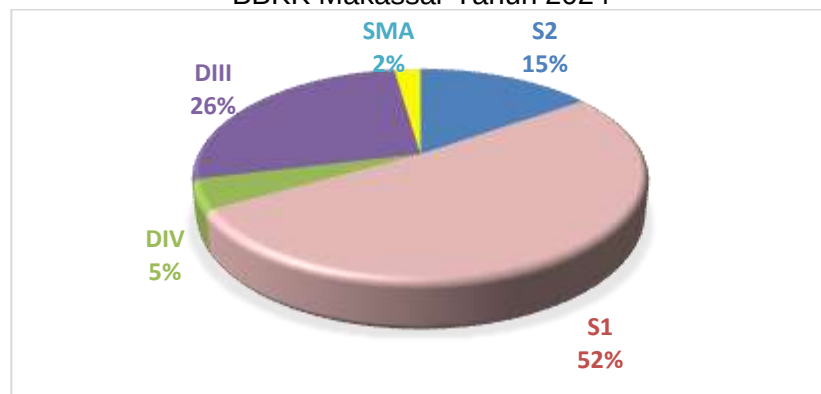


Berdasarkan grafik I.2 ASN BBKK Makassar terbesar berada pada Golongan III sebanyak 73% dan yang terkecil pada Golongan X sebesar 1%. Golongan VII, IX dan X merupakan golongan untuk ASN PPPK.

3. Menurut Pendidikan:

a) S2	=	20 orang
b) S1	=	70 orang
c) DIV	=	6 orang
d) DIII	=	33 orang
e) SMA	=	3 orang

Grafik I.3 Distribusi ASN menurut Jenjang Pendidikan BBKK Makassar Tahun 2024



Berdasarkan Grafik I.3 distribusi ASN BBKK Makassar terbanyak pada jenjang pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 52% disusul Strata 2 (S2) sebanyak 15% dan yang terkecil sebanyak 2% pada jenjang pendidikan SMA. Jenjang S1 dan S2 menempati urutan 1 dan 2 karena adanya kesempatan tugas belajar yang dibiayai oleh Kemenkes dengan mengikuti rangkaian aturan baik secara administrasi maupun akademik sesuai dengan MOU yang ditetapkan antara Kemenkes dengan Perguruan Tinggi, sehingga ASN BBKK Makassar dapat mengupgrade jenjang pendidikan sesuai dengan kompetensinya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika laporan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Membandingkan realisasi kinerja dengan 3 (tiga) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan;
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang meunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan mewujudkan kinerja organisasi untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan indicator dan rincian output.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan terdiri atas dua bagian yaitu Rencana Kerja Lima Tahun yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024.

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK)

RAK Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan Makassar merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. BBKK Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen P2P Kemenkes RI. Olehnya itu, kegiatan yang dilaksanakan di BKK harus mendukung program yang direncanakan pada Ditjen P2P.

Tabel II.1 Matriks RAK BBKK Makassar
Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator	Target						2024 Nov
			2020	2021	2022	2023	2023 Des	2024	
1	Meningkatnya Pelayanan Kekejarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekejarantinaan kesehatan	3,722,715	2,652,728					
		1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Banda ra/PLBDN			1	1	1	1	1
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di	85%	90%	0.96	0.96	0,96	0,96	0,96

No	Sasaran	Indikator	Target						2024 Nov
			2020	2021	2022	2023	2023 Des	2024	
		Pelabuhan/Bandara/PLBDN							
2	Meningkatnya Dukuingan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	80	83	85	85	85	85	85
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%						
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran		93	93	93	93	90	90
		6. Kinerja implementasi WBK satker	70	80	81	81	81	81	81
		7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	70%					
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya			80%	80%	80%	85%	85%
		8. Persentase Reaisasi Anggaran				95%	95%	96%	96%
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas Ditindaklanjuti				92,5%		95%	

Dari tabel II.1 dapat dilihat bahwa untuk tahun 2020-2024 RAK BBKK Makassar terlihat pada indikator 8 dan 9 berbeda dengan tahun 2022. Dimana di tahun 2022 indikator berjumlah 7, namun sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen P2P Nomor PR.03.02/C.I/1142/2023 tanggal 2 Februari 2023 terdapat penambahan 2 indikator dalam Perjanjian Kinerja yaitu indicator Persentase Realisasi Anggaran dan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti. Untuk tahun 2024 PK awal BBKK Makassar berjumlah 9 (sembilan) indicator, namun tanggal 16 November 2024 dilakukan revisi PK menjadi 8 (delapan) indicator. Karena untuk indicator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas Ditindaklanjuti sampai bulan

November 2024 BBKK Makassar tidak menjadi sampel pemeriksaan oleh BPK.

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

RKT merupakan penjabaran atau turunan dari RAK tahun 2020-2024. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dalam rangkaian lima tahun Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Rencana Kinerja Tahunan kemudian menjadi acuan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam rencana kinerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar tahun 2024, telah disusun indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Tabel II.2 Indikator Kinerja RKT
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	1
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
		3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	0,96
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	85
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90
		6. Kinerja implementasi WBK satker	81
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%
		8. Persentase Realisasi Anggaran	96%

Sumber Data : RKT KKP Kelas I Makassar 2024

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang

menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah yaitu Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar sebagai tanda kesanggupan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah yaitu Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selaku atasan langsung untuk persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Revisi November tahun 2024 dapat dilihat pada tabel II.3 yang merupakan PK 2024.

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Revisi November Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
		3. Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,96
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	85
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90
		6. Kinerja implementasi WBK Satker	81
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%
		8. Persentase Realisasi Anggaran	96%

Tabel II.4 Anggaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja
BBKK Makassar Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran
1	Dukungan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	Rp. 3.795.894.000,-
2	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 26.571.606.000,-
Total		Rp. 30.367.500.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar untuk tahun 2024 melakukan pengukuran terhadap indikator yang telah ditetapkan dan dibandingkan dengan target serta membandingkannya dengan hasil tahun sebelumnya. Pengukuran kinerja indikator dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sehingga diperoleh data capaian.

Hasil pengukuran kinerja akan menghasilkan data berupa informasi masing-masing indikator, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan program/kegiatan di masa akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Di samping itu pengukuran kinerja juga memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan tupoksi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RAK dan Perjanjian Kinerja.

Sasaran yang akan dicapai dalam indikator kinerja yakni Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah dan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Adapun indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja BBKK Makassar tahun 2024 yang diselaraskan dengan target indikator RAP Ditjen P2P serta target RAK BBKK Makassar tertera dalam tabel III.1 di bawah ini :

Tabel III.1 Pengukuran Kinerja BBKK Makassar
Dibandingkan dengan target Nasional dan target RAP Ditjen P2P 2024

No.	Indikator Kinerja	Indikator Renstra Kemenkes	Indikator RAP Ditjen P2P	Realisasi	Capaian
1	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PL BDN		Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan dengan target	1	100%

No.	Indikator Kinerja	Indikator Renstra Kemenkes	Indikator RAP Ditjen P2P	Realisasi	Capaian
			tahun 2024 sebesar 100		
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan dengan target tahun 2024 sebesar 100	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan dengan target tahun 2024 sebesar 100	100%	100%
3	Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PL BDN		Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan dengan target tahun 2024 sebesar 100	1	104,17%
4	Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan dengan target tahun 2024 sebesar 95	Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan target tahun 2024 sebesar 95	95,92	112,85%
5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Persentase jumlah satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80 dengan target tahun 2024 sebesar 100	Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan target tahun 2024 sebesar 95	99,88	110,98%
6	Kinerja implementasi WBK satker		Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian	86,94	107,33%

No.	Indikator Kinerja	Indikator Renstra Kemenkes	Indikator RAP Ditjen P2P	Realisasi	Capaian
			Penyakit dengan target tahun 2024 sebesar 60		
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan target tahun 2024 sebesar 60	100%	117,65%
8	Persentase Realisasi Anggaran		Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan target tahun 2024 sebesar 95	99,52%	103,67%

Berdasarkan tabel III.1 di atas untuk indikator 1 realisasi kinerja sebesar 1 dengan nilai capaian kinerja sebesar 100% sebanding dengan target RAP sebesar 100%. Indikator 2 dengan realisasi kinerja sebesar 100% dan capaian 100% sebanding dengan target Renstra Kemenkes dan RAP. Indikator 3 dengan realisasi kinerja bernilai 1 dengan nilai capaian 104,17% lebih besar dibanding dengan target RAP. Indikator 4 dengan realisasi kinerja sebesar 95,92 lebih besar dengan target Renstra dan RAP. Indikator 5 dengan realisasi kinerja sebesar 99,88 lebih kecil dari target Renstra Kemenkes sebesar 100 dan lebih besar dibanding dengan target RAP dan RAK. Indikator 6 dengan realisasi kinerja sebesar 86,94 lebih besar dibanding dengan target RAP dan RAK. Indikator 6 merupakan nilai hasil Self Assesment Menuju WBK Nasional Tahun 2024 yang disertai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Self Assesment Menuju WBK/WBBM Nasional Tahun 2024 oleh Inspektur Investigasi Kemenkes tanggal 13 Agustus 2024. Indikator 7 dengan realisasi kinerja sebesar 100% lebih besar dibanding dengan target RAP dan RAK..

Indikator 7 tercapai karena peran aktif dari Pegawai BBKK Makassar dalam peningkatan kompetensi yang diikuti baik secara daring maupun luring sesuai dengan kompetensi masing-masing. Indikator 8 dengan realisasi sebesar 99,52% lebih besar dibanding dengan target RAP dan RAK. Indikator persentase realisasi anggaran tercapai berkat kerja keras dan kolaboratif BBKK Makassar dengan lintas sector terkait.

Capaian indikator tahun 2024 akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut :

1. INDIKATOR PERTAMA

Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

a. Pengertian

Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang dilakukan dalam periode satu tahun di wilayah kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar.

b. Definisi Operasional

Status kinerja deteksi dini factor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.

c. Rumus (cara perhitungan)

Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

$$\frac{\text{Indeks Persentase orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Target Indeks Persentase orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang diperiksa sesuai standar}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Pada tabel III.2 digambarkan capaian indikator terhadap target parameter yang ditetapkan

Tabel III.2 Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Persentase orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang diperiksa sesuai standar BBKK Makassar Tahun 2024

No	Parameter	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	9.216.129	11.246.800	122,03
	1. Jumlah penumpang pesawat datang		4.836.645	
	2. Jumlah penumpang pesawat berangkat		3.006.399	
	3. Kunjungan Poliklinik Bandara (Keur, Vaksinasi)			
	- Surat Keterangan Pengujian Kesehatan		171	
	- Pelayanan vaksinasi MM, YF, Typhoid		2.435	
	- Kunjungan Petugas dan Selain Penumpang ke Klinik Bandara		1.484	
	4. Laporan Kesehatan Penjamah Makanan untuk Pekerja di Bandara		70	
	5. Pemeriksaan Personil Pesawat (Termasuk ICV Personil Kedatangan)		187.423	
	6. Jumlah Penumpang Kapal Datang		1.417.438	
	7. Jumlah Penumpang Kapal Berangkat		1.445.645	
	8. Kunjungan Poliklinik Pelabuhan (Keur, Vaksinasi)			
	- Surat Keterangan Pengujian Kesehatan		3.979	
	- Pelayanan vaksinasi MM, YF, Typhoid		6.483	
	- Kunjungan Petugas dan Selain Penumpang ke Klinik Pelabuhan		1.388	
	9. Laporan Kesehatan Penjamah Makanan untuk Pekerja di Pelabuhan		0	
	10. Pemeriksaan Awak Kapal (Termasuk ICV Awak Kapal Kedatangan)		331.614	
	11. Jumlah Skrining HIV		1.668	
	12. Jumlah Skrining TB		1.678	
	13. Jumlah Skrining Malaria		2.280	
2	Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	16.090	19.461	120,95
	1. Jumlah General Declaration (Gendec) Terverifikasi (Ttd/Stempel) di Bandara		863	
	2. Jumlah COP		224	
	3. Jumlah PHQC		18.374	
3	Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	682	822	120,53
	1. Surat Ijin Angkut Jenazah di Bandara		749	

No	Parameter	Target	Realisasi	Capaian (%)
	2. Surat Ijin Angkut Jenazah di Pelabuhan		73	
4	Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	68.441	83.488	121,99
	1. Form inspeksi hygiene & sanitasi TTU Bandara		73	
	2. Form inspeksi hygiene & sanitasi TPP Bandara		157	
	3. Form inspeksi sarana PAB (Lokus) Bandara		32	
	4. Rekapitulasi hasil survey vektor Bandara		14.501	
	5. Form inspeksi hygiene & sanitasi TTU Pelabuhan		259	
	6. Form inspeksi hygiene & sanitasi TPP Pelabuhan		593	
	7. Form inspeksi sarana PAB Pelabuhan		204	
	8. Rekapitulasi hasil survey vektor Pelabuhan		67.669	

Dari table III.2 terlihat capaian untuk masing-masing parameter berada di atas nilai 120%. Sehingga untuk perhitungan indeksnya dapat dijabarkan di dalam Tabel III.3.

Tabel III.3 Perhitungan Indeks deteksi faktor risiko
Di Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Makassar Tahun 2024

No	Parameter	Bobot	Baseline	Score	Score Max
1	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	120	600	600
2	Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	5	120	600	600
3	Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	3	120	360	360
4	Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	120	600	600
Total				2.160	2.160
$Indeks = \frac{S}{S_{max} - S_{min}}$ $Indeks = \frac{2.160}{2.160 - 0}$ $Indeks = 1$					

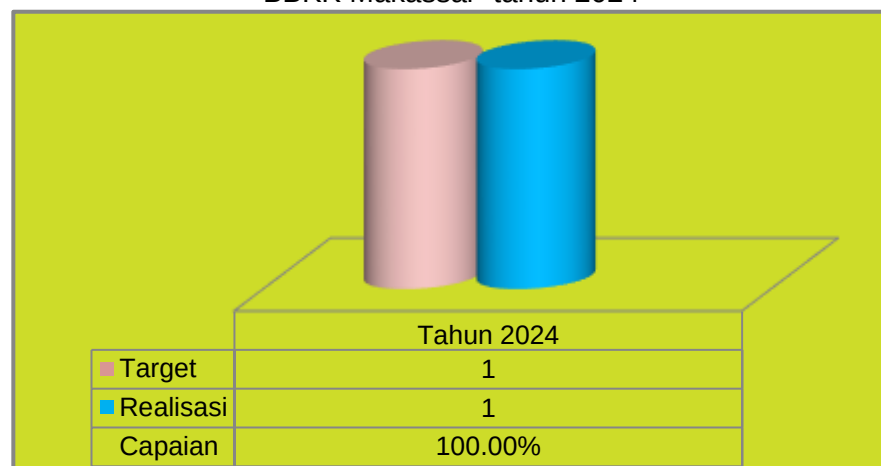
Berdasarkan tabel III.3 diperoleh score sebesar 2.160. Untuk perhitungan indeks dengan formulasi nilai score dibagi dengan score maksimal, sehingga diperoleh nilai indeks sebesar 1.

Tabel III.4 Capaian Indeks deteksi faktor risiko
Di Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Makassar Tahun 2024

No	Indikator	Target RAP	Target RAK	Realisasi	Capaian
1	Indeks deteksi factor risiko di pintu masuk negara	100%	1	1	100%

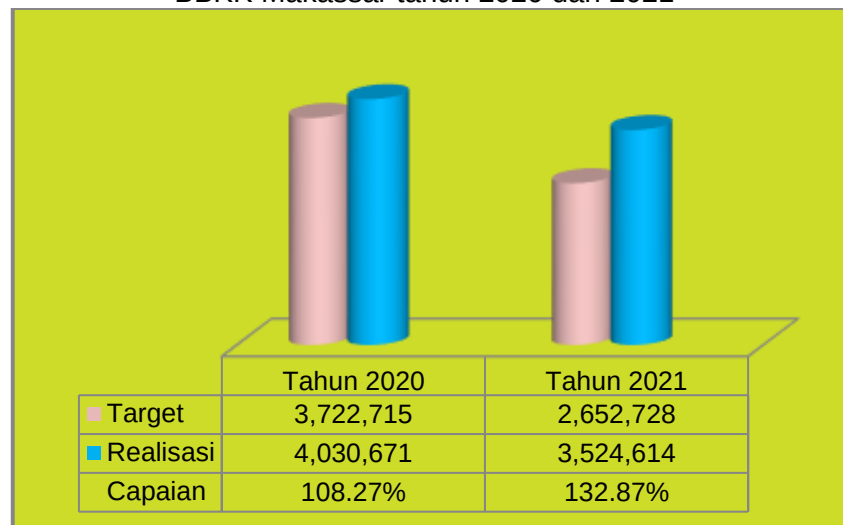
Dari table III.4 dapat dilihat capaian untuk indikator 1 sebesar 100%, diperoleh dari perbandingan antara realisasi dengan target RAK BBKK Makassar Tahun 2024

Grafik III.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-1
BBKK Makassar tahun 2024



Grafik III.1 menggambarkan antara target dan realisasi indikator 1, dapat dilihat realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 100%. Penetapan target untuk tahun 2024 ditetapkan dengan nilai indeks 1 karena realisasi di tahun 2023 maksimal sebesar 1. Di tahun 2024 jumlah penumpang meningkat signifikan seiring dengan berakhirnya masa pandemic, sehingga regulasi terkait pelaku perjalanan baik dalam negeri ataupun luar negeri berubah. Hal ini mengakibatkan parameter pemeriksaan untuk indikator 1 melonjak nilainya. Hal ini berpengaruh terhadap realisasi kegiatan, sehingga capaian yang diperoleh oleh BBKK Makassar bisa memperoleh nilai 100%.

Grafik III.2 Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Indikator Ke-1 BBKK Makassar tahun 2020 dan 2021



Dari grafik III.2 dapat dilihat realisasi target untuk indikator ke-1 pada tahun 2020, 2021 definisi operasional untuk perhitungan realisasi sama. Untuk tahun 2022 sd 2024 definisi operasional perhitungan realisasi juga sama, sehingga untuk perbandingan 2022, 2023 dan Tahun 2024 dibuatkan grafik perbandingan yang terpisah dengan tahun 2020 dan 2021.

Grafik III.3 Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Indikator Ke-1 BBKK Makassar tahun 2022, 2023 dan 2024



Dari grafik III.3 terlihat untuk indikator 1 di tahun 2022 sd 2024 semuanya mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini karena perjalanan kembali ke situasi normal, sehingga data meningkat cukup signifikan baik dari jumlah penumpang, alat angkut, barang, serta lingkungan yang merupakan parameter pendukung indikator pertama.

Grafik III.4 Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Indikator Ke-1 BBKK Makassar tahun 2024



Grafik III.4 menggambarkan perbandingan target RAP dengan realisasi indikator BBKK Makassar tahun 2024, dimana realisasi lebih besar dari target renstra yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi karena dalam pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan melampaui target yang telah ditetapkan. Untuk pemeriksaan orang selama tahun 2024 jumlah penumpang alat angkut meningkat seiring dengan status endemi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pelaksanaan haji dan umroh kembali normal, malah meningkat dari tahun sebelumnya juga memberikan sumbangsih yang cukup signifikan dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Grafik III.5 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-1 Tahun 2024
BBKK Makassar dengan BBKK Medan
BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar



Grafik III.5 tergambar bahwa keempat BBKK mencapai target yang telah ditetapkan, namun dari capaian BBKK Makassar dengan nilai paling kecil, karena penentuan target yang lebih besar dari BBKK Medan, Surabaya, dan Denpasar.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

Terdapat beberapa hal yang memberikan kontribusi terhadap tercapainya target indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara yakni :

- 1) Persentase orang yang diperiksa sesuai standar mencapai target yang ditetapkan, dipengaruhi beberapa faktor keberhasilan yaitu :
 - a) Adanya penetapan pencabutan status pandemi melalui KEPRES No. 17 Tahun 2023 tentang berakhirnya masa Pandemi Covid-19 di Indonesia yang berlaku sejak 21 Juni 2023.
 - b) Juga karena penambahan rute penerbangan domestic yakni Medan, Banjarmasin, dan Gorontalo, sehingga jumlah penumpang yang diawasi menjadi lebih banyak.
 - c) Penambahan frekuensi penerbangan internasional yang signifikan sehingga pengawasan penumpang internasional juga bertambah.

- d) Penambahan kuota haji dari tahun 2023 berjumlah 15.846 orang meningkat di tahun 2024 sebanyak 16.651 orang
 - e) Dukungan lintas sector dalam pelaksanaan deteksi dini terhadap komunitas Pelabuhan dan bandara
 - f) Pemeriksaan kesehatan pelaut untuk perpanjangan buku pelaut, perpanjangan lisensi dan melamar pekerjaan
- 2) Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar mencapai target yang ditetapkan karena :
 - a) Penambahan rute dan frekuensi penerbangan domestik yakni Medan, Banjarmasin dan Gorontalo, sehingga pengawasan alat angkut lebih meningkat
 - b) Penambahan frekuensi penerbangan internasional, signifikan jumlah frekuensi penerbangan dalam pelaksanaan umrah.
 - c) Pengawasan alat angkut pelaksanaan haji yang lebih meningkat dari tahun sebelumnya.
 - 3) Persentase barang yang diperiksa sesuai standar mencapai target karena kemudahan akses untuk pengiriman jenazah melalui transportasi udara dan laut.
 - 4) Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar tercapai karena adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan serta peran lintas sektor yang mendukung tuisi dari BBKK Makassar.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Eksternal
 - a) Belum semuanya pelaku perjalanan memahami prosedur pelaksanaan kekarantinaan kesehatan pada pelaku perjalanan yang masuk kategori suspek atau kontak erat penyakit menular.
 - b) Masih terdapat pelaku perjalanan luar negeri khususnya Jemaah umroh yang tidak mau mengisi assessment mandiri SSHP (Satu Sehat *Health Pass*).

- c) Kurang maksimalnya jaringan internet di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, sehingga untuk pengawasan SSHP membutuhkan waktu yang lama untuk masing-masing pelaku perjalanan.
- d) Hasil Pemeriksaan Skrining HIV tidak sesuai aplikasi SIHA disebabkan karena terkendala pada penginputan NIK.

2) Internal

- a) Ketersediaan tenaga yang masih kurang di beberapa wilker sehingga menyebabkan adanya beban kerja yang berlebihan
- b) Kurangnya tenaga dokter dan perawat, sehingga belum semua wilker membuka layanan vaksinasi
- c) Belum semua Wilker tersedia kendaraan boarding
- d) Masih terdapat beberapa ruang pemeriksaan di terminal pelabuhan masih kurang representatif
- e) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang laboratorium
- f) Cakupan layanan BBKK Makassar yang terlalu luas mencakup 2 (dua) provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, sehingga koordinasi dengan Wilker yang jaraknya jauh kurang maksimal.

g. Usul Pemecahan Masalah

1) Eksternal

- a) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait proses kekarantinaan kesehatan
- b) Perlunya edukasi dan media KIE tentang SSHP
- c) Penggunaan modem internal pada saat pelayanan SSHP terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri.
- d) Perlunya koordinasi dengan penyedia dan pengguna jasa di Bandara dan Pelabuhan terkait tentang kelengkapan administrasi pelaksanaan deteksi dini HIV/AIDS (*VCT Mobile*)

2) Internal

- a) Penambahan SDM melalui seleksi CPNS/PPPK/Mutasi Internal
- b) Mengusulkan pengadaan kendaraan operasional untuk *boarding*
- c) Koordinasi dengan lintas sektor terkait di pelabuhan dan bandara
- d) Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium

h. Analisis Efisiensi Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja i

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(2.160.531.000 \times 1) - 2.129.260.843}{2.160.531.000 \times 1} \times 100\%$$

$$E = 1,45\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{1,45\%}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 53,62\%$$

Untuk indikator 1 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.160.531.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.129.260.843,-

serta capaian indikator sebesar 100%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,45%. Sehingga nilai efisiensi diperoleh sebesar 53,62%.

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator 1 penggunaan sumber daya efisien dengan nilai efisiensi di atas 50% yaitu 53,62%.

Selain dari penggunaan anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Penggunaan alat skrining (*thermal scanner*) dengan sistem sensor lebih efektif dan tidak perlu membutuhkan operator yang banyak sehingga protokol kesehatan bisa diterapkan secara maksimal dengan menjaga jarak aman.
- 2) Penerapan interkoneksi aplikasi Sinkarkes dan Simponi dalam penerbitan dokumen kesehatan.
- 3) Aplikasi Langsung Digital dapat mempersingkat waktu dalam penerbitan dan menyederhanakan alur pelayanan dalam menerbitkan SKLT dan SKTLT.
- 4) Aplikasi Sehat Care yang memudahkan bagi pelanggan ataupun petugas untuk mendapatkan Formulir Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan secara Sistematis, Jelas, Hemat, dan terdata dengan baik.

2. INDIKATOR KEDUA

Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

a. Pengertian

Persentase faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan hasil dari pemeriksaan/penapisan orang, alat angkut sesuai standar

kekarantinaan, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam periode satu tahun di wilayah kerja Balai Besar Karantina Kesehatan Makassar.

b. Definisi Operasional

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun.

c. Rumus (cara perhitungan)

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%

$$\frac{\text{Persentase FR penyakit yang dikendalikan}}{\text{Persentase target FR penyakit yang dikendalikan}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

$$\frac{290}{290} \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2024 terdapat 254 faktor risiko yang dikendalikan dalam pemeriksaan orang, 35 faktor risiko yang dikendalikan dalam pemeriksaan alat angkut, tidak terdapat faktor risiko yang dikendalikan dalam pemeriksaan barang, serta 1 faktor risiko yang dikendalikan dalam pemeriksaan lingkungan. Rincian faktor risiko yang dikendalikan terdapat dalam tabel III.5 sebagai berikut :

Tabel III.5 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Orang
BBKK Makassar Tahun 2024

Jenis Pemeriksaan Orang	Faktor Risiko ditemukan	Faktor Risiko dikendalikan		
		Notifikasi	Tolak Berangkat	SKTLT
1. Suhu $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ atau kontak erat => Notifikasi	86	86	0	0

Jenis Pemeriksaan Orang	Faktor Risiko ditemukan	Faktor Risiko dikendalikan		
		Notifikasi	Tolak Berangkat	SKTLT
2. Covid-19 Positif (Data PCR & Antigen Induk di NAR) => Notifikasi	27	27	0	0
3. Sakit (Termasuk Saturasi < 95, HB < 8,5) => SKTLT atau Pertolongan Gawat Darurat	104	0	15	89
4. Hamil > 32 Minggu => SKTLT	1	0	0	1
5. Hamil < 14 Minggu dan > 26 Minggu (Jamaah Haji) => Berita Acara Tidak Laik Terbang	1	0	0	1
6. Penyakit Menular yang Menimbulkan Wabah => SKTLT	16	0	0	16
7. Belum Vaksin Meningitis => Berita Acara Tolak Berangkat bahwa Ybs Harus Divaksinasi	0	0	0	0
8. Buku ICV Palsu/Expired => Berita Acara Tolak Berangkat	5	0	5	0
9. HIV Positif, TB Positif, Malaria Positif => Notifikasi+C2	HIV : 0 IMS : 7 TB : 1 Malaria : 6	14	0	0
Jumlah	254	127	20	107

Sumber : Data Sinkarkes Tahun 2024

Berdasarkan tabel III.5 terdapat 9 jenis pemeriksaan pada orang, dengan 254 FR yang ditemukan. Dimana ditemukan 7 positif IMS, 1 positif TB dan 6 positif malaria, 1 (satu) orang hamil sehingga ditunda keberangkatan hajinya, 96 orang hamil pelaku perjalanan domestik, 1 diantaranya diberikan SKTLT dan 95 orang lainnya layak terbang dengan usia kehamilan >32 dan < 36 minggu, orang sakit sebanyak 104 orang 15 orang ditolak keberangkatannya karena harus dirujuk ke Rumah Sakit dan 89 orang diberikan SKTLT. Untuk buku ICV palsu yang ditemukan saat pengawasan keberangkatan pelaku perjalanan luar negeri sebanyak 41 dokumen, yang mana 5 diantaranya dilakukan penundaan keberangkatan dengan diberikan rekomendasi penundaan keberangkatan ke pihak maskapai pengangkut. Terhadap ke 41 pelaku perjalanan yang memiliki dokumen ICV tersebut dilakukan pengambilan keterangan secara langsung di tempat kejadian baik secara kolektif maupun perorangan.

Tabel III.6 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Alat Angkut
BBKK Makassar Tahun 2024

Jenis Pemeriksaan Alat Angkut	Faktor Risiko ditemukan	SSCC	Surat bebas karantina	One month extention
1. Sanitasi dan vektor	35	35	0	0
Jumlah	35	35	0	0

Berdasarkan tabel III.6 ditemukan 35 FR dalam pemeriksaan alat angkut, dengan pengendalian berupa dilakukan penyehatan alat angkut (fumigasi /disinseksi) kemudian diterbitkan Ship Sanitation Certificate Control (SSCC).

Tabel III.7 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Barang
BBKK Makassar Tahun 2024

Jenis Pemeriksaan Barang	Faktor Risiko ditemukan	Tolak berangkat	Tunda Berangkat	Desinfeksi
1. Jenazah penyakit menular	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.7 tidak ditemukan FR dalam pemeriksaan barang. Bila ditemukan adanya FR maka petugas BBKK Makassar melaksanakan desinfeksi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

Tabel III.8 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Lingkungan
BBKK Makassar Tahun 2024

Jenis Pemeriksaan Lingkungan	Faktor Risiko ditemukan	Fogging	Pemberantasan Sarang Nyamuk	Abatisasi	Pemberian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
1. TPP (e coli, MPN coliform, alat usap makan dan masak), yang tidak memenuhi syarat/indeks tinggi	1	0	0	0	1
2. Air (e coli, MPN coliform, risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi), yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi	0	0	0	0	0

Jenis Pemeriksaan Lingkungan	Faktor Risiko ditemukan	Fogging	Pemberantasan Sarang Nyamuk	Abatisasi	Pemberian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
3. Vektor di lingkungan buffer dan perimeter bandara/ pelabuhan	0	0	0	0	0
Jumlah	1	1	1	1	1

Dari table III.8 terdapat 1 FR pada pemeriksaan media lingkungan TPP yang dikendalikan dengan pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan untuk dilakukan perbaikan terhadap komponen yang belum terpenuhi.

Tabel III.9 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan BBKK Makassar Tahun 2024

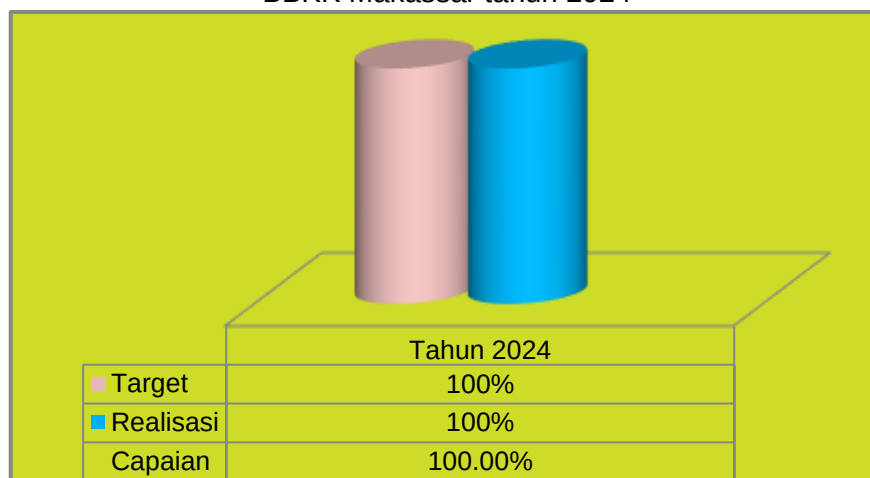
Pemeriksaan	Jumlah FR yang ditemukan	Jumlah FR dikendalikan	Persentase FR yang dikendalikan $(3/2)*100$
1	2	3	4
Pemeriksaan orang	254	254	100
Pemeriksaan alat angkut	35	35	100
Pemeriksaan barang	0	0	0
Pemeriksaan Lingkungan	1	1	100
Total	290	290	100

Dalam Tabel III.9 terdapat 290 faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan.

Tabel III.10 Perbandingan RAP dengan RAK Indikator Kedua BBKK Makassar Tahun 2024

No	Pemeriksaan	Target RAP		Target RAK	Persentase FR yang dikendalikan (%)	Capaian%
1	Pemeriksaan orang	100 %		100 %	100	100
2	Pemeriksaan alat angkut				100	100
3	Pemeriksaan barang				100	100
4	Pemeriksaan lingkungan				100	100
	Total	100 %		100 %	100	100

Grafik III.6 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-2
BBKK Makassar tahun 2024



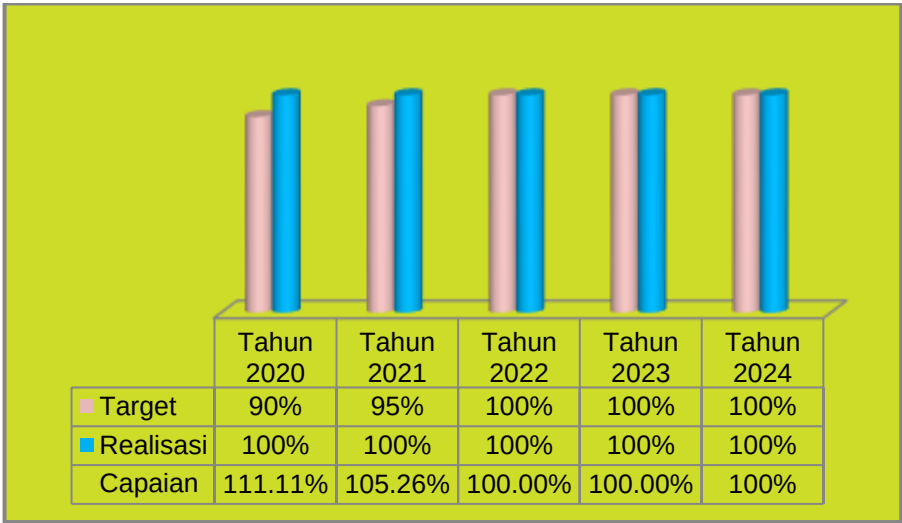
Grafik III.6 menunjukkan realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Target ditetapkan 100% karena tiga tahun terakhir tahun 2020, 2021, dan 2023 dengan indikator dan parameter yang sama, capaian BBKK Makassar melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga ditahun 2024 ditetapkan target maksimal. Untuk realisasi yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena semua faktor risiko yang didapatkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan/penapisan orang, alat angkut sesuai satandar kekarantinaan, barang dan lingkungan dikendalikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan orang, dalam hal pengawasan penumpang jika terdapat suhu di atas 37,5°C maka langsung diadakan pemeriksaan antigen dan jika hasil positif akan diberikan notifikasi yang dikirimkan ke Dinkes Provinsi yang selanjutnya akan dikirimkan ke Dinkes Kab/Kota dimana penumpang tersebut berdomisili. Pengawasan berlanjut dengan penyelidikan epidemiolog yang dilakukan oleh kolaborasi Timker I, II, III dan IV. Orang hamil dan sakit juga diterbitkan SKTLT nya jika tidak layak terbang dari hasil pemeriksaan tenaga kesehatan BBKK Makassar.

Untuk alat angkut jika terdapat faktor risiko maka akan diterbitkan dokumen SSCC.

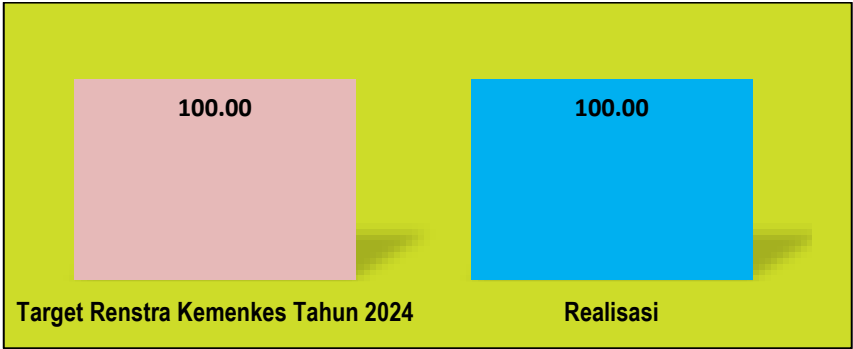
Pemeriksaan barang berupa jenazah dengan penyakit menular langsung diadakan tindakan desinfeksi, namun untuk tahun 2024 jenazah yang diawasi tidak terdapat jenazah penyakit menular. Untuk pemeriksaan lingkungan pengawasan TPP yang tidak sesuai fungsinya diberikan rekomendasi.

Grafik III.7 Perbandingan Capaian Indikator Ke-2 BBKK Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024



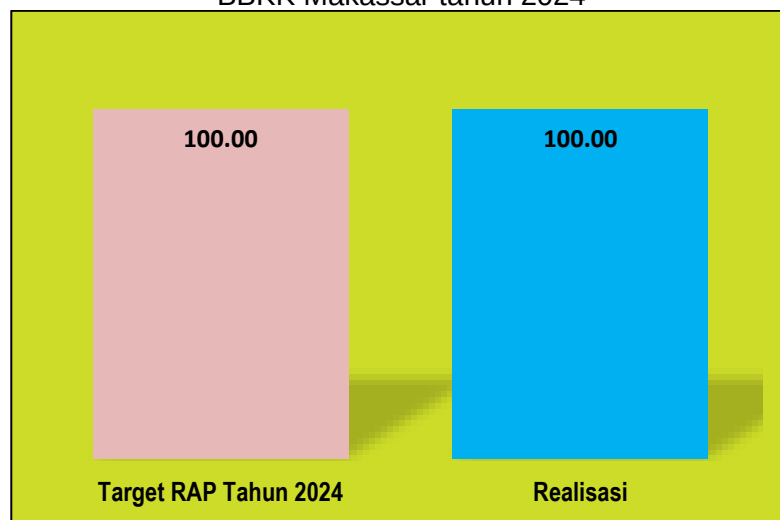
Grafik III.7 menggambarkan capaian untuk indikator ke-2 untuk tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024. Dimana realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi tercapai maksimal karena semua faktor risiko yang ditemukan, semuanya dikendalikan.

Grafik III.8 Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Indikator Ke-2 BBKK Makassar tahun 2024



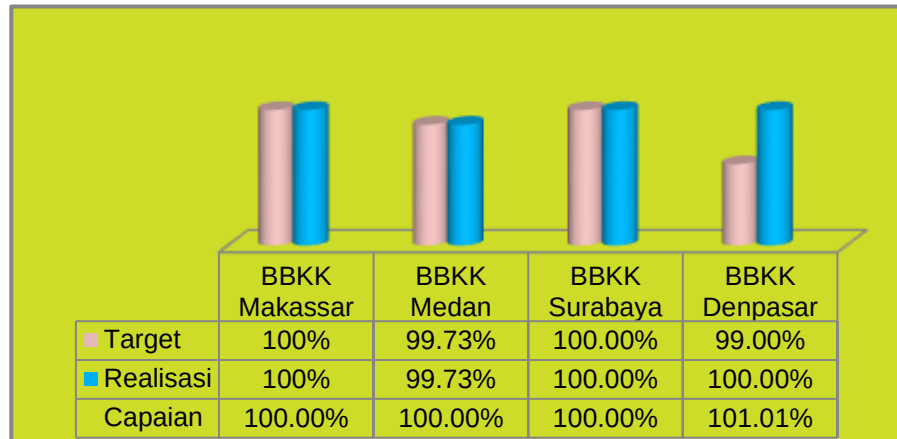
Grafik III.8 menggambarkan target Renstra Kemenkes sebesar 100 sebanding dengan realisasi indikator kinerja kegiatan BBKK Makassar, karena semua factor risiko yang ditemukan pada indikator 1 dikendalikan pada indikator 2.

Grafik III.9 Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Indikator Ke-2 BBKK Makassar tahun 2024



Grafik III.9 menggambarkan realisasi tahun 2024 BBKK Makassar sesuai dengan target RAP tahun 2024. Hal ini karena semua faktor risiko yang ditemukan dalam pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan dikendalikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kerja sama tim yang solid didukung dengan SDM yang berkompeten sehingga di akhir tahun 2024 realisasi kegiatan dapat mencapai target sesuai yang ditetapkan.

Grafik III.10 Perbandingan Capaian Indikator Ke-2
BBKK Makassar dengan BBKK Medan,
BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar
Tahun 2024



Dari grafik III.10 di atas menunjukkan BBKK Makassar, Medan, dan Surabaya dengan realisasi 100%. BBKK Denpasar realisasi di atas target yang ditetapkan. Namun semua berproses sampai akhir tahun 2024. Dalam menetapkan target BBKK Makassar mengacu pada tahun-tahun sebelumnya dengan realisasi sesuai target, sehingga ditetapkan target sebesar 100%. Dengan maksud semua faktor risiko yang ditemukan dikendalikan sesuai dengan aturan berlaku berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan oleh masing-masing parameter.

e. Analisa Keberhasilan Kegiatan

- 1) Dalam pemeriksaan orang, FR yang ditemukan langsung dikendalikan karena :
 - a) adanya dukungan lintas sector dan lintas program yaitu Dinkes Prov., Kota/Kab., PT. Angkasa Pura I, Otoritas Pelabuhan, Otoritas Bandara, Kesyahbandaran, KSOP, maskapai penerbangan, agen kapal dan travel.
 - b) Pengawasan pelaku perjalanan tetap dilaksanakan sebagai deteksi dini masuknya penyakit potensial wabah.

- c) Pelaksanaan pemeriksaan deteksi dini pada pelaku perjalanan yang masuk kategori *suspect* penyakit menular dan kontak erat.
 - 2) Dalam pemeriksaan alat angkut, FR ditemukan langsung dikendalikan sehingga mencapai target yang telah ditetapkan karena :
 - a) Dukungan agen kapal yang memberikan informasi yang akurat
 - b) Dukungan lintas sektor dalam pengawasan alat angkut.
 - 3) Dalam pemeriksaan lingkungan, FR yang ditemukan langsung dikendalikan, sehingga target tercapai sesuai yang ditetapkan karena adanya dukungan lintas sector serta ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPD.
- f. Masalah yang dihadapi
- 1) Sumber daya dalam pengawasan meliputi SDM, sarana, dan prasarana kurang memadai.
 - 2) Masih terdapat beberapa pelaku perjalanan yang tidak menerima dinyatakan status tidak laik terbang
 - 3) Masih terdapat Pelaku perjalanan luar negeri yang termasuk *suspect* dan/atau kontak menolak untuk dilakukan pemeriksaan swab Antigen/PCR.
 - 4) Belum ada keseragaman pelaksanaan aturan pengawasan pesawat dalam negeri terjangkau dan OMKABA di BKK seluruh Indonesia.
 - 5) Pengawasan pelaku perjalanan dari luar negeri terkait pengisian *assessment* mandiri (SSHP) tidak seragam dilaksanakan di seluruh BKK Indonesia.
- g. Usul pemecahan masalah
- 1) Peningkatan sumber daya yang dibutuhkan di BKK.
 - 2) Memberikan edukasi kepada pelaku perjalanan tentang syarat laik terbang, izin angkut jenazah, orang sakit, dan pelaku

perjalanan luar negeri yang termasuk *suspect* dan/atau kontak erat.

- 3) Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan lintas sektor mengenai prosedur penanganan pelaku perjalanan luar negeri yang termasuk *suspect* dan/atau kontak erat.
- 4) Mengusulkan keseragaman regulasi dan pelaksanaan terkait pengawasan pesawat dan pelaku perjalanan di seluruh BKK.

h. Analisis Efisiensi Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai Efisiensi

$$E = \frac{(506.610.000 \times 1) - 503.754.800}{506.610.000 \times 1} \times 100\%$$

$$E = 0,56\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{53,96}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 51,41\%$$

Untuk indikator 2 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 506.610.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 503.754.800,- serta capaian indikator sebesar 100%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,56% dengan nilai efisiensi sebesar 51,41%.

Nilai efisiensi lebih dari 50, berarti untuk kegiatan pada indikator 2 bernilai efisien dari sisi anggaran.

Selain efisiensi dari anggaran, penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Adanya *Whatsapp Group* yang telah dibuat yang beranggotakan lintas sektor pelabuhan dan bandara, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta dari BBKK Makassar yang memudahkan dalam komunikasi dan koordinasi dan bertukar informasi dalam penanganan penyakit infeksi emerging.
- 2) Penggunaan aplikasi *Langsat Digital* mempercepat proses layanan pemeriksaan kesehatan bagi penumpang yang akan berangkat dengan kategori sakit, bayi, ibu hamil dan berkebutuhan khusus.
- 3) EMFIRE (Mobile Emergency First Response) dengan Motor Listrik (molis) sebagai sarana mobilisasi dalam memberikan pertolongan kegawatdaruratan diharapkan dapat merespon kegawatdaruratan kesehatan yang terjadi di bandara dengan cepat, terutama pada saat kondisi macet yaitu pada arus mudik dan situasi khusus lainnya sehingga korban dapat terhindar dari risiko kecacatan atau kematian
- 4) *Pasolle* bertujuan untuk memudahkan Badan Usaha Swasta (BUS) penyelenggara penyehatan alat angkut dalam mengajukan surat permohonan pengawas pelaksanaan penyehatan alat angkut di wilayah kerja Balai Besar Kekeamatan Kesehatan Makassar, akses untuk melihat progres dokumen, hanya dapat diakses dari email pemohon yang sudah didaftarkan

3. INDIKATOR KETIGA

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

Target Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN pada tahun 2024 adalah sebesar 0,96.

a. Pengertian

Persentase status Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN selama periode satu tahun, berupa :

- 1) Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%
- 2) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Pinjal ≤ 1
- 3) Persentase Bandara/Pelabuhan Tidak Ditemukan Larva Anopheles (< 1)
- 4) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Populasi Kecoa < 2
- 5) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Populasi Lalat < 2
- 6) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Perimeter = 0
- 7) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Buffer < 1
- 8) Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan
- 9) Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan
- 10) Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis

b. Definisi Operasional

Status faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun

c. Rumus (cara perhitungan)

Akumulasi persentase target dan capaian:

- 1) Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%
- 2) Indeks Pinjal ≤ 1

- 3) Larva Anopheles (< 1)
- 4) Populasi Kecoa < 2
- 5) Populasi Lalat < 2
- 6) HI Perimeter = 0
- 7) HI Buffer < 1
- 8) TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan
- 9) TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan
- 10) Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis

$$\frac{\text{Indeks Pengendalian FR di Pintu Masuk Negara}}{\text{Target Indeks FR di Pintu Masuk Negara}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

$$\frac{1}{0,96} \times 100\% = 104,17 \%$$

Tabel III.11 Perbandingan Target dan Realisasi
Parameter Indeks Pengendalian Faktor Risiko di
Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Makassar Tahun 2024

No	Parameter	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%	100	100	100
2	Nilai Indeks Pinjal ≤ 1	100	100	100
3	Tidak ditemukan Larva Anopheles (< 1)	100	100	100
4	Kepadatan kecoa rendah < 2	100	100	100
5	Kepadatan lalat < 2	100	100	100
6	HI Perimeter = 0	100	100	100
7	HI Buffer < 1	100	100	100
8	Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan	100	100	100
9	Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan	100	100	100
10	Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis	60	85,71	142,86

Tabel III.12 Perhitungan Indeks Pengendalian Faktor Risiko
Di Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Makassar Tahun 2024

No	Parameter	Bobot	Baseline	Score	Score Max
1	Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%	5	100	500	500
2	Nilai Indeks Pinjal ≤ 1	4	100	400	400
3	Tidak ditemukan Larva Anopheles (< 1)	3	100	300	300
4	Kepadatan kecoa rendah < 2	4	100	400	400
5	Kepadatan lalat < 2	4	100	400	400
6	HI Perimeter = 0	5	100	500	500
7	HI Buffer < 1	5	100	500	500
8	Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan	4	100	400	400
9	Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan	5	100	500	500
10	Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/Bakteriologis	5	100	500	500
Total				4.400	4.400
Indeks = $4.400/4.400 = 1$					

Berdasarkan Tabel II.12 diperoleh score sebesar 4.400. Untuk perhitungan indeks dengan formulasi nilai score dibagi dengan score maksimal, sehingga diperoleh nilai indeks sebesar 1.

Tabel III.13 Capaian Indeks Pengendalian Faktor Risiko
Di Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Makassar Tahun 2024

No	Indikator	Target RAP	Target RAK	Realisasi	Capaian
1	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	100%	0,96	1	104,17%

Dari table III.13 dapat dilihat capaian untuk indikator 3 sebesar 104,17%, diperoleh dari perbandingan antara realisasi dengan target RAK BBKK Makassar Tahun 2024

1) Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%

Tabel III.14 Capaian Indeks Pengendalian Faktor Risiko
Di Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Makassar Tahun 2024
Parameter Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%

Parameter	Pengendalian	Target	Realisasi	%Capaian
		100%	100%	100%
Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%	Penyelidikan Epidemiologi (PE)	4	4	812
	Penumpang Meninggal di Pesawat	9	9	
	Notifikasi Suhu $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ atau kontak erat =>	86	86	
	Notifikasi TB Positif	1	1	
	Notifikasi HIV Positif	0	0	
	Notifikasi IMS Positif	7	7	
	Notifikasi Malaria Positif	6	6	
	Notifikasi Suspek Covid-19 dengan pemeriksaan Antigen/PCR	108	108	
	Notifikasi ILI	86	86	
	Notifikasi SSHP Kuning/Orange/Merah	384	384	
	Penyakit Menular yang Menyebabkan Wabah (SKTLT Penyakit Menular)	16	16	
	SKTLT Sakit atau Pertolongan Darurat/ SKTLT Hamil > 32 Minggu	105	105	

Pengambilan sampel suspek Covid-19 sebanyak 108 sampel, diperiksa dengan pemeriksaan PCR dan ditemukan sebanyak 27 sampel positif. Semua suspek diberikan notifikasi. Pemeriksaan sampel ILI sebanyak 86 sampel, dengan hasil positif Influenza A sebanyak 32 sampel dan negatif sebanyak 48 sampel. SKTLT Sakit atau Pertolongan Darurat/ SKTLT Hamil > 32 Minggu sebanyak 105. Berdasarkan tabel III.14 dapat dilihat bahwa indikator sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan

kelengkapan 80% dengan realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

2) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Pinjal ≤ 1

Nilai indeks pinjal di Wilayah Kerja BBKK Makassar pada tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel III.15

Tabel III.15 Nilai Indeks Pinjal di Wilayah Kerja BBKK Makassar pada Tahun 2024

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Nilai Indeks pinjal ≤ 1	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tampa Padang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan Tabel III. 15 pada tahun 2024 dapat dilihat bahwa dari semua wilayah kerja yang ditargetkan pemasangan perangkap tikus, indeks pinjal tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan (≤ 1) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Untuk parameter ini mencapai target 100% pelabuhan/bandara dengan Indeks pinjal ≤ 1 .

3) Persentase Bandara/ Pelabuhan Tidak Ditemukan Larva Anopheles (< 1)

Tabel III.16 Hasil Survey Tingkat Kepadatan Larva Anopheles di Wilayah Kerja BBKK Makassar pada Tahun 2024

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Tidak Ditemukan Larva <i>Anopheles</i> sp (< 1)	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tanpa Padang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.16 pada tahun 2024 dapat dilihat bahwa dari semua wilayah kerja yang ditargetkan dengan tingkat kepadatan larva *Anopheles sp* tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan (indeks habitat <1) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Diperoleh hasil mencapai target 100%.

4) Persentase Bandara/ Pelabuhan dengan Indeks Populasi Kecoa (< 2)

Tabel III.17 Kepadatan Kecoa
di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2024

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Kepadatan Kecoa Rendah < 2	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tampa Padang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.17 di atas dapat dilihat bahwa dari semua wilayah kerja yang ditargetkan memenuhi syarat tidak melebihi nilai baku mutu yang dipersyaratkan (<2 ekor) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. diperoleh capaian target 100%.

5) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Populasi Lalat <2

Tabel III.18 Kepadatan Lalat
di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2024

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Kepadatan Lalat < 2	Pelabuhan Awerange	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pelabuhan Bajoe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pelabuhan Belangbelang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pelabuhan Biringkassi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pelabuhan Makassar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Pelabuhan Malili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pelabuhan Palopo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pelabuhan Parepare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pelabuhan Majene	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pelabuhan Paotere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pelabuhan Pasangkayu	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pelabuhan Siwa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bandara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	Bandara Tana Toraja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kantor Induk / Bandara Hasanuddin	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0

Berdasarkan tabel III.18 di atas dapat dilihat terjadi fluktuasi pada hasil pengamatan setiap bulannya, hasil pengamatan yang melebihi baku mutu dilakukan tindakan pengendalian untuk

menekan kepadatan. dari semua wilayah kerja yang ditargetkan indeks populasi lalat tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan (<2 ekor) berdasarkan Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Diperoleh capaian target 100%.

6) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Perimeter=0

Tabel III.19 Kepadatan Jentik *Aedes aegypti* Area Perimeter di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2024

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
HI Perimeter = 0	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tampa Padang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.19 di atas dapat dilihat bahwa dari hasil survey jentik *Ae. aegypti*, semua wilayah kerja yang ditargetkan didapatkan nilai House Indeks (HI) = 0 pada area perimeter dan

tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan Kepmikes RI No. 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/ Bandara/Pos Lintas Batas dalam Rangka Karantina Kesehatan. Untuk indikator ini mencapai target 100%.

7) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Buffer < 1

Tabel III.20 Kepadatan Jentik *Ae. aegypti* Area Buffer di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2024

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
HI Perimeter = 0	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tampa Padang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.20 di atas dapat dilihat bahwa dari hasil survey jentik *Ae. aegypti*, semua wilayah kerja yang ditargetkan didapatkan nilai House Indeks (HI) = 0 pada area buffer area dan tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan

Kepmikes RI No. 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/ Bandara/Pos Lintas Batas dalam Rangka Karantina Kesehatan. Untuk indikator ini mencapai target 100%.

8) Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan

Tabel III.21 Pemeriksaan TTU di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2024

Parameter	Wilayah Kerja	Target	%Realisasi	%Capaian
		100%	100%	100%
Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan	Pelabuhan Awerange	2	2	
	Pelabuhan Bajoe Bone	2	2	
	Pelabuhan Belang Belang Mamuju	2	2	
	Pelabuhan Biringkassi	3	3	
	Pelabuhan Makassar	2	2	
	Pelabuhan Palopo	2	2	
	Pelabuhan Parepare	2	2	
	Pelabuhan Bira Bulukumba	1	1	
	Pelabuhan Majene	1	2	
	Pos Pelabuhan Paotere	1	1	
	Pos Pelabuhan Pasangkayu	2	2	
	Bandara Hasanuddin	1	1	
	Total	21	21	

Berdasarkan tabel III.21 di atas didapatkan bahwa jumlah lokus yang menjadi target pada tahun 2024 sebanyak 21 lokus dari 12 wilayah kerja, realisasi pada tahun 2024 semua lokus memenuhi syarat kesehatan dan telah memenuhi kriteria minimal 3 kali pemeriksaan memenuhi syarat kesehatan. Setiap lokus dilaksanakan minimal 3 kali pemeriksaan dengan nilai Inspeksi Kesehatan Lingkungan memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Sarana dan Bangunan berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023. Persentase realisasi

kinerja untuk parameter ini sebesar 100% dan mencapai target sebesar 100%.

9) Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan

Tabel III.22 Pemeriksaan TPP di Wilayah Kerja
BBKK Makassar Tahun 2024

Parameter	Wilayah Kerja	Target	%Realisasi	%Capaian
		100%	100%	100%
Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan	Pelabuhan Bajoe Bone	12	12	
	Pelabuhan Biringkassi	8	8	
	Pelabuhan Makassar	5	5	
	Pelabuhan Palopo	4	4	
	Pelabuhan Parepare	7	7	
	Pelabuhan Bira Bulukumba	2	2	
	Pelabuhan Majene	1	1	
	Pos Pelabuhan Paotere	4	4	
	Pelabuhan Belang-Belang	1	1	
	Bandara Hasanuddin	6	6	
	Bandara Tumpa Padang	1	1	
	Total	51	51	

Berdasarkan tabel III.22 di atas didapatkan bahwa jumlah lokus yang menjadi target pada tahun 2024 sebanyak 51 lokus dari 11 wilayah kerja dengan capaian realisasi pada tahun 2024 adalah 51 dari 51 lokus. Setiap lokus ditargetkan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan lingkungan minimal 2 kali pemeriksaan dengan nilai Inspeksi Kesehatan Lingkungan memenuhi syarat sesuai dengan Standar Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Lingkungan, Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berdasarkan Permenkes No. 14 Tahun 2021. Persentase realisasi kinerja untuk parameter ini sebesar 100%.

10) Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis

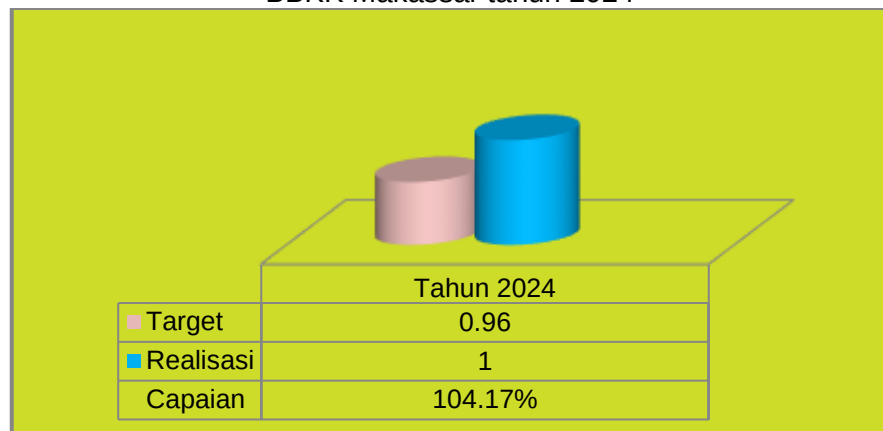
Tabel III.23 Hasil Pemeriksaan Kualitas Air di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2024

Parameter	Wilayah Kerja	Target Lokus (60%)	Pemeriksaan						Realisasi %	Capaian %
			P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6		
Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis	Pelabuhan Makassar	2	2	2	2	2	2	2	85,71	100
	Bandara Hasanuddin	2	4	4	4	4	4	4		
	Pelabuhan Rakyat Paotere	3	3	3	3	3	3	2		

Berdasarkan tabel III.23 bahwa jumlah lokus yang menjadi target pada tahun 2024 sebanyak 7 lokus di 3 wilayah kerja dengan realisasi pada tahun 2024 sebanyak 6 lokus yang memenuhi kriteria minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali pemeriksaan mikrobiologi memenuhi syarat kesehatan berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023. Terdapat satu lokus yang tidak mencapai target 6 kali pemeriksaan karena tutup sementara dan beroperasi kembali pada akhir tahun.

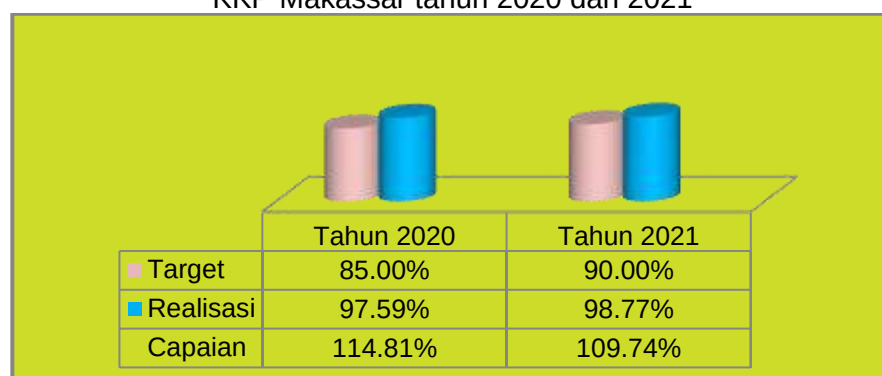
Wilker dengan lokus air bersih/air minum yang menjadi target adalah wilker yang terdapat laboratorium terakreditasi, namun untuk wilker lainnya yang tidak terdapat laboratorium terakreditasi tetap melakukan pengawasan kualitas air bersih dengan parameter fisik dan kimia secara rutin maupun berkala.

Grafik III.11 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-3
BBKK Makassar tahun 2024



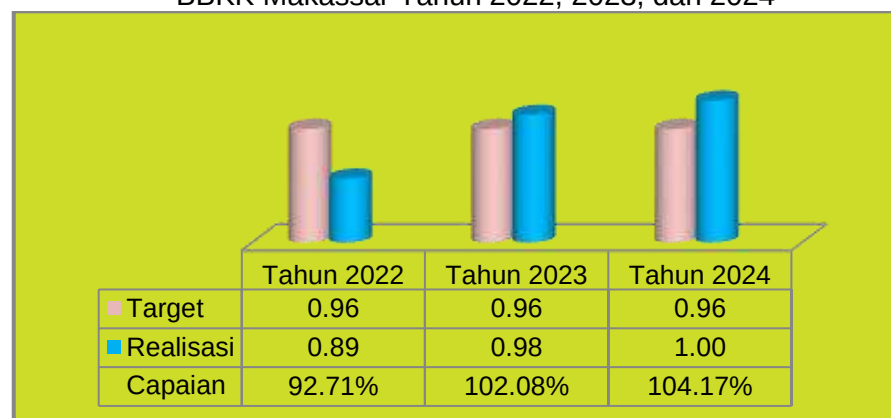
Grafik III.11 menunjukkan realisasi tercapai untuk Tahun 2024. Realisasi sebesar 1 lebih besar dibanding dengan target yang ditetapkan 0,96. Perolehan Indeks pada tahun 2024 dipengaruhi oleh 10 parameter, yang secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk parameter Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis di antara 7 lokus pemeriksaan yang MS hanya 6 lokus, karena 1 lokus pemeriksaan sampel air untuk pemeriksaan mikrobiologisnya belum memenuhi 6 (enam) kali hasil pemeriksaan memenuhi standar (MS), sedangkan lokus tersebut sudah tidak ingin diambil sampelnya dengan alasan usahanya sudah tidak berjalan. Namun walaupun terdapat 1 lokus yang TMS, namun realisasinya tetap melebihi target yang telah ditetapkan.

Grafik III.12 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-3
KKP Makassar tahun 2020 dan 2021



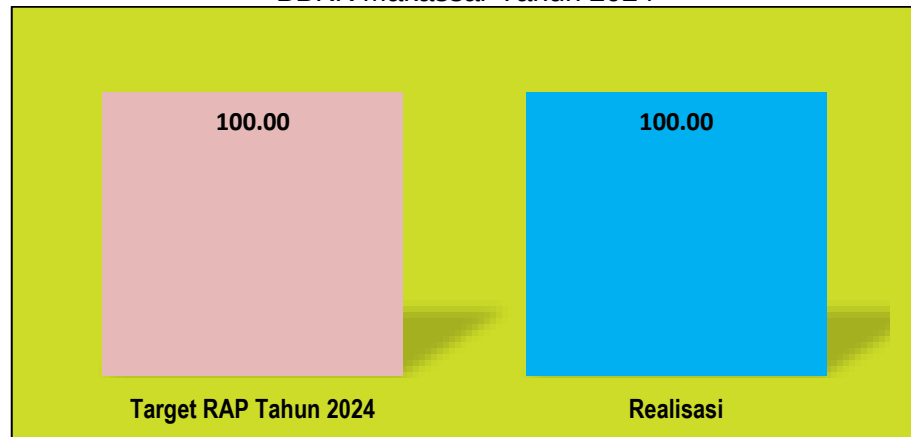
Grafik III.12 menggambarkan target dan realisasi indikator ke-3 KKP Makassar. Tahun 2020 dan tahun 2021 mempunyai definisi operasional yang sama, sehingga tahun tersebut kami jadikan perbandingan. Terlihat realisasi mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2022 sd 2024 mempunyai definisi operasional yang sama sehingga pada Grafik II.14 akan disajikan perbandingan untuk tahun 2022 sd 2024. DO untuk parameter ke10 KKP Makassar di tahun 2020 dan 2021 berbeda dengan tahun 2022, 2023 dan 2024. Untuk tahun 2022 terdapat 2 parameter yang tidak terealisasi yaitu parameter TPP Laik Hygiene dan Paramter Kualitas Air bersih selama 2 tahun berturut-turut tidak mencapai target. Dan untuk tahun 2024 keseluruhan parameter terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik III.13 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-3 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, dan 2024



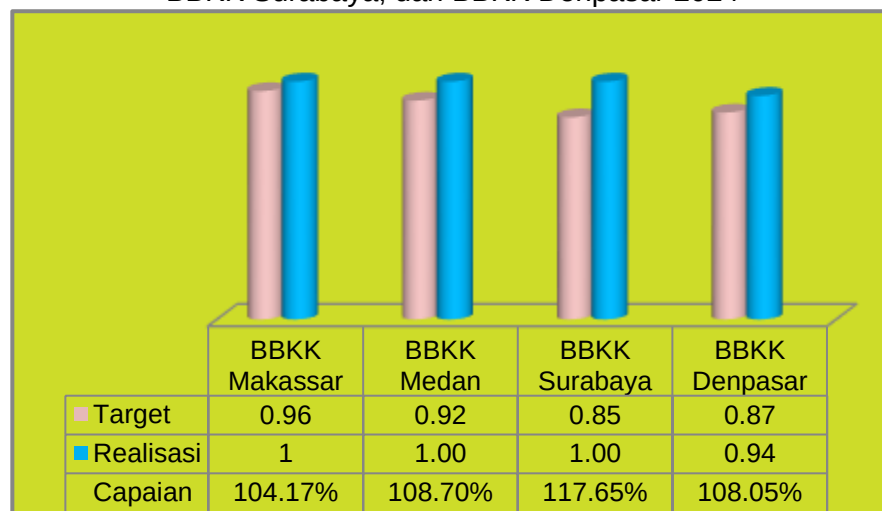
Grafik III.13 tergambar realisasi indikator untuk tahun 2022 yang tidak mencapai target. Tahun 2023 dan 2024 terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk tahun 2022 terdapat 2 parameter yang tidak mencapai target yaitu parameter ke-9 terdapat TPP yang tidak laik hygiene dan parameter ke-10 terdapat lokus yang telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 5 kali dengan hasil tidak memenuhi syarat.

Grafik III.14 Perbandingan Target RAP
Dengan Realisasi Kinerja Indikator Ke-3
BBKK Makassar Tahun 2024



Grafik III.14 menggambarkan realisasi kinerja indikator 3 BBKK Makassar sesuai dengan target RAP tahun 2024. Hal ini karena 10 parameter di indikator 3 mencapai target yang telah ditetapkan.

Grafik III.15 Perbandingan Capaian Indikator ke-3
BBKK Makassar dengan BBKK Medan,
BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar 2024



Dari Grafik III.15 menunjukkan bahwa keseluruhan BBKK terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan, namun untuk capaian berbeda untuk masing-masing BBKK karena penetapan target yang berbeda dan realisasi yang berbeda, namun secara keseluruhan melampaui target yang telah ditetapkan.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Sistem surveilans yang mengintegrasikan pelaporan dari Dinas Kesehatan (Puskesmas), Rumah Sakit dan BBKK pada website <https://skdr.surveilans.org> memudahkan dalam sistim kewaspadaan dini penyakit potensial KLB dan BBKK Makassar berperan aktif dalam menggunakan sistem ini.
- 2) Keberhasilan kegiatan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di wilayah kerja dalam rangka mengendalikan kepadatan populasi vektor karena adanya dukungan tenaga kader dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Kader yang direkrut sebagian dari lulusan program studi kesehatan lingkungan, sehingga sudah paham teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian vektor dan BPP.
- 3) Wilayah kerja yang melebihi baku mutu pada indikator yang dipersyaratkan dilakukan upaya pengendalian sesuai dengan petunjuk teknis ataupun peraturan yang mengatur tentang upaya pengendalian vektor dan BPP antara lain :
 - Metode pengamatan yang digunakan untuk mengetahui indeks pinjal yaitu dengan metode pemasangan perangkap jenis perangkap hidup (*lifetrap*) metode tersebut selain sebagai media pengamatan untuk menghitung *succestrap* juga berperan untuk mengurangi populasi tikus pada area pemasangan perangkap sehingga populasi tikus yang berperan sebagai inang dari pinjal pada lokasi pengamatan akan berkurang, selanjutnya pada tikus yang tertangkap dilakukan penyisiran untuk melihat keberadaan pinjal. Pemasangan perangkap yang telah dilaksanakan merupakan intervensi pengendalian terhadap inang dari pinjal yang secara tidak langsung berkurangnya inang dari pinjal pada lokasi pengamatan juga akan menekan indeks pinjal pada area tersebut.
 - Pemantauan dilakukan pada lokasi-lokasi yang memungkinkan sebagai perkembangbiakan nyamuk *Anopheles sp.* baik pada

perimeter area ataupun di *buffer area*. Pada lokasi pengamatan yang ditemukan larva *Anopheles sp.* dilakukan tindakan pengendalian dengan larvasidasi menggunakan larvasida BTI (*Bacillus thuringiensis israelensis*). Larvasida ini memiliki cara kerja yaitu sebagai racun perut, setelah tertelan kristal endotoksin larut yang mengakibatkan sel epitel rusak dan serangga berhenti makan lalu mati.

- Metode pengamatan yang digunakan untuk mengetahui indeks kepadatan kecoa yaitu dengan metode pemasangan perangkap jenis perangkap lem (*sticky trap*) metode tersebut selain sebagai media pengamatan juga berperan untuk mengurangi populasi pada area pemasangan perangkap sehingga populasi kecoa pada lokasi pengamatan akan berkurang. Selain itu beberapa tempat pengolahan pangan di terminal bandara yang sudah rutin melaksanakan pengendalian vektor dan BPP baik secara mandiri ataupun dengan menggunakan jasa *pest control*.
- Tindakan pengendalian yang dilakukan pada lokasi dengan indeks kepadatan lalat yang tinggi yaitu dengan metode pengendalian secara kimia (*spraying*), metode ini dapat menekan dan memberantas lalat dewasa sebagai tindakan pengendalian dalam rangka mencegah penyakit tular vektor dan BPP yang disebabkan oleh lalat.
- Pengendalian nyamuk *Aedes aegypti* dilakukan pada fase jentik dengan larvasidasi dan untuk nyamuk dewasa yaitu dengan pengasapan/ fogging. Pemberian larvasida ini dapat menekan kepadatan populasi untuk jangka waktu 2 bulan. Pembubuhan larvasida dilakukan bersamaan saat melakukan survey jentik. Apabila ditemukan container yang berpotensi serta positif larva. Jenis larvasida yang digunakan adalah jenis larvasida granula temephos. Temephos 1 % sesuai dengan yang dianjurkan aman bagi manusia dan tidak menimbulkan keracunan. Jika dimasukkan kedalam air maka sedikit demi sedikit zat kimia tersebut akan larut secara merata dan

membunuh semua larva nyamuk yang ada dalam tempat penampungan air tersebut. Dosis penggunaan temephos adalah 10 gram untuk 100 liter air.

- 5) Keberhasilan capaian kinerja pada setiap lokus Tempat-Tempat Umum, Tempat Pengelolaan Pangan dan kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan karena adanya upaya pengembangan edukatif melalui :
 - a) pendekatan persuasif terhadap pengelola ataupun karyawan untuk memberikan kemudahan dalam membangun komunikasi pendampingan
 - b) frekuensi pemeriksaan dilakukan melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap komponen/variabel yang dinilai
 - c) melakukan upaya peningkatan pengetahuan melalui penyuluhan keamanan pangan terhadap pengelola/karyawan
 - d) Intervensi terhadap lokus yang tidak memenuhi syarat dapat dilakukan oleh pihak pengelola berdasarkan rekomendasi yang diberikan sehingga komponen yang diperiksa didapatkan hasil memenuhi syarat pada pemeriksaan berikutnya
 - 6) Adanya kesadaran masyarakat pelabuhan dan bandara membangun komitmen dalam mewujudkan pelabuhan dan bandara sehat.
 - 7) Peran aktif lintas sektor membantu dalam menerapkan regulasi terkait SOP pelaksanaan program pengendalian risiko lingkungan di pelabuhan dan bandara.
- f. Masalah yang dihadapi
- 1) Hasil pemeriksaan Laboratorium membutuhkan waktu lama sehingga berpotensi menimbulkan penularan di wilayah.
 - 2) Kurangnya SDM dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional di wilayah kerja
 - 3) Ketersediaan dana bersumber SBK dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian vektor dan BPP belum maksimal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

- 4) Terbatasnya Tenaga Sanitasi Lingkungan (TSL) yang dinyatakan sebagai petugas yang kompeten dalam pengambilan contoh uji air (PPCUA)

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Berkoordinasi dengan Laboratorium untuk memberikan prioritas terhadap pemeriksaan sampel suspek KLB.
- 2) Pengadaan SDM melalui CPNS, PPPK maupun mutasi internal Kemenkes untuk didistribusikan ke wilayah kerja.
- 3) Penambahan anggaran pelaksanaan program pengendalian vektor dan BPP.
- 4) Tenaga sanitasi lingkungan ditugaskan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Uji Air (PPCUA)
- 5) Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai metode pengendalian vektor serta pemberdayaan masyarakat dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- 6) Bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi yang terdapat di wilayah kerja yang dapat melakukan pemeriksaan kualitas air bersih/air minum

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\%\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja
NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(564.754.000 \times 1,04) - 543.268.496}{564.754.000 \times 1,04} \times 100\%$$

$$E = 7,66\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{7,66}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 69,14\%$$

Untuk indikator 3 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 564.745.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 543.268.496,- serta capaian indikator sebesar 104,17%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,66% dengan nilai efisiensi sebesar 69,14%. Dari hasil perhitungan terlihat nilai efisiensi yang lebih dari 50, artinya kinerja terlaksana dengan penggunaan anggaran yang tidak terlalu besar.

Selain itu efisiensi penggunaan dari sisi anggaran, efisiensi sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Sumber daya yang digunakan adalah memanfaatkan petugas surveilans puskesmas, maupun petugas surveilans BKK, sedangkan untuk wilker dengan jumlah personil yang terbatas ditunjuk petugas penanggung jawab Timker 1.
- 2) Ketersediaan SDM terlatih yang jumlahnya terbatas sehingga satu petugas melaksanakan lebih dari satu kegiatan. Kegiatan dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan yang lainnya.
- 3) Keterlibatan kader pada kegiatan survey dan pengendalian vektor dan BPP.

4. INDIKATOR KEEMPAT

Nilai Kinerja Anggaran

a. Pengertian

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah hasil pengukuran kualitas kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja yang diukur dengan nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).

Persentase Capaian Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang tertera pada *dashboard* aplikasi SMART Kemenkeu RI..

b. Definisi Operasional

NKA diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang tertera pada *dashboard* aplikasi SMART Kemenkeu RI.

- 1) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:
 - a) Capaian Realisasi Output dengan bobot sebesar 75%
 - b) Efisiensi SBK dengan bobot sebesar 15%
 - c) Penggunaan SBK dengan bobot sebesar 10%.
- 2) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:
 - a) Revisi DIPA dengan bobot sebesar 10%
 - b) Deviasi Halaman III DIPA dengan bobot sebesar 15%
 - c) Penyerapan Anggaran dengan bobot sebesar 20%
 - d) Belanja Kontraktual dengan bobot sebesar 10%
 - e) Penyelesaian Tagihan dengan bobot sebesar 10%
 - f) Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot sebesar 10%
 - g) Capaian Output dengan bobot sebesar 25%, dan
 - h) Dispensasi SPM (sebagai pengurang).

c. Rumus (cara perhitungan)

Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker dihitung dengan menjumlahkan 50% Nilai

Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Adapun bobot dan nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

1) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

No	Parameter	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
1	Capaian Realisasi Output	75%	100	75
2	Efisiensi SBK	15%	46,30	6.95
3	Penggunaan SBK	10%	100	10
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				91,95

2) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

No	Parameter	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
1	Revisi DIPA	10%	100	10
2	Deviasi Hal III DIPA	15%	100	15
3	Penyerapan Anggaran	20%	99,38	19,88
4	Belanja Kontraktual	10%	100	10
5	Penyelesaian Tagihan	10%	100	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	100	10
7	Capaian Output	25%	100	25
8	Dispensasi SPM (Sebagai Pengurang)		0	0
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran				99,88

Adapun pengukuran NKA ini adalah sebagai berikut:

$$\text{NKA} = (50\% \times \text{Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran}) + (50\% \times \text{Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran})$$

$$\text{NKA} = (50\% \times 91,95) + (50\% \times 99,88)$$

$$\text{NKA} = 45,98 + 49,94$$

$$\text{NKA} = 95,92$$

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi Nilai Kinerja Anggaran}}{\text{Target Nilai Kinerja Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{95,92}{85} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian} = 112,85\%$$

Perhitungan NKA di atas telah sesuai dengan nilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tertera pada *dashboard* aplikasi SMART Kemenkeu RI dimana nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 91,95 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 99,88 sehingga menghasilkan NKA sebesar 95,92.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam Gambar III.1

	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektifitas Capaian SK	Penggunaan SDA	Dilayani SDK
1	KEBUN	BALAI BESAR KEMANTHAN KESEHATAN MANUSIA KEMENTERIAN RISETANAS	84,9%	100,0%	100,0%	46,3%

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Gambar III.1 Screenshoot Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Tahun Anggaran 2024

Adapun Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam Gambar III.2

[illegible]

Gambar III.2 Screenshoot Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Tahun Anggaran 2024

Sehingga Nilai Kinerja Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam Gambar III.3

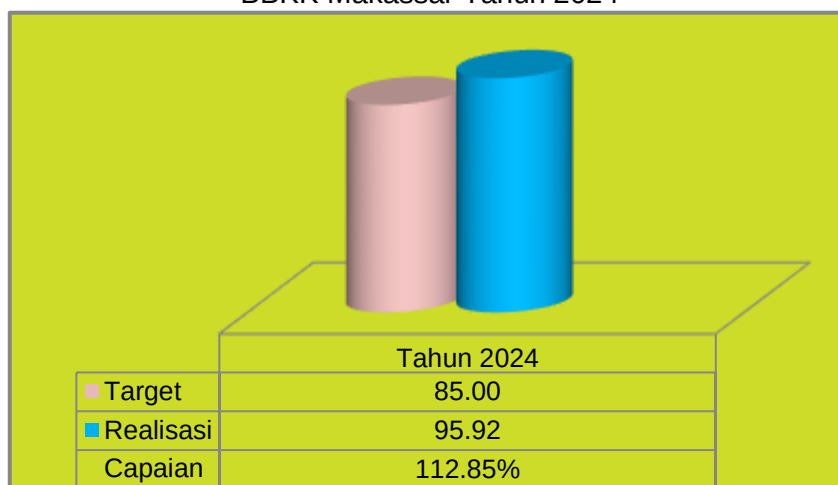


No. +1	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	BALAI BESAR REKAMARTITANAN KESEHATAN MAKASSAR		91,35	93,00	95,92

Gambar III.3 Screenshoot Nilai Kinerja Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Tahun Anggaran 2024

Sesuai dengan Nilai Kinerja Anggaran yang tertera pada *dashboard* aplikasi SMART Kemenkeu RI di atas, nilai BBKK Makassar Tahun 2024 adalah sebesar 95,92.

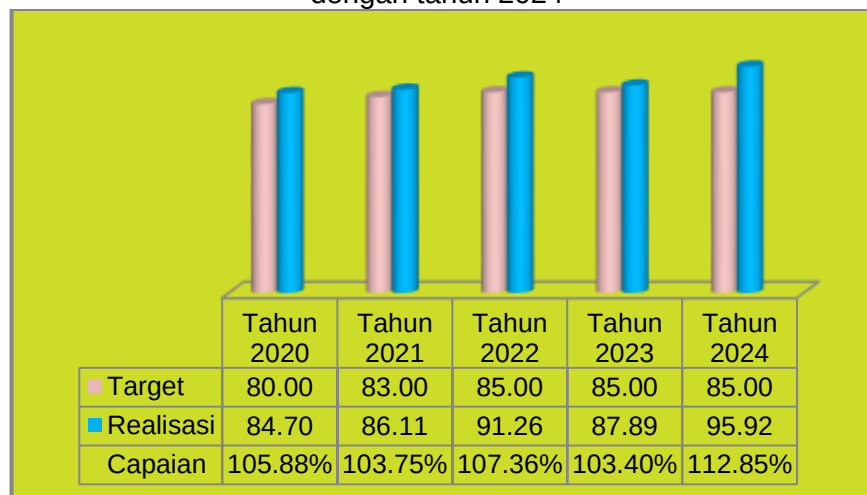
Grafik III.16 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar Tahun 2024



Grafik III.16 menunjukkan realisasi yang lebih besar dibanding dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar 95,92% dengan capaian 112,85%. Realisasi di tahun 2024 tercapai karena untuk tahun 2024 perhitungan NKA merupakan penjumlahan nilai kinerja perencanaan anggaran dan IKPA. Sebagai mana diketahui Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran mencakup capaian realisasi output dengan bobot terbesar 75%, BBKK Makassar di tahun 2024 memperoleh nilai caput sebesar 100, juga untuk IKPA BBKK Makassar tahun 2024 dengan nilai 99,88. Sehingga dari hasil penjumlahan dari komponen tersebut sehingga NKA BBKK Makassar dapat mencapai nilai 95,92% melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun perbandingan capaian indikator ke-4 antara tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat dalam Grafik III.18.

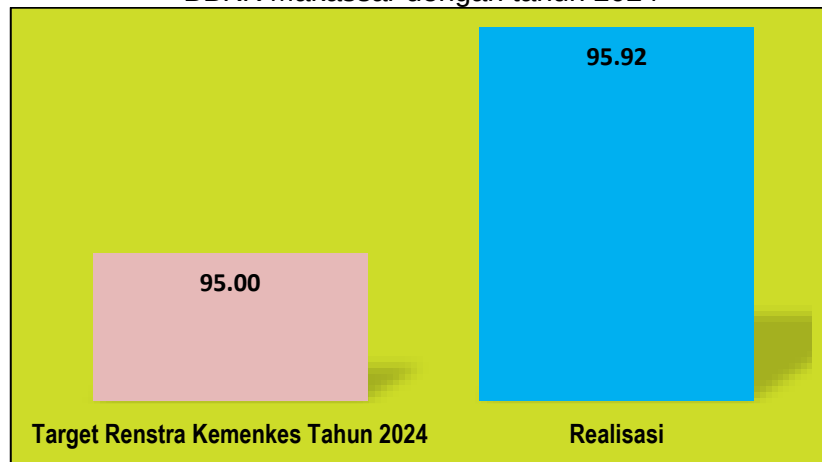
Grafik III.17 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-4
BBKK Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023
dengan tahun 2024



Dari grafik III.17 terlihat untuk realisasi Nilai Kinerja Anggaran untuk tahun 2020 sampai dengan 2024 berada di atas target yang telah ditentukan. Pada tahun 2024 menunjukkan nilai realisasi di atas target yang telah ditetapkan, karena berpengaruh dari parameter IKPA yang maksimal di tahun 2024.

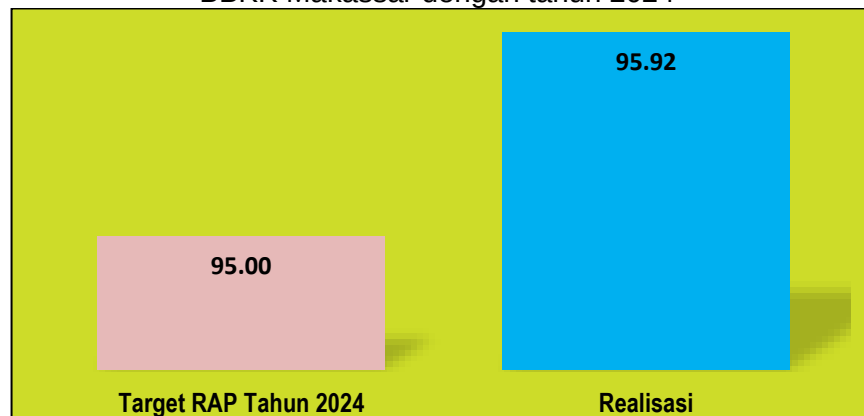
Sehingga realisasi NKA di tahun 2024 lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Grafik III.18 Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar dengan tahun 2024



Grafik III.18 menggambarkan realisasi lebih besar dari target Renstra. Karena tahun 2024, capaian realisasi output mencapai nilai maksimal dengan nilai 100 dengan bobot 75%.

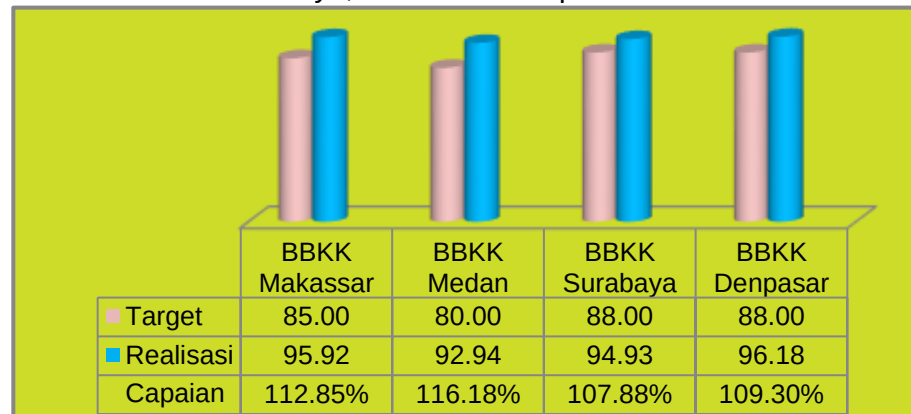
Grafik III.19 Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar dengan tahun 2024



Grafik III.19 menunjukkan realisasi indikator ke 4 BBKK Makassar lebih besar dibandingkan dengan target RAP tahun 2024, karena berpengaruh dengan nilai IKPA sebesar 99,98. Karena komponen

NKA mencakup penjumlahan nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran.

Grafik III.20 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-4
BBKK Makassar dengan BBKK Medan,
BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar Tahun 2024



Dari Grafik III.20 terlihat realisasi untuk ke empat BKK keseluruhan mencapai target. Realisasi terbesar pada BBKK Denpasar dengan nilai 96,18.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi (*monev*) realisasi anggaran serta capaian output kegiatan secara berkala.
Seluruh kegiatan yang ada dalam RKAKL dilakukan pembahasan capaian realisasinya serta kendala yang dihadapi serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan sebagai alternatif pemecahan masalah.
- 2) Melakukan revisi kegiatan dan anggaran dalam RKAKL.
Untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan yang tidak terencana sebelumnya, maka dilakukan revisi anggaran baik pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), revisi Kanwil DJPb maupun revisi DJA.
- 3) Melaksanakan *monev* per bulan terhadap RPK dan RPD.

f. Masalah yang dihadapi

Terdapat *self blocking* terhadap anggaran perjalanan dinas di akhir triwulan IV, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan diatur kembali sesuai dengan anggaran perjalanan dinas yang masih bisa digunakan.

g. Usul pemecahan masalah

Melakukan revisi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) mengikuti sisa anggaran perjalanan dinas yang tersedia. Karena untuk RPD sudah tidak dapat direvisi karena aplikasi SAKTI untuk RPD sudah dikunci sejak Oktober 2024.

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\%\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran kinerja
CKi : Capaian kinerja
RAKi : Realisasi anggaran kinerja
NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(361.285.000 \times 1,13) - 356.768.762}{361.285.000 \times 1,13} \times 100\%$$

$$E = 12,49\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{12,49}{20} \times 50\%\right)$$

$$NE = 81,24\%$$

Untuk indikator 4 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 361.285.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 356.768.762,- serta capaian indikator sebesar 112,85%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 12,49% dan nilai efisiensi sebesar 81,24%. Selain itu efisiensi penggunaan anggaran, efisiensi sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Pelaksanaan kegiatan monev realisasi anggaran dan monev capaian keluaran yang dilakukan secara berkala dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lainnya seperti rekonsiliasi data PNPB dan pertemuan koordinasi internal. Dengan metode pelaksanaan kegiatan monev seperti ini maka akan terjadi efisiensi sumber daya baik waktu, tenaga maupun biaya.
- 2) Aplikasi D'Tawang untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses pencairan pertanggungjawaban keuangan di BBKK Makassar.
- 3) Aplikasi Sitopeng yang dapat memonitoring pengadaan sehingga dapat menjadi warning/alarm apabila terdapat belanja kontraktual yang harus segera dilapor kontrak ke KPPN sehingga tidak terlambat untuk dilaporkan. Selain itu memudahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memonitor proses pengadaan hingga pencairan anggarannya.

5. INDIKATOR KELIMA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

a. Pengertian

Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor

195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja.

b. Definisi Operasional

Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/ satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

c. Rumus (cara perhitungan)

Nilai IKPA pada aplikasi OM-SPAN diperoleh dengan menjumlahkan 7 (tujuh) nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator lalu dikurangi Dispensasi SPM. Dalam hal terdapat satu atau lebih indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA Satker dihitung sebagaimana berikut :

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot *} - \text{Dispensasi SPM}$$

*) keterangan :

- 1) Konversi bobot bernilai 100 persen apabila Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai dan
- 2) Konversi bobot bernilai dibawah 100 persen apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

d. Capaian Kinerja

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran terdapat 8 (delapan) indikator dengan bobot terlihat dalam tabel III.24.

Tabel III.24 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Aspek	No	Indikator Kinerja	Bobot
Kualitas Perencanaan Anggaran	1	Revisi DIPA	10%
	2	Deviasi Halaman III DIPA	15%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3	Penyerapan Anggaran	20%
	4	Belanja Kontraktual	10%
	5	Penyelesaian Tagihan	10%
	6	Pengelolaan UP dan TUP	10%

Aspek	No	Indikator Kinerja	Bobot
	7	Dispensasi SPM	Menjadi Pengurang Nilai IKPA
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	8	Capaian Output	25%
Total			100%

Dari hasil perhitungan capaian kinerja indikator IKPA BBKK Makassar tahun 2024 sebesar 99,88 dengan kategori sangat baik, ditunjukkan dalam gambar III.4 dashboard OM-SPAN.

MONEXFA

YOUTUBE

KANTOR RESKORTEL
10 JULI 2024

INDUKTOR PELAKSANAAN ANGGARAN

10 JULI 2024

SAMPAI DENGAN 1 DESEMBER

10 JULI 2024

NO	KODI KPPN	KODI DA	KODI KABUPATEN	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN				KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	PERYOROT KODI	DIPERFORM DPA (PERKURAS)	NILAI AKHIR TOTAL SATKER KODI
						REVISI DIPA	REVISI KABUPATEN	REVISI KABUPATEN	REVISI KABUPATEN	REVISI KABUPATEN	REVISI KABUPATEN	REVISI KABUPATEN	REVISI KABUPATEN						
1	135	00A	00A	BALAI DESA KEMUNDOHAN KEMUNDOHAN KEMUNDOHAN	Nilai	100.00	100.00	99.88	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.88	100%	100%	99.88		
					Revisi	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
					Nilai IKPA	10.00	10.00	99.88	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						
					Nilai Akhir	100.00		99.88	100.00		100.00								

Gambar III.4
Dashboard Aplikasi OM-SPAN
hasil perhitungan capaian kinerja IKPA
BBKK Makassar Tahun 2024

Dari gambar III.2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Revisi DIPA

Indikator revisi DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan Satker dalam satu semester.

Indikator revisi DIPA ini merupakan salah satu indikator yang mengalami reformulasi dari Perdirjen 5 Tahun 2022 ke tahun 2024, dimana sebelumnya frekuensi yang dihitung adalah per triwulan menjadi semesteran.

Revisi yang termasuk dalam objek perhitungan adalah revisi yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di tingkat satker dan

termasuk dalam revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang disahkan oleh DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Kanwil DJPB Kementerian Keuangan antara lain :

- a. (201) Antar fungsi/sub fungsi dan/atau antar program
- b. (211) Pemenuhan belanja operasional
- c. (212) Penyelesaian pagu minus belanja pegawai operasional
- d. (213) Pergeseran anggaran dari belanja operasional ke belanja non-operasional
- e. (217) Penyelesaian tunggakan
- f. (220) Pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan/atau swakelola
- g. (221) Pergeseran anggaran antarjenis belanja
- h. (222) Kontrak tahun jamak
- i. (225) RO cadangan
- j. (226) Penurunan volume RO secara total
- k. (229) Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)
- l. (231) Penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran
- m. (236) Pergeseran anggaran antar KRO dan/atau antar kegiatan
- n. (239) Revisi dalam rangka pagu tetap lainnya

Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran dan tidak bersifat kumulatif. Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori frekuensi revisi DIPA sebagaimana berikut :

Jumlah Revisi DIPA	Nilai Kinerja Revisi Anggaran (NKRA)
0-1	110
2	100
≥ 3	50

Revisi DIPA yang dilakukan dalam rentang semester I dan semester II masing-masing diberikan bobot sebesar 50%.

Formula perhitungan nilai IKPA revisi DIPA = (50% x NKRA Semester I) + (50% x NKRA Semester II), dimana NKRA berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam satu semester.

Tahun 2024 BBKK Makassar telah melaksanakan revisi DIPA sebanyak 7 kali dengan pagu tetap.

Tabel III.25
Revisi DIPA BBKK Makassar Tahun 2024

No	Revisi DIPA	Tanggal Pengesahan DIPA	Perubahan Pagu	Kode Revisi	Jenis Revisi	Objek penilaian Revisi DIPA
1	Revisi DIPA 1	1 Februari 2024	Tidak	315	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA	Tidak
2	Revisi DIPA 2	19 April 2024	Tidak	224	Pergeseran Anggaran dalam 1 (satu) RO Prioritas Nasional	Tidak
				315	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA	Tidak
				325	Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	Tidak
3	Revisi DIPA 3	2 Juni 2024	Tidak	224	Pergeseran Anggaran dalam 1 (satu) RO Prioritas Nasional	Tidak
				315	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA	Tidak
4	Revisi DIPA 4	11 Juli 2024	Tidak	315	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA	Tidak
				325	Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	Tidak
5	Revisi DIPA 5	11 Oktober 2024	Tidak	236	Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan	Ya
				315	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA	Tidak
				325	Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	Tidak
6	Revisi DIPA 6	16 November 2024	Tidak	239	Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya	Tidak
				325	Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	Tidak
7	Revisi DIPA 7	10 Desember 2024	Tidak	325	Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	Tidak

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan aplikasi OM-SPAN, Nilai Parameter Revisi DIPA BBKK Makassar pada Tahun 2024 adalah 100. Berdasarkan tabel III.25 terlihat bahwa pada semester I dilakukan tiga kali revisi DIPA dengan pagu tetap, namun revisi yang dilakukan tidak termasuk dalam objek perhitungan untuk indikator revisi DIPA dalam penilaian IKPA. Pada Semester II dilakukan empat kali revisi DIPA dengan pagu tetap, terdapat satu kali revisi yang masuk dalam objek penilaian, namun untuk jumlah revisi DIPA 0 - 1 masih mendapat nilai 110, sehingga total nilai indikator Revisi DIPA mendapat 100.

2) Deviasi Halaman III DIPA

Indikator deviasi halaman III DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan deviasi Halaman III DIPA.

Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.

Nilai RPD yang diperhitungkan adalah RPD yang dikunci setiap awal triwulanan. Batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah sampai dengan sepuluh hari kerja pertama pada setiap triwulan. Khusus untuk triwulan I, batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA adalah sampai dengan sepuluh hari kerja pertama bulan Februari.

Penguncian data RPD pada Halaman III DIPA dan data proporsi pagu masing-masing jenis belanja dilakukan berdasarkan tanggal *posting* DIPA hasil revisi pada sistem. Nilai deviasi bulanan maksimum sebesar 100%. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum 100 adalah 5%. Nilai deviasi halaman III DIPA yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November.

Adapun nilai parameter Deviasi Halaman III DIPA BBKK Makassar tahun 2024 semester I dapat dilihat pada tabel III.26 berikut ini.

Tabel III.26
Parameter Deviasi Halaman III DIPA
BBKK Makassar Tahun 2024

No.	Kode Revisi	Nama Revisi	Tipe Revisi	Periode	Pemeriksaan				Penyempurnaan				Dikoreksi				% Deviasi				% Penyempurnaan				% Deviasi Tertimbang				% Deviasi Rata-rata Kumulatif	Nilai Akhir
					01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04		
1	400000	BKPA (BBKK) Makassar Tahun 2024 Semester I	100	01	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	400000	BKPA (BBKK) Makassar Tahun 2024 Semester I	100	02	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	400000	BKPA (BBKK) Makassar Tahun 2024 Semester I	100	03	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	400000	BKPA (BBKK) Makassar Tahun 2024 Semester I	100	04	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	400000	BKPA (BBKK) Makassar Tahun 2024 Semester I	100	05	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	400000	BKPA (BBKK) Makassar Tahun 2024 Semester I	100	06	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	400000	BKPA (BBKK) Makassar Tahun 2024 Semester I	100	07	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	400000	BKPA (BBKK) Makassar Tahun 2024 Semester I	100	08	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	400000	BKPA (BBKK) Makassar Tahun 2024 Semester I	100	09	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	400000	BKPA (BBKK) Makassar Tahun 2024 Semester I	100	10	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	400000	BKPA (BBKK) Makassar Tahun 2024 Semester I	100	11	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	400000	BKPA (BBKK) Makassar Tahun 2024 Semester I	100	12	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : OM-SPAN 2024

Nilai deviasi Halaman III DIPA BBKK Makassar tahun 2024 berdasarkan Aplikasi OM-SPAN adalah 100. Indikator deviasi Halaman III DIPA mengalami reformulasi dari Perdirjen 5 tahun 2022 ke tahun 2024, yakni deviasi bulanan semula dihitung hanya berdasarkan rata-rata per jenis belanja menjadi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja. Selain itu, bobot penilaian IKPA untuk deviasi halaman III DIPA dari 10% menjadi 15%.

Nilai akhir % rata-rata deviasi kumulatif BBKK Makassar tahun 2024 yakni 2,19% (dibawah 5%) sehingga nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA 100.

3) Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran

berdasarkan keseuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan.

Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.

Target penyerapan anggaran triwulanan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja yakni :

a. Belanja Pegawai (51)

Triwulan I 20%, Triwulan II 50%, Triwulan III 75%, dan Triwulan IV 95%.

b. Belanja Barang (52)

Triwulan I 15%, Triwulan II 50%, Triwulan III 70%, dan Triwulan IV 90%.

c. Belanja Modal (53)

Triwulan I 10%, Triwulan II 40%, Triwulan III 70%, dan Triwulan IV 90%.

Nilai Parameter Penyerapan Anggaran BBKK Makassar Tahun 2024 pada Aplikasi OM-SPAN adalah 99,38, sebagaimana yang terlihat pada tabel III.27 berikut ini :

Tabel III.27 Parameter Penyerapan Anggaran
BBKK Makassar Tahun 2024

Periode	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja			NKPA Tertimbang Seluruh J.Bel	Nilai IKPA
		051	052	053		
'01	Pagu Jenis Belanja	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	14.00	100.00
	Proporsi Pagu Netto	65.89%	33.10%	1.00%		
	Nominal Target	3,001,501,950	1,507,850,550	30,515,000		
	Target	15%	15%	10%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	578,404,144	59,298,382	-		
	% Realisasi	19.27%	3.93%	0.00%		
	NKPA Tertimbang	12.70	1.30	-		
'02	Pagu Jenis Belanja	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	68.40	100.00
	Proporsi Pagu Netto	65.89%	33.10%	1.00%		
	Nominal Target	3,001,501,950	1,507,850,550	30,515,000		

Periode	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja			NKPA Tertimbang Seluruh J.Bel	Nilai IKPA
		051	052	053		
	Target	15%	15%	10%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	1,955,337,668	1,128,568,932	21,004,000		
	% Realisasi	65.15%	74.85%	68.83%		
	NKPA Tertimbang	42.93	24.78	0.69		
'03	Pagu Jenis Belanja	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	100.00	100.00
	Blokir	-	-	-		
	Pagu Netto	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000		
	Proporsi Pagu Netto	65.89%	33.10%	1.00%		
	Nominal Target	3,001,501,950	1,507,850,550	30,515,000		
	Target	15%	15%	10%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	4,758,176,970	1,811,957,539	185,147,585		
	% Realisasi	100.00%	100.00%	100.00%		
	NKPA Tertimbang	65.89	33.10	1.00		
'04	Pagu Jenis Belanja	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	69.03	84.52
	Proporsi Pagu Netto	65.89%	33.10%	1.00%		
	Nominal Target	8,004,005,200	5,026,168,500	122,060,000		
	Target	40%	50%	40%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	6,155,509,026	2,633,985,663	187,405,585		
	% Realisasi	76.91%	52.41%	100.00%		
	NKPA Tertimbang	50.68	17.35	1.00		
'05	Pagu Jenis Belanja	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	88.49	94.25
	Proporsi Pagu Netto	65.89%	33.10%	1.00%		
	Nominal Target	8,004,005,200	5,026,168,500	122,060,000		
	Target	40%	50%	40%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	8,238,783,492	3,279,691,839	289,415,315		
	% Realisasi	100.00%	65.25%	100.00%		
	NKPA Tertimbang	65.89	21.60	1.00		
'06	Pagu Jenis Belanja	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	97.52	98.77
	Proporsi Pagu Netto	65.89%	33.10%	1.00%		
	Nominal Target	8,004,005,200	5,026,168,500	122,060,000		
	Target	40%	50%	40%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	10,371,435,085	4,650,606,349	294,380,315		
	% Realisasi	100.00%	92.53%	100.00%		
	NKPA Tertimbang	65.89	30.63	1.00		
'07	Pagu Jenis Belanja	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	88.45	95.33
	Proporsi Pagu Netto	65.89%	33.10%	1.00%		
	Nominal Target	13,006,508,450	7,036,635,900	213,605,000		
	Target	65%	70%	70%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	11,792,254,025	5,889,191,345	294,380,315		
	% Realisasi	90.66%	83.69%	100.00%		
	NKPA Tertimbang	59.74	27.70	1.00		
'08	Pagu Jenis Belanja	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	99.83	99.12
	Proporsi Pagu Netto	65.89%	33.10%	1.00%		
	Nominal Target	13,006,508,450	7,036,635,900	213,605,000		
	Target	65%	70%	70%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	13,237,817,527	7,000,255,936	298,880,845		
	% Realisasi	100.00%	99.48%	100.00%		
	NKPA Tertimbang	65.89	32.93	1.00		
'09	Pagu Jenis Belanja	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	100.00	99.18
	Proporsi Pagu Netto	65.89%	33.10%	1.00%		

Periode	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja			NKPA Tertimbang Seluruh J.Bel	Nilai IKPA
		051	052	053		
	Nominal Target	13,006,508,450	7,036,635,900	213,605,000		
	Target	65%	70%	70%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	14,699,200,369	7,636,214,668	298,880,845		
	% Realisasi	100.00%	100.00%	100.00%		
	NKPA Tertimbang	65.89	33.10	1.00		
10	Pagu Jenis Belanja	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	87.59	96.28
	Blokir	-	51,556,000	-		
	Pagu Netto	20,010,013,000	10,000,781,000	305,150,000		
	Proporsi Pagu Netto	66.00%	32.99%	1.01%		
	Nominal Target	19,009,512,350	9,000,702,900	274,635,000		
	Target	95%	90%	90%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	16,158,050,580	8,316,825,787	298,880,845		
	% Realisasi	85.00%	92.40%	100.00%		
	NKPA Tertimbang	56.10	30.48	1.01		
11	Pagu Jenis Belanja	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	94.83	98.09
	Blokir	-	51,556,000	-		
	Pagu Netto	20,010,013,000	10,000,781,000	305,150,000		
	Proporsi Pagu Netto	66.00%	32.99%	1.01%		
	Nominal Target	19,009,512,350	9,000,702,900	274,635,000		
	Target	95%	90%	90%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	17,633,916,049	8,894,793,104	298,880,845		
	% Realisasi	92.76%	98.82%	100.00%		
	NKPA Tertimbang	61.23	32.60	1.01		
12	Pagu Jenis Belanja	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	100.00	99.38
	Blokir	-	51,556,000	-		
	Pagu Netto	20,010,013,000	10,000,781,000	305,150,000		
	Proporsi Pagu Netto	66.00%	32.99%	1.01%		
	Nominal Target	19,009,512,350	9,000,702,900	274,635,000		
	Target	95%	90%	90%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	19,999,914,167	9,923,294,352	298,880,845		
	% Realisasi	100.00%	100.00%	100.00%		
	NKPA Tertimbang	66.00	32.99	1.01		

Sumber : OM-SPAN 2024

Berdasarkan tabel III.27 pada triwulan II target belanja 52 sebesar Rp.5.026.168.500,- (50% dari total pagu belanja 52) dengan realisasi Rp4.650.606.349,- atau 92,53% dari target sehingga indikator penyerapan anggaran tidak maksimal. Pada triwulan I, III dan IV semua jenis belanja mencapai target, namun karena pada triwulan II tidak mencapai target sehingga nilai IKPA penyerapan anggaran mendapat 99,38. Dikalikan dengan bobot 20 untuk indikator penyerapan anggaran sehingga nilai IKPA penyerapan anggaran tahun 2024 sebesar 19,88.

4) Belanja Kontraktual

Belanja Kontraktual merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual pada Satker. Belanja kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara nilai kinerja :

a. Komponen akselerasi kontrak dini (bobot 40%)

Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan I dan didaftarkan ke KPPN. Data kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan I adalah kontrak belanja barang/modal dengan nilai di atas Rp50 juta. Poin yang diberikan untuk kontrak yang tanggal penandatanganan kontraknya dilakukan pada rentang setelah DIPA tahun anggaran berkenaan disahkan sampai dengan sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan (kontrak dini) adalah sebesar 120. Poin yang diberikan untuk data kontrak yang tanggal penandatanganan kontraknya antara 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun anggaran berkenaan (Kontrak Dini) adalah sebesar 110.

b. Komponen akselerasi belanja modal (bobot 40%)

Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian kontrak belanja modal terhadap seluruh data kontrak belanja modal yang didaftarkan ke KPPN. Penyelesaian kontrak belanja modal yang dimaksud adalah penyelesaian pembayaran atas belanja modal yang dibayarkan sekaligus dengan nilai Rp50 juta ke atas sampai dengan Rp200 juta. Penyelesaian pembayaran yang dimaksud mengacu pada tanggal SP2D. poin yang diberikan untuk setiap penyelesaian kontrak belanja modal yakni :

- 1) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan I tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 100;

- 2) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan II tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 90;
- 3) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan sampai dengan triwulan III tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 80; dan
- 4) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan sampai dengan triwulan IV tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 70.

c. Komponen distribusi akselerasi kontrak (bobot 20%)

Dihitung berdasarkan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan II dan didaftarkan ke KPPN dibagi dengan jumlah data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN selama tahun anggaran berkenaan. Poin yang diberikan untuk setiap data perjanjian/kontrak diberikan secara bertingkat sesuai dengan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan II yakni :

- 1) Rasio $>75\%$ (nilai 100)
- 2) $50,01\% < \text{Rasio} \leq 75\%$ (nilai 80)
- 3) $25,01\% < \text{Rasio} \leq 50\%$ (nilai 60)
- 4) $0,01\% < \text{Rasio} \leq 25\%$ (nilai 50)
- 5) Rasio = 0% (nilai 0)

Nilai Belanja Kontraktual BBKK Makassar tahun 2024 berdasarkan aplikasi OM SPAN sebesar 100.

Tabel III.28 Parameter Belanja Kontraktual
BBKK Makassar Tahun 2024

No.	Kode Satker	Nama Satker	Kode KPPN	Periode	Komponen Distribusi Anggaran Kontrak			Komponen Akutansi Kontrak (S)			Komponen Akutansi Belanja B			Nilai
					Jumlah Kontrak	Jumlah Kontrak DMT 1	Nilai Komponen	Jumlah Kontrak TW 1	Jumlah Kontrak Akutansi	Nilai Komponen	Jumlah Kontrak Belanja B	Jumlah Kontrak Akutansi	Nilai Komponen	
1	410145	BALAI BESAR KEKAWAHTAAN KESEHATAN MAKASSAR	130	01	7	25	100.00	3	4	115.71	0	0	0.00	100.00
2	410145	BALAI BESAR KEKAWAHTAAN KESEHATAN MAKASSAR	130	02	7	25	100.00	3	4	115.71	0	0	0.00	100.00
3	410145	BALAI BESAR KEKAWAHTAAN KESEHATAN MAKASSAR	130	03	11	25	100.00	7	4	113.84	1	1	100.00	100.00
4	410145	BALAI BESAR KEKAWAHTAAN KESEHATAN MAKASSAR	130	04	11	25	100.00	7	4	113.84	1	1	100.00	100.00
5	410145	BALAI BESAR KEKAWAHTAAN KESEHATAN MAKASSAR	130	05	16	25	100.00	7	4	113.84	1	1	100.00	100.00
6	410145	BALAI BESAR KEKAWAHTAAN KESEHATAN MAKASSAR	130	06	17	25	100.00	7	4	113.84	1	1	100.00	100.00
7	410145	BALAI BESAR KEKAWAHTAAN KESEHATAN MAKASSAR	130	07	18	25	100.00	7	4	113.84	1	1	100.00	100.00
8	410145	BALAI BESAR KEKAWAHTAAN KESEHATAN MAKASSAR	130	08	18	25	100.00	7	4	113.84	1	1	100.00	100.00
9	410145	BALAI BESAR KEKAWAHTAAN KESEHATAN MAKASSAR	130	08	18	25	100.00	7	4	113.84	1	1	100.00	100.00
10	410145	BALAI BESAR KEKAWAHTAAN KESEHATAN MAKASSAR	130	10	20	25	100.00	7	4	113.84	1	1	100.00	100.00
11	410145	BALAI BESAR KEKAWAHTAAN KESEHATAN MAKASSAR	130	11	20	25	100.00	7	4	113.84	1	1	100.00	100.00
12	410145	BALAI BESAR KEKAWAHTAAN KESEHATAN MAKASSAR	130	12	20	25	100.00	7	4	113.84	1	1	100.00	100.00

Sumber : OM-SPAN 2024

5) Penyelesaian Tagihan

Penyelesaian Tagihan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktual pada Satker. Indikator kinerja penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Penyampaian SPM LS kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi. Nilai Penyelesaian tagihan tahun 2024 pada aplikasi OM SPAN 100, artinya seluruh SPM LS kontraktual disampaikan dengan tepat waktu ke KPPN. Tahun 2024 BBKK Makassar meraih penghargaan Peringkat I Akurasi SPM terbaik Tahun 2024 semester I dari KPPN Makassar II.

6) Pengelolaan UP/TUP

Pengelolaan UP dan TUP merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu Pertanggungjawaban UP (GUP) dan Pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola dan penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai dari komponen :

a. Pengelolaan UP dan TUP Tunai (bobot 90%)

Dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang dananya bersumber dari selain PNBK. Pengelolaan UP dan TUP Tunai dihitung berdasarkan nilai komposit dari sub komponen Nilai Kinerja :

(1) Ketepatan waktu (bobot 50%)

(2) Persentase GUP diseulankan (25%)

(3) Setoran TUP (25%)

b. Pengelolaan UP KKP (bobot 10%)

Dihitung untuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang dananya bersumber dari Rupiah Murni.

Nilai Pengelolaan UP/TUP BBKK Makassar pada tahun 2024 berdasarkan Aplikasi OM-SPAN mendapat nilai 100.

7) Dispensasi SPM

Dispensasi SPM merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM di akhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Indikator dispensasi SPM ini mengalami reformulasi untuk penilaian IKPA tahun 2024, dimana sebelumnya menjadi salah satu indikator yang memiliki bobot 5%, sekarang dihitung diluar komponen nilai IKPA yaitu sebagai pengurang nilai IKPA.

Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM

melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN di Triwulan IV.

Pengurangan nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio dispensasi SPM sebagai berikut :

- a. Kategori 1 : 0,00 (tidak ada dispensasi SPM) pengurangan nilai 0
- b. Kategori 2 : 0,01 - 0,099 pengurangan 0,25
- c. Kategori 3 : 0,1 – 0,99 pengurangan 0,50
- d. Kategori 4 : 1 – 4,99 pengurangan 0,75
- e. Kategori 5 : $\geq 5,00$ pengurangan 1,00

Tahun 2024 semester 1 belum ada pengurangan nilai karena yang dinilai adalah ada dispensasi SPM di triwulan IV.

8) Capaian Output

Capaian *Output* merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian *output* pada Satker. Capaian Output dihitung berdasarkan Nilai Kinerja :

a. Komponen Ketepatan Waktu (30%)

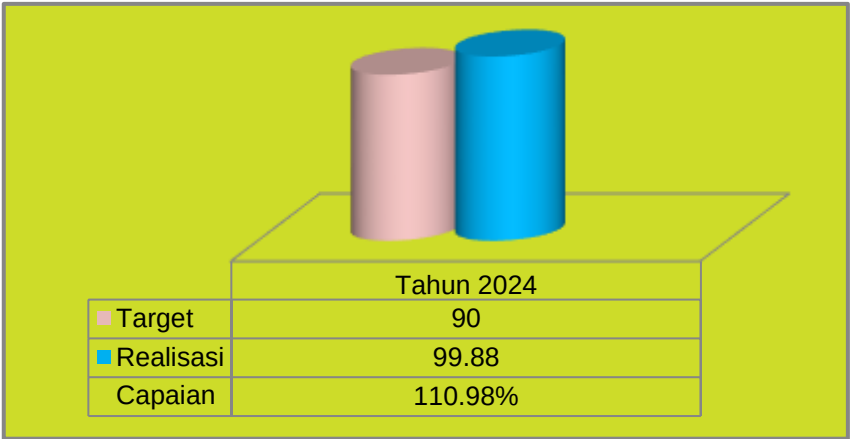
Dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya. Poin yang diberikan untuk setiap RO yang dilaporkan tepat waktu ada sebesar 100 dan yang terlambat adalah sebesar 0.

b. Komponen Capaian RO (70%)

Dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Ketentuan target capaian RO adalah periode Januari – November berdasarkan target progress capaian RO (TPCRO), periode Desember berdasarkan target volume RO dalam DIPA dan apabila pada periode Januari – November PCRO yang dilaporkan bernilai 100, maka target yang digunakan adalah target RO dalam DIPA. RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO dengan status terkonfirmasi.

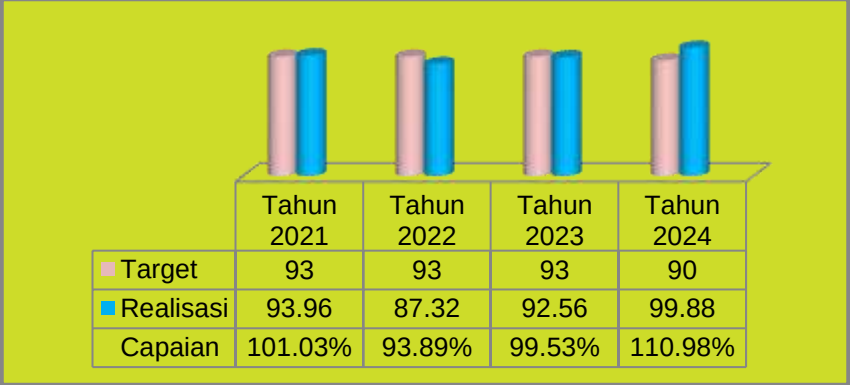
Nilai Capaian output pada tahun 2024 berdasarkan aplikasi OM SPAN adalah sebesar 100.

Grafik III.21 Perbandingan target dan realisasi Indikator Ke-5 BBKK Makassar tahun 2024



Dari grafik III.22 terlihat indikator IKPA dengan realisasi sebesar 99,88 lebih tinggi dibanding dengan target sebesar 90. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu maksimalnya nilai untuk parameter IKPA yaitu : Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Capaian Output. Terdapat 1 parameter yang tidak bernilai maksimal yaitu penyerapan anggaran yang bernilai 99,38 karena jenis terdapat Belanja 52 pada Triwulan II yang tidak mencapai target pembobotan. Perbandingan realisasi indikator ke-5 BBKK Makassar tahun 2021 sd 2024 dapat dilihat dalam grafik III.22

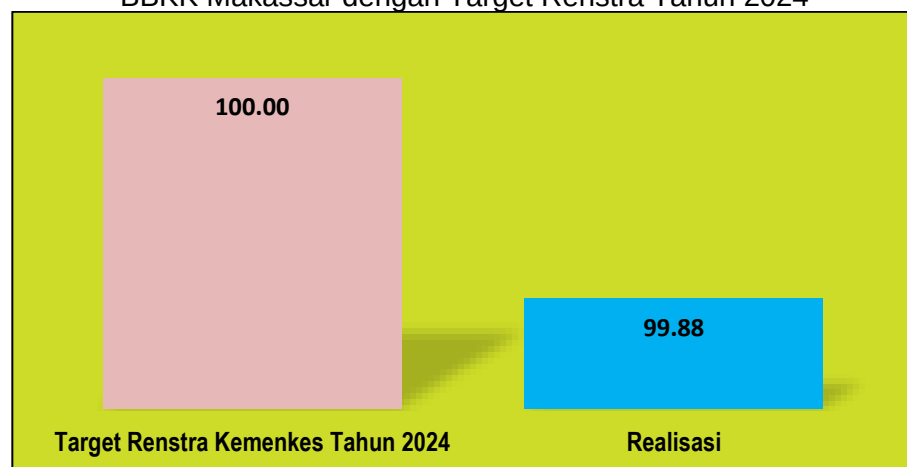
Grafik III.22 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-5 BBKK Makassar tahun 2021, 2022, 2023 dengan tahun 2024



Grafik III.22 terlihat bahwa tahun 2021 realisasi indikator tercapai melebihi target yang telah ditetapkan, namun untuk tahun 2022 dan 2023 realisasi indikator ke-5 tidak mencapai target yang ditentukan. Tahun 2021 terdapat 13 parameter penilaian IKPA, sedangkan tahun 2022 dan 2023 terdapat 8 parameter perhitungan yang sama dalam penentuan nilai IKPA yaitu revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan , Pengelolaan UP/TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output.

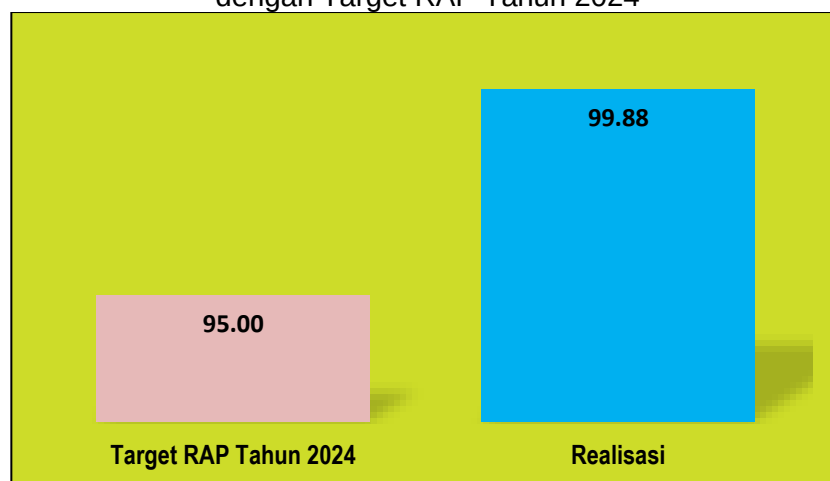
Tahun 2023 realisasi tidak tercapai karena terdapat 4 parameter yang tidak terealisasi secara maksimal yaitu Deviasi halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, dan Pengelolaan UP/TUP, sehingga realisasi hanya bernilai 92,56 mengakibatkan capaian menjadi 99,53%. Melihat realisasi yang tidak tercapai selama tahun 2022 dan 2023, sehingga pada tahun 2024 target diturunkan menjadi 90. Untuk tahun 2024 terdapat 7 parameter penilaian dan 1 parameter pengurang untuk penilaian IKPA, dari ketujuh parameter tersebut, 6 bernilai maksimal dan 1 dengan nilai 99,38, sehingga secara keseluruhan untuk tahun 2024 IKPA mencapai nilai 99,88 lebih besar dibanding realisasi tahun 2021 sd 2023.

Grafik III.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Ke-5 BBKK Makassar dengan Target Renstra Tahun 2024



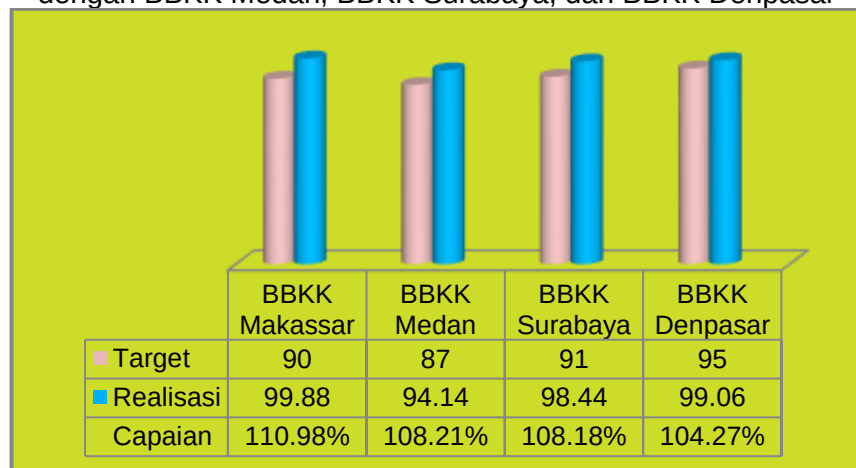
Grafik III.23 menggambarkan realisasi yang hamper mencapai target Renstra untuk IKPA tahun 2024. Terdapat 8 parameter penilaian dalam penentuan nilai IKPA. Untuk BBKK Makassar di tahun 2024 terdapat 6 parameter penilaian yang bernilai maksimal, namun realisasi belum target Renstra yang telah ditetapkan, karena untuk parameter penyerapan anggaran belum bernilai maksimal.

Grafik III.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Ke-5 Tahun 2024 BBKK Makassar dengan Target RAP Tahun 2024



Grafik III.24 menunjukkan realisasi indikator kinerja 5 BBKK Makassar lebih besar dibanding dengan target RAP tahun 2024. Realisasi tahun 2024 tercapai melampaui target RAP karena terdapat 6 parameter yang tercapai yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Capaian Output. Terdapat 1 parameter yang tidak bernilai 100 yaitu penyerapan anggaran. Namun secara keseluruhan, realisasi IKPA melebihi target RAP.

Grafik III.25 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-5
Tahun 2024 BBKK Makassar
dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar



Grafik III.25 menggambarkan seluruh BBKK melebihi target yang telah ditetapkan. Karena adanya strategi dan kolaborasi yang mendukung terealisasinya parameter IKPA sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan.

e. Analisa Keberhasilan Kegiatan

- 1) Dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara berkala;
- 2) Memonitoring masing-masing kegiatan yang mendukung nilai parameter pendukung IKPA sesuai dengan regulasi yang ditetapkan;
- 2) Maksimalisasi pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target kinerja.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Untuk penyerpan anggaran belanja 52 yang tidak tercapai maksimal, karena adanya kegiatan pelaksanaan embarkasi haji dengan anggaran yang cukup besar yang dijadwalkan cair di triwulan II, namun cair di triwulan III, sehingga untuk belanja 52 tidak mencapai bobot target yang telah ditetapkan sesuai dengan Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah sesuai bobot target pencapaian nilai IKPA masing-masing parameter.

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(26.050.200.000 \times 1,11) - 25.980.461.371}{26.050.200.000 \times 1,11} \times 100\%$$

$$E = 10,13\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{10,13}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 75,34\%$$

Untuk indikator 5 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.050.200.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.

25.980.461.371,- serta capaian indikator sebesar 110,98%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10,13%. Dari efisiensi sebesar 10,13% sehingga diperoleh nilai efisiensi 75,34%. Selain itu efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Koordinasi dan komunikasi yang intens antar timker dan subbag adum untuk memastikan progres pelaksanaan setiap kegiatan baik volume maupun progres keuangan sehingga dapat mengefisienkan sumber daya yang ada.
- 2) Penunjukan petugas khusus untuk konsultasi permasalahan di KPPN per satuan kerja sangat memudahkan untuk melakukan konsultasi kapan dan dimana saja melalui media komunikasi tercepat seperti WA dan telepon.
- 3) Aplikasi D'Tawang untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses pencairan pertanggungjawaban keuangan di BBKK Makassar.
- 4) Aplikasi Sitopeng memuat data dan informasi terkait proses pengadaan barang/jasa baik secara kontraktual maupun non kontraktual dengan pihak ketiga. Berisi spreadsheet monitoring dan penyimpanan file google drive data arsip pengadaan. Dengan adanya monitoring pengadaan sehingga dapat menjadi warning/alarm apabila terdapat belanja kontraktual yang harus segera dilapor kontrak ke KPPN sehingga tidak terlambat untuk dilaporkan. Selain itu memudahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memonitor proses pengadaan hingga pencairan anggarannya.

5. INDIKATOR KEENAM

Kinerja Implementasi WBK Satker

Target nilai WBK untuk BBKK Makassar tahun 2024 sebesar 81.

a. Pengertian

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

b. Definisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Kesehatan dengan menggunakan lembar kerja evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku.

c. Rumus (cara perhitungan)

Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil dengan kriteria sebagai berikut :

KOMPONEN	BOBOT
1. Pengungkit	60,00
a) Pemenuhan	30,00
- Pokja I: Manajemen Perubahan	4,00
- Pokja II: Penataan Tatalaksana	3,50
- Pokja III: Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00
- Pokja IV: Penguatan Akuntabilitas	5,00
- Pokja V: Penguatan Pengawasan	7,50
- Pokja VI: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00
b) Reform	30,00
- Pokja I: Manajemen Perubahan	4,00
- Pokja II: Penataan Tatalaksana	3,50
- Pokja III: Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00

- Pokja IV: Penguatan Akuntabilitas	5,00
- Pokja V: Penguatan Pengawasan	7,50
- Pokja VI: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00
2. Hasil	40,00
a) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,50
- Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17,50
- Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00
b) Pelayanan Publik yang Prima	17,50
Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17,50

Adapun pengukuran capaian indikator Kinerja Implementasi WBK Satker ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi Nilai WBK}}{\text{Target Nilai WBK}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

Nilai Kinerja Implementasi WBK BBKK Makassar Tahun 2024 diambil berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Hasil Assesment Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Kesehatan RI pada Tanggal 22-25 Juli 2024 dengan Nilai 86,94. Hasil ini memenuhi syarat sehingga diusulkan sebagai satker menuju WBK Nasional ke Kementerian PAN RB. Sebelumnya, telah dilakukan pendampingan dan assesment dari Itjen Kemenkes RI dan Unit Utama Ditjen P2P. Selanjutnya dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemenpan RB yaitu pada tanggal 07 Oktober 2024 untuk sesi wawancara yang dilakukan secara virtual dan pada tanggal 07 November 2024 dilaksanakan verifikasi faktual dan peninjauan lapangan. Hasilnya BBKK Makassar mendapatkan predikat sebagai satker menuju WBK tingkat nasional. Piagam

penghargaan diserahkan oleh Menpan RB kepada Kepala BBKK Makassar pada tanggal 10 Desember 2024 di Jakarta pada acara “satu dekade zona integritas dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2024”.

Adapun nilai implementasi WBK BBKK Makassar Tahun 2024 dapat dijelaskan sesuai dengan nilai pemenuhan dan reform pada tabel III.29 berikut ini :

Tabel III.29 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Implementasi WBK BBKK Makassar Semeseter I Tahun 2024

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%
A. PENGUNGKIT		60.00				
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	3.88	4.00	7.88	98.45%
2.	PENATAAN TATALAKSANA	7.00	3.00	3.33	6.33	90.48%
3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	4.52	4.25	8.77	87.73%
4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	5.00	4.75	9.75	97.50%
5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	5.93	6.88	12.80	85.36%
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	4.74	3.22	7.95	79.54%
TOTAL PENGUNGKIT					53.49	89.15%
B. HASIL		40.00				
I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22.50			17.24	76.63%
a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) :	17.50			15.99	91.38%
b.	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja	5.00			1.25	25.00%
II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17.50			16.21	92.63%
-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) :	17.50			16.21	92.63%
TOTAL HASIL					33.45	83.63%
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS					86.94	

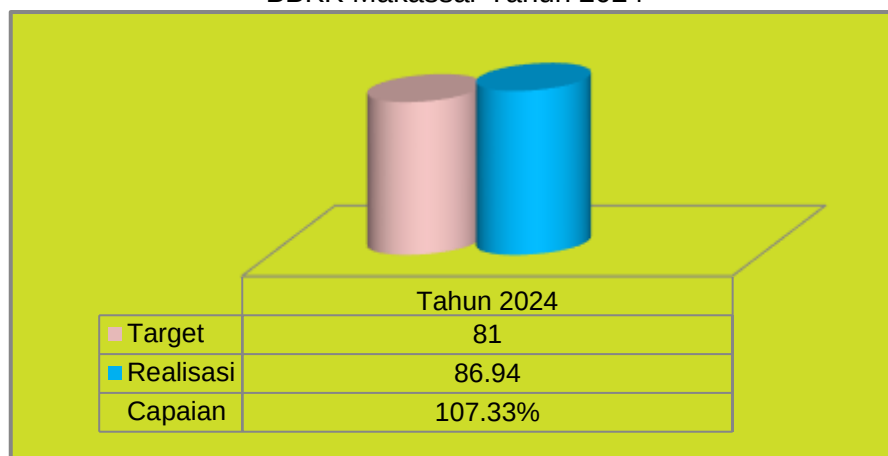
Dari tabel III.29 dapat diperoleh realisasi nilai implementasi WBK BBKK Makassar Tahun 2024 adalah sebesar 86,94, dengan persentase capaian indikator pada rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi Nilai WBK}}{\text{Target Nilai WBK}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{86,9}{81} \times 100\%$$

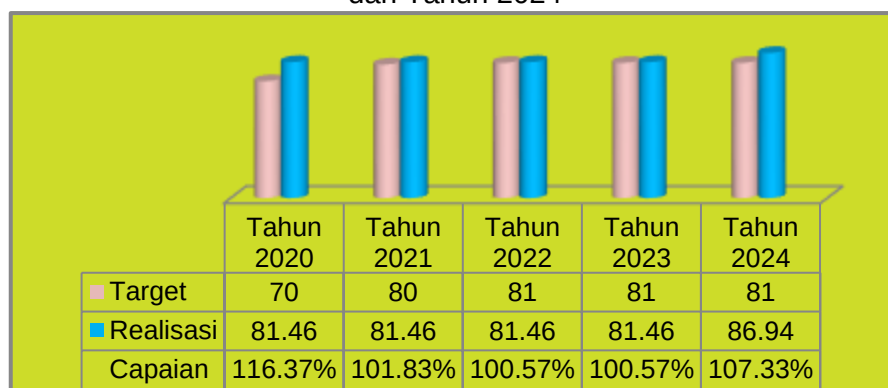
$$\text{Persentase Capaian} = 107,33\%$$

Grafik III.26 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-6
BBKK Makassar Tahun 2024



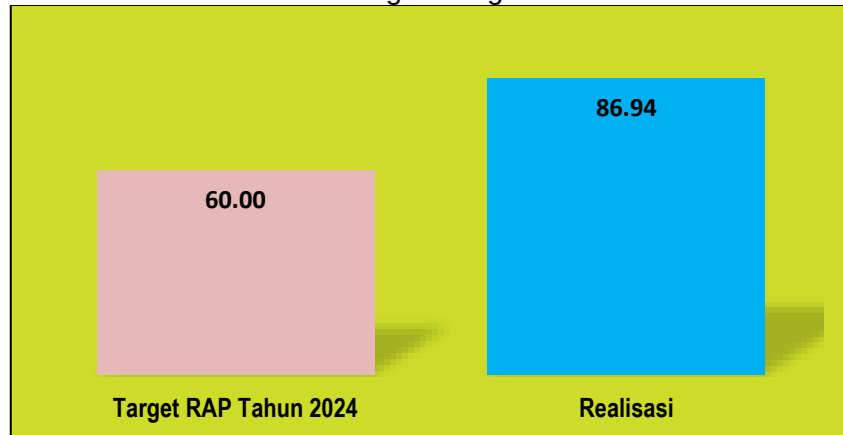
Grafik III.26 terlihat indikator ini terealisasi dengan realisasi nilai implementasi WBK BBKK Makassar Tahun 2024 adalah sebesar 86,94 lebih tinggi dibanding dengan target sebesar 81. Nilai Kinerja Implementasi WBK BBKK Makassar Tahun 2024 diperoleh dari hasil assessment Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Kesehatan RI pada Tanggal 22-25 Juli 2024 sebagai proses pendampingan BBKK Makassar yang diusulkan sebagai satker berpredikat WBK Nasional dan pada tanggal 6 sd 7 November 2024 BBKK Makassar mendapatkan kunjungan dari Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB.

Grafik III.27 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6
BBKK Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023
dan Tahun 2024



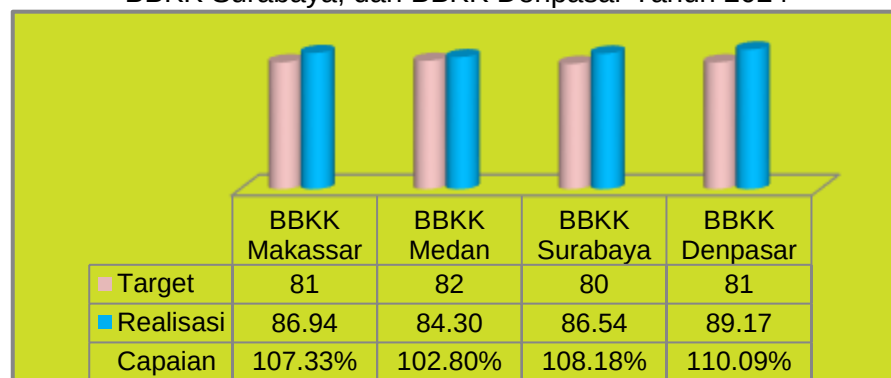
Grafik III.27 menggambarkan bahwa untuk tahun 2020-2024 realisasi indikator berada di atas target yang telah ditentukan. Untuk tahun 2020 implementasi WBK dijadikan sebagai salah satu indikator capaian kinerja, BBKK Makassar melalui berbagai tahap mulai dari pendampingan, pengawasan, *self assesment*, *pre assessment* sampai ke tahap Penilaian oleh Tim Penilai Internal Kemenkes RI berhasil meraih predikat menuju WBK satker dengan nilai 81,46 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/6590/2020. Dari nilai tersebut melampaui target indikator yang ditetapkan. Nilai ini masih dijadikan sebagai dasar penilaian indikator keenam pada tahun 2022. Namun pada tahun 2022 target ditingkatkan sebesar 81, merujuk dari realisasi pada tahun 2021, begitu pula dengan target pada tahun 2023 yang masih sebesar 81 dengan realisasi sebesar 81,46 berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Hasil Desk Tim Eselon I Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI Pada Tanggal 29 November 2023. Untuk tahun 2024 berlanjut dengan diusulkannya BBKK Makassar menjadi satker berpredikat WBK Nasional. Untuk hal tersebut dibutuhkan pendampingan dari Tim Itjen dan P2P Kemenkes. Pada tanggal 13 Juni 2024 dilaksanakan assessment oleh Tim Itjen Kemenkes sehingga memperoleh nilai sebesar 82,19. Dan pada tanggal 22-25 Juli 2024 diadakan assessment penilaian oleh TPI Kemenkes RI sehingga diperoleh nilai 86,94. Dari nilai tersebut merupakan proses BBKK Makassar menuju WBK berpredikat nasional di tahun 2024, selanjutnya dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemenpan RB yaitu pada tanggal 07 Oktober 2024 untuk sesi wawancara yang dilakukan secara virtual dan pada tanggal 07 November 2024 dilaksanakan verifikasi faktual dan peninjauan lapangan. Pada tanggal 10 Desember 2024 di Jakarta pada acara “satu dekade zona integritas dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2024” BBKK Makassar memperoleh penghargaan satuan kerja berpredikat WBK Nasional dan WBK Kawasan khusus Kawasan Pelabuhan.

Grafik III.28 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6
BBKK Makassar dengan Target RAP tahun 2024



Grafik III.28 menunjukkan realisasi indikator kinerja 6 BBKK Makassar lebih besar dibanding dengan target RAP tahun 2024. Realisasi ini diperoleh dari Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Hasil Assesment Tim Penilai Internal (TPI) Kemenkes pada tanggal 22-25 Juli 2024. Tahun 2024 BBKK Makassar diusulkan sebagai satker berpredikat WBK Nasional, dan hasil penilaian dari Kementerian PAN & RB, BBKK Makassar mendapatkan satker berpredikat menuju WBK. Dampaknya, Pelabuhan Makassar juga diganjar dengan penghargaan sebagai Pembangunan Zona Kawasan/WBK Kawasan. Tahun ini hanya Pelabuhan Makassar yang mendapatkan predikat tersebut.

Grafik III.29 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6
BBKK Makassar dengan BBKK Medan,
BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar Tahun 2024



Dari grafik III.29 terlihat dari keempat BBKK realisasi terbesar berada di BBKK Denpasar, selanjutnya BBKK Makassar diurutan kedua. BBKK Makassar, BBKK Denpasar dan BBKK Surabaya diusulkan menjadi satker berpredikat WBK Nasional. Untuk BBKK Makassar hasil pendampingan TPI pada tanggal 22-25 Juli 2024 memperoleh nilai 86,94, dan sebagai proses menuju pendampingan selanjutnya oleh TPN. Dan pada tanggal 10 Desember 2024 di Jakarta pada acara “satu dekade zona integritas dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2024” BBKK Makassar memperoleh penghargaan satuan kerja berpredikat WBK Nasional dan WBK Kawasan khusus Kawasan Pelabuhan. Untuk BBKK Denpasar dan BBKK Surabaya juga berhasil meraih predikat WBK Nasional.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Kontribusi masing-masing kelompok kerja yang telah ditetapkan di dalam SK Kepala BBKK Makassar tentang Pembangunan Zona Integritas
- 2) Keikutsertaan seluruh pegawai, baik itu ASN maupun PPNPN dalam mewujudkan pembangunan zona integritas
- 3) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala sehingga pembangunan zona integritas dapat berjalan secara berkesinambungan
- 4) Pendampingan dari Tim P2P dan Tim Itjen Kemenkes untuk pembangunan zona integritas
- 5) Dukungan lintas sektor yang sangat antusias dalam mewujudkan zona integritas
- 6) Pembangunan zona integritas kawasan pelabuhan dan bandara yang menjadikan motivasi dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas di BBKK Makassar

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Pengembangan inovasi dengan menggunakan sistem IT yang membutuhkan anggaran khusus dalam pengembangan tersebut

- 2) Reviu SOP sebagai regulasi dalam pelaksanaan kegiatan belum dilakukan untuk semua SOP
- 3) Regulasi dari lintas sektor yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BBKK Makassar yang kadang berubah tanpa adanya sosialisasi kepada pengguna jasa.
- 4) Belum ada menu rincian output (RO) kegiatan pembangunan zona integritas dalam petunjuk perencanaan Ditjen P2P sehingga tidak ada anggaran spesifik untuk mendukung pembangunan zona integritas.
- 5) Perubahan kebijakan tingkat nasional yang berdampak pada perubahan tata kelola organisasi dan kebijakan operasional ditingkat satuan kerja seperti perubahan nomenklatur, perubahan pakaian dinas, perubahan kebijakan layanan publik dalam tata kelola vaksinasi.

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Perlu dianggarkan terkait pengembangan inovasi dalam mendukung sistem operasional perkantoran serta mendukung pelayanan kepada pengguna jasa BBKK Makassar
- 2) Perlu adanya reviu terhadap seluruh SOP secara berkala sesuai dengan kondisi yang ada
- 3) Perlu adanya komitmen dan sosialisasi terhadap regulasi yang diterbitkan, sehingga tidak ada benturan terhadap pengguna layanan.

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(106.664.000 \times 1,07) - 105.366.918}{106.664.000 \times 1,07} \times 100\%$$

$$E = 7,96\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{7,96}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 69,91\%$$

Untuk indikator 6 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.106.664.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.105.366.918,- serta capaian indikator sebesar 107,33%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,96% dan nilai efisiensi sebesar 69,91%.

Selain itu efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

Adanya pengembangan inovasi aplikasi Simpelta, Siska, dan Langsung Digital, Sehat Care, Emfire, D'Tawang, SiTopeng, Pasolle serta saluran pengaduan yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan layanan dari BBKK Makassar.

6. INDIKATOR KETUJUH

Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

Indikator persentase peningkatan kapasitas ASN merupakan indikator yang mengukur seberapa besar persentase ASN dalam peningkatan

kapasitasnya. Untuk tahun 2024 target untuk persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 85%.

a. Pengertian

Indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya merupakan indikator yang mengukur seberapa besar persentase ASN yang telah melaksanakan peningkatan kapasitas sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran yang disingkat menjadi JP berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilaksanakan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun.

b. Definisi Operasional

ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun dan dapat dilaksanakan pada tingkat instansi maupun nasional.

c. Rumus (cara perhitungan)

Pengukuran realisasi jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Sebanyak Paling Sedikit 20 Jam Pelajaran}}{\text{Jumlah Seluruh ASN KKP Kelas I Makassar}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran capaian indikator ketujuh ini yaitu persentase realisasi jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dibagi dengan persentase target indikator ketujuh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase Realisasi Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Sebanyak Paling Sedikit 20 Jam Pelajaran}}{\text{Persentase Target Indikator}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

Pada tabel III.30 di bawah ini dijabarkan jumlah ASN BBKK Makassar yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran pada tahun 2024.

Tabel III.30 Jumlah ASN BBKK Makassar yang Ditingkatkan Kompetensinya Sebanyak Paling Sedikit 20 (Dua Puluh) Jam Pelajaran Tahun 2024

No	Nama Pegawai	Jenis Peningkatan Kompetensi								Jumlah JP	Keterangan
		Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Sosial Kultural	Seminar/Konferensi	Workshop/Lokakarya	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	e-Learning		
1	AGUS JAMALUDIN, SKM, M.Kes	3	0	0	2	20	24	0	0	49	Terpenuhi
2	NIRWAN, SKM, M.Kes	3	25	0	0	4	4	0	0	36	Terpenuhi
3	Dra. AISYAH SUFRIE, MSc. PH	3	0	0	12	20	0	0	0	35	Terpenuhi
4	dr. MUH. HASKAR HASAN, M.Kes	3	0	0	0	4	0	0	40	47	Terpenuhi
5	AMRAN, SKM, M.kes	0	5	0	4	24	0	0	0	33	Terpenuhi
6	H. TUBIANTO ANANG ZULFIKAR, SKM, M.Epid	3	0	0	4	26.5	0	0	0	33.5	Terpenuhi
7	HJ. NUR MAGFIRAH, SKM, M.Kes	3	0	0	4	8	32	0	0	47	Terpenuhi
8	YUSRIANTO, SKM	7	16	0	4	18	4	0	0	49	Terpenuhi
9	ABDUL RAHMAN MUSTAFA, SKM	3	0	0	0	4	0	0	20	27	Terpenuhi
10	KARYADI EKA PUTRA, SKM	3	24	0	6	20	0	0	0	53	Terpenuhi
11	dr. MARSELINA SILI PAPU, MPH	0	0	0	0	0	0	0	20	20	Terpenuhi
12	dr. WAHJU VIVA IRIANAWATI	0	0	0	0	16	0	0	20	36	Terpenuhi
13	EGO, SKM, M.Kes	0	0	0	6	4	0	0	20	30	Terpenuhi
14	H. ANDI ALI RESA, SKM, M.Kes	3	0	0	0	20	0	0	20	43	Terpenuhi
15	HASTAWAVIA, SKM	0	0	0	0	16	0	0	20	36	Terpenuhi

No	Nama Pegawai	Jenis Peningkatan Kompetensi								Jumlah JP	Keterangan
		Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Sosial Kultural	Seminar/Konferensi	Workshop/Lokakarya	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	e-Learning		
16	dr. RIDHA ILAHI	3	0	0	0	32	0	0	20	55	Terpenuhi
17	dr. HJ. JUNIARTY NAIM	0	0	0	0	4	0	0	20	24	Terpenuhi
18	drg. ARIFA SETIANI THAMRIN, M.Kes	0	0	0	22	16	0	0	0	38	Terpenuhi
19	dr. HJ. TRI HANDAYANI NAIM	0	0	0	0	12	0	0	20	32	Terpenuhi
20	dr. HJ. RINI ASTUTY	3	16	0	4	16	0	0	0	39	Terpenuhi
21	dr. NURLAILAH MUHYIDDIN	0	0	0	0	0	0	0	20	20	Terpenuhi
22	Drs. S E R D I, SKM	0	0	0	0	4	0	0	20	24	Terpenuhi
23	H. NUR KAMAR, SKM, M.Kes	115	16	0	4	4	0	0	0	139	Terpenuhi
24	IBRAHIM, SKM, M.Kes	0	0	0	0	4	0	0	20	24	Terpenuhi
25	SITTI RAHMATIA, SKM	0	0	0	0	16	0	0	20	36	Terpenuhi
26	YUSFANDIAR	0	35	0	3	8	0	0	0	46	Terpenuhi
27	ABD. GANI BUATAN, SKM	3	0	0	0	4	0	0	20	27	Terpenuhi
28	dr. H. ABBAS ZAVEY NURDIN , Sp.Ok, MKK	0	0	0	0	0	0	0	20	20	Terpenuhi
29	HJ. MURDIYANINGSIH, S.Si	0	0	0	0	4	0	0	20	24	Terpenuhi
30	PURNIMAH RAZAK, S.H	0	0	0	4	0	0	0	24	28	Terpenuhi
31	ARNI ANGRIANY AMIR, ST	3	0	0	6	20	20	0	4	53	Terpenuhi
32	HJ. ANDI TANRI ABENG, SKM	0	0	0	0	4	0	0	20	24	Terpenuhi
33	PATMAWATY, SE	0	0	0	16	0	0	0	20	36	Terpenuhi
34	MARDIYANA, SKM, M.Adm.Kes	0	0	0	2	20	16	0	22	60	Terpenuhi
35	MARYAM, S. Kep, Ns	0	35	0	0	0	0	0	0	35	Terpenuhi
36	H. IMRAN, SH	3	0	0	0	4	0	0	20	27	Terpenuhi
37	HAKIM, S.Sos	0	0	0	0	0	0	0	20	20	Terpenuhi
38	HJ. ZAINAB, AMK	0	0	0	0	20	0	0	20	40	Terpenuhi
39	dr. HJ. FITRIAH	3	0	0	24	20	0	0	0	47	Terpenuhi
40	SYAHRIANTI SAID, S.ST	0	5	0	0	4	4	0	20	33	Terpenuhi
41	HJ. SITTI HAMDIA, SKM., M.Kes	0	0	0	0	18.5	0	0	20	38.5	Terpenuhi
42	FAISAL, S. Kep ,Ners	0	0	0	0	20	0	0	20	40	Terpenuhi
43	SYAHRUL, ST	0	0	0	0	4	0	0	20	24	Terpenuhi

No	Nama Pegawai	Jenis Peningkatan Kompetensi								Jumlah JP	Keterangan
		Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Sosial Kultural	Seminar/Konferensi	Workshop/Lokakarya	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	e-Learning		
44	H. ARHAM ALAM, S.Kep, Ners, M.KKK	0	0	15	0	0	0	0	20	35	Terpenuhi
45	dr. ANDI NUR ALAM. KS	0	0	0	0	24	0	0	0	24	Terpenuhi
46	dr. HJ JUMARNI	0	0	0	0	0	0	0	20	20	Terpenuhi
47	HJ. DELIA ROSIDAH, SKM, M.Kes	0	40	0	0	16	0	0	0	56	Terpenuhi
48	HJ. SATRIANI, SKM	0	0	0	0	4	0	0	20	24	Terpenuhi
49	dr. WAHYUDI	0	0	0	0	12	0	0	20	32	Terpenuhi
50	ANDI KUDRAT, SKM	3	0	0	0	8	0	0	24	35	Terpenuhi
51	IDIL RAKHMAN, SE	3	0	0	10	8	0	0	0	21	Terpenuhi
52	dr. RUSLAN	0	0	0	0	4	10	0	20	34	Terpenuhi
53	dr. ANDI IRFAN LATIF	0	103	0	4	16	24	0	0	147	Terpenuhi
54	dr. HJ. SRI APRIANITA	0	35	0	4	6	10	0	0	55	Terpenuhi
55	dr. KESIA PATONGLOAN	21	0	0	12	16	0	0	0	49	Terpenuhi
56	dr. NAJRIAH NASIR	0	0	0	20	10	0	0	0	30	Terpenuhi
57	WALUYO, SKM	0	0	0	0	16	0	0	20	36	Terpenuhi
58	dr. ANDI PERTIWIKUSUMA	0	0	0	0	4	0	0	24	28	Terpenuhi
59	HELPI SOPIAN MOKODOMPIT, SKM	0	0	0	0	0	7	0	20	27	Terpenuhi
60	MUHAMMAD HUSAIFAH, SAP, M.A.P	3	0	7	0	12	20	0	20	62	Terpenuhi
61	H. ABD. RAUF, AMK	0	0	0	6	12	0	0	20	38	Terpenuhi
62	RIZAL, SKM	0	0	0	0	4	0	0	20	24	Terpenuhi
63	HJ. MASRIANI, S.Kep, Ns	0	0	0	2	4	0	0	20	26	Terpenuhi
64	NURDIANSAH SAHRIR, SKM	3	0	0	4	4	0	0	20	31	Terpenuhi
65	H. RIDWAN, SKM	0	16	0	0	4	0	0	20	40	Terpenuhi
66	HJ. DIANA ABDULLAH, S.Kep, Ns	0	51	0	0	4	0	0	0	55	Terpenuhi
67	NASIRUDDIN, AMd.KL	0	0	0	2	20	0	0	20	42	Terpenuhi
68	NINING AYU PURNAMA, S.Kom	0	16	0	40	32	24	4	28	144	Terpenuhi
69	MIRNAWATY, S.ST	0	0	0	4	16	0	0	20	40	Terpenuhi
70	SYAFRUDDIN, S.Kep, Ns	0	0	0	0	14	0	0	20	34	Terpenuhi
71	H.MAHLI SUNUSI, SKM	0	0	0	4	4	0	0	20	28	Terpenuhi
72	HJ. FATMAWATI SALIM, SKM	0	0	0	0	4	0	0	20	24	Terpenuhi

No	Nama Pegawai	Jenis Peningkatan Kompetensi								Jumlah JP	Keterangan
		Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Sosial Kultural	Seminar/Konferensi	Workshop/Lokakarya	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	e-Learning		
73	YURIS ARTHA ROMBE ADA, S.K.M	0	0	0	0	16	0	0	20	36	Terpenuhi
74	H. RAJIMAN, AMd.KL	0	0	0	0	4	0	0	20	24	Terpenuhi
75	HASANUDDIN, AMd.Kep	0	39	0	0	16	0	0	4	59	Terpenuhi
76	HJ. NURHAYATI M, SKM	0	0	0	0	16	0	0	20	36	Terpenuhi
77	GERARDHA SUMALU, S.Kep	0	0	0	4	16	0	0	20	40	Terpenuhi
78	YULIANA SIRAJUDDIN, AMAK	0	0	0	0	0	0	0	20	20	Terpenuhi
79	YUSRAN, S.Kom	3	16	0	0	16	0	0	24	59	Terpenuhi
80	ARWIN AMIN, AMd.Kom	3	24	0	0	0	0	0	20	47	Terpenuhi
81	IRHAM, SKM	0	0	0	3	0	0	0	20	23	Terpenuhi
82	NURHASNI, SKM	3	0	30	0	16	0	0	20	69	Terpenuhi
83	ARFIANI, SKM	3	0	0	12	20	16	0	24	75	Terpenuhi
84	NURHAYATI HL, SKM	0	24	0	0	16	0	0	20	60	Terpenuhi
85	YONITHA PALIMBUNGA, AMd.Kep	0	0	0	0	4	0	0	20	24	Terpenuhi
86	dr. BONITA SESHARIKA C	0	35	0	8	8	0	0	0	51	Terpenuhi
87	MUSDALIFA M, AMKL	0	0	0	0	12	0	0	20	32	Terpenuhi
88	SUARNI S, AMK	0	0	0	20	8	0	0	0	28	Terpenuhi
89	HILDA ADRIATI MALIK, SKM	0	16	0	0	16	0	0	20	52	Terpenuhi
90	AMRIANA AMIN, SE	3	0	0	0	16	16	0	24	59	Terpenuhi
91	H. AMIR, AMK	0	0	0	0	4	0	0	20	24	Terpenuhi
92	H. WAHYUDI HIDAYAT, S.Kep, Ners	0	16	0	20	12	0	0	0	48	Terpenuhi
93	HJ. MUTHMAINNAH, AMK	0	0	0	0	20	0	0	20	40	Terpenuhi
94	RINA VIRGIANA THAMRIN, S.Tr.KL	0	16	0	0	16	0	0	20	52	Terpenuhi
95	RISKA, AMAK	0	31	0	10	4	0	0	0	45	Terpenuhi
96	AKBAR HAPID, S.Farm	8	0	0	20	12	0	0	0	40	Terpenuhi
97	DIAN PURNITA, SKM	0	8	0	18	4	0	0	0	30	Terpenuhi
98	KAIMUDDIN, S.Tr.KL	3	0	0	0	4	0	0	20	27	Terpenuhi
99	HJ. FITRIANI JAYA, S.Kep, Ners	0	0	0	4	17.5	0	0	20	41.5	Terpenuhi
100	H. CHANDRA WAHYUDDIN, AMK	0	0	0	0	4	0	0	20	24	Terpenuhi

No	Nama Pegawai	Jenis Peningkatan Kompetensi								Jumlah JP	Keterangan
		Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Sosial Kultural	Seminar/Konferensi	Workshop/Lokakarya	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	e-Learning		
101	MARIA VERONIKA AMBABUNGA, SKM	0	0	0	0	16	0	0	20	36	Terpenuhi
102	HARMAWAN, Amd.KL	0	0	0	76	20	0	0	0	96	Terpenuhi
103	ANUGRAYANTI, S.Tr.KL	0	0	0	0	16	0	0	20	36	Terpenuhi
104	NASRULLAH, A.Md.Kep	0	0	0	0	4	0	0	20	24	Terpenuhi
105	NUR SAID RAIS, A.Md KL	0	0	0	4	20	4	0	20	48	Terpenuhi
106	FATIMAHSARI, S.Tr.Kes	0	16	0	0	16	0	0	33	65	Terpenuhi
107	RENY MARLINA, Amd.Kep	0	0	0	0	4	0	0	20	24	Terpenuhi
108	HARINA, A.Md.KL	0	16	0	4	4	0	0	20	44	Terpenuhi
109	NURSAKTI SAPUTRA, A.Md.KL	0	0	0	14	8	0	0	0	22	Terpenuhi
110	ASTRI EKA WARDANI, Amd.Kep	0	39	0	2	4	0	0	0	45	Terpenuhi
111	DESI MARLINA, A.Md.KL	0	8	0	0	0	0	0	20	28	Terpenuhi
112	FATHUL JANNAH, Amd.Kep	0	16	0	14	12	0	0	0	42	Terpenuhi
113	LUKAS TANDI PAYUNG	0	0	0	8	4	0	0	20	32	Terpenuhi
114	HAMKA	0	0	0	4	4	0	0	20	28	Terpenuhi
115	SAYDATURRIZKY, Amd.Ak	3	0	0	0	8	16	0	24	51	Terpenuhi
116	SYAMSURI, Amd. Kep	0	35	0	0	20	0	0	0	55	Terpenuhi
117	ASRI, AMK	0	0	0	0	20	0	0	20	40	Terpenuhi
118	ILHAM, AMK	0	0	0	0	0	0	0	20	20	Terpenuhi
119	ISMAINAR, AMK	0	39	0	4	8	0	2	0	53	Terpenuhi
120	RISMA TANGNGA GULING, AMK	0	0	0	0	0	0	0	20	20	Terpenuhi
121	SRI WAHZUNI, AMK	3	35	0	4	20	0	0	0	62	Terpenuhi
122	SUHERMAN, AMK	0	22	0	2	20	0	0	0	44	Terpenuhi
123	ZULVITA AYSAH, Amd.KL	0	0	0	0	16	0	0	20	36	Terpenuhi
124	ADIL NIRWANDI	0	24	0	0	16	0	0	20	60	Terpenuhi
125	SRI WULANDARI	0	0	0	0	0	0	0	20	20	Terpenuhi
126	HIDAYANI SUTARDI	0	0	0	14	0	45	0	20	79	Terpenuhi
127	MIRNA	0	0	0	0	0	0	0	20	20	Terpenuhi
128	AHMAD RUSIDANI	21	35	0	4	12	0	0	20	92	Terpenuhi
129	SURAHMAN SYAM	3	16	0	14	4	0	0	0	37	Terpenuhi

No	Nama Pegawai	Jenis Peningkatan Kompetensi								Jumlah JP	Keterangan
		Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Sosial Kultural	Seminar/Konferensi	Workshop/Lokakarya	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	e-Learning		
130	AULIA MAGHFIRAH	3	0	30	0	0	4	0	0	37	Terpenuhi
131	URBA AMELIA	0	26	0	3	8	0	0	0	37	Terpenuhi
132	ABD. WAHID	0	13	0	0	20	0	0	0	33	Terpenuhi
133	HISKIA OVIANA	0	35	0	0	0	0	0	0	35	Terpenuhi
Jumlah JP Per Jenis Peningkatan Kompetensi		259	1038	82	529	1343	300	6	1879	5435.5	
Jumlah ASN yang Memenuhi Peningkatan Kompetensi Sebanyak Minimal 20 Jam Pelajaran yaitu 133 Orang, Akhir Desember jumlah ASN sebanyak 132 orang, 1 orang memasuki masa purna bakti di Desember 2024											

Dengan memperhatikan pengukuran kinerja indikator ketujuh pada tabel III.30 di atas, diketahui bahwa jumlah ASN BBKK Makassar pada November tahun 2024 adalah sebanyak 133 orang dan jumlah ASN yang telah ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) JP adalah sebanyak 133 orang. Akhir Desember 2024 jumlah pegawai berjumlah 132 orang, karena terdapat 1 (satu) orang ASN yang memasuki masa purna bakti. Dengan demikian persentase capaian indikator ketujuh dituangkan pada rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &\text{Jumlah ASN yang Ditingkatkan} \\
 &\quad \text{Kompetensinya} \\
 &\quad \text{Sebanyak Paling Sedikit} \\
 &\quad \text{20 Jam Pelajaran} \\
 \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah Seluruh ASN}}{\text{KKP Kelas I Makassar}} \times 100\% \\
 \text{Persentase Realisasi} &= \frac{132}{132} \times 100\% \\
 \text{Persentase Realisasi} &= 100\%
 \end{aligned}$$

Setelah diperoleh hasil persentase dari pengukuran di atas, dapat diperoleh persentase capaian indikator ketujuh ini, dengan rumus sebagai berikut:

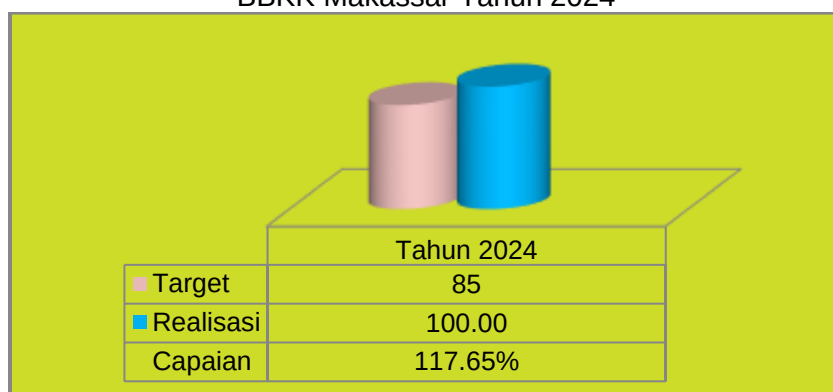
**Persentase Realisasi Jumlah ASN
yang Ditingkatkan
Kompetensinya
Sebanyak Paling Sedikit
20 Jam Pelajaran**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase Target Indikator}}{\text{Persentase Target Indikator}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

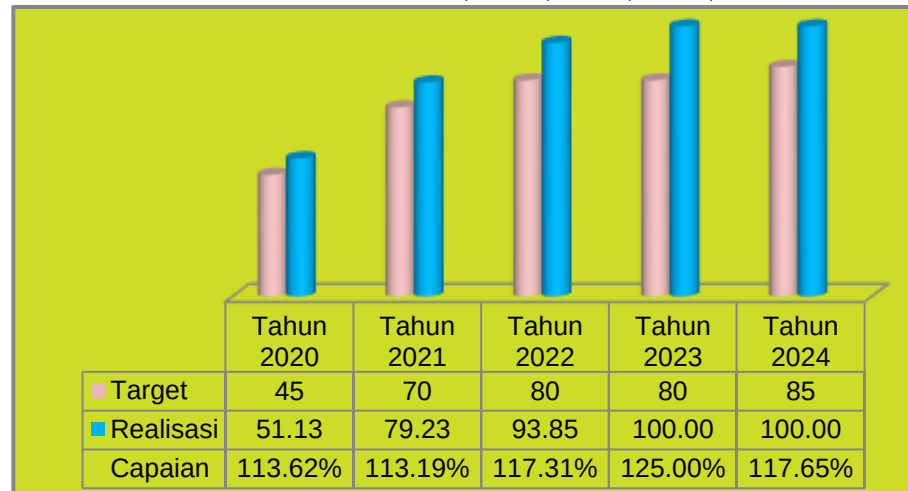
$$\text{Capaian} = 117,65\%$$

Grafik III.30 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-7
BBKK Makassar Tahun 2024



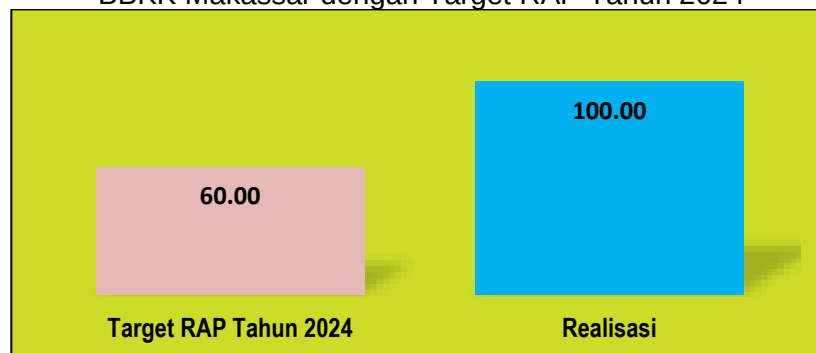
Dari grafik III.30 terlihat realisasi lebih besar dari target indikator kinerja yang telah ditentukan. Peningkatan kapasitas pada tahun 2024 dilakukan dengan cara tatap muka dan dalam jaringan (daring). Informasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sangat mudah diperoleh dan fleksibel untuk diikuti. Peningkatan kapasitas dengan daring masih menjadi keuntungan yang maksimal bagi ASN karena tanpa biaya pelaksanaan, kegiatan tersebut dapat diikuti. Untuk realisasi tahun 2024, realisasi sebesar 100%, karena seluruh ASN BBKK Makassar telah mengikuti peningkatan kapasitas sebesar 20 JPL dalam 1 tahun.

Grafik III.31 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-7
BBKK Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024



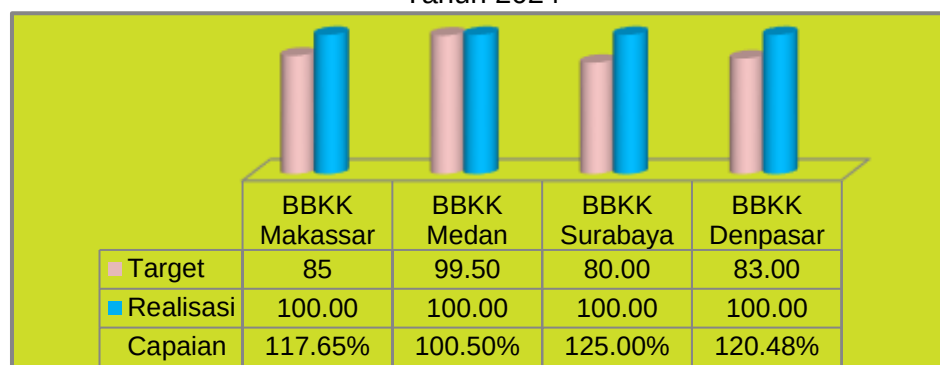
Dari grafik III.31 peningkatan kapasitas ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) JP sejak tahun 2020 telah menjadi salah satu indikator dalam Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar. Dari grafik III.35, terlihat penetapan target meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan meningkat menjadi 80%, dengan realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 125%. Sehingga untuk penetapan target tahun 2024 ditingkatkan menjadi 85% merupakan hasil evaluasi realisasi pada tahun 2023. Tahun 2024 dengan target 100% dapat terealisasi di akhir tahun. Sehingga capaian menjadi 117,65%. Capaian menurun dari tahun 2023 karena kenaikan penetapan target untuk tahun 2024 dari 80% menjadi 85%.

Grafik III.32 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Ke-7
BBKK Makassar dengan Target RAP Tahun 2024



Dari grafik III.32 menunjukkan capaian kinerja indikator 7 BBKK Makassar lebih besar dibanding dengan target RAP tahun 2024. Peningkatan kompetensi paling sedikit 20 (dua puluh) JP bagi setiap ASN merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4), bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilaksanakan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun.

Grafik III.33 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-7
BBKK Makassar dengan BBKK Medan,
BBKK Surabaya dan BBKK Denpasar
Tahun 2024



Berdasarkan Grafik III.33 terlihat bahwa ke 4 BKK terealisasi 100%, artinya seluruh ASN BBKK tersebut memenuhi 20 JPL Peningkatan kompetensi. Peningkatan kapasitas ASN sangat fleksibel dapat dilakukan secara daring tanpa menggunakan anggaran, sehingga realisasi tercapainya kegiatan ini sangat maksimal. Untuk capaian terbesar pada BBKK Surabaya, karena BBKK Surabaya menetapkan target yang lebih kecil dibanding BBKK lain. Sedangkan BBKK Medan dengan capaian terkecil karena target yang ditetapkan lebih besar dibanding dengan BBKK lain.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Anggaran yang tersedia baik di substansi teknis maupun dukungan manajemen untuk peningkatan kapasitas ASN sangat mendukung;
- 2) Informasi yang diperoleh terkait peningkatan kapasitas sangat mudah didapatkan, baik melalui undangan secara *online*, via email kantor, WA grup sesuai dengan kompetensi masing-masing ASN;
- 3) ASN BBKK Makassar sebagian besar adalah pejabat fungsional tertentu sehingga membutuhkan angka kredit dalam peningkatan kompetensi.
- 4) Peningkatan kapasitas ASN mendukung tercapainya target Perjanjian Kinerja Kepala Kantor dengan Pejabat Eselon I.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Peningkatan kapasitas ASN via online mempunyai kelemahan karena peserta Webinar yang cukup banyak, dengan keterbatasan jaringan sehingga kadang materi yang disampaikan kurang maksimal dipahami oleh peserta Webinar
- 2) Distribusi ASN dalam peningkatan kapasitas belum merata.
- 3) Peningkatan kapasitas ASN kebanyakan dari bagian teknis, sehingga kadang peningkatan kapasitas yang diikuti tidak relevan dengan kompetensi ASN tersebut

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Peningkatan kapasitas ASN secara online dapat dibuat secara bergelombang, sehingga optimalisasi pelaksanaan peningkatan kapasitas via online dapat lebih maksimal;
- 2) Usulan peningkatan kapasitas ASN substansi harus dibuat secara berkala dan dibuatkan TNA, sehingga peningkatan kapasitas dapat merata untuk setiap ASN.
- 3) Perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kapasitas ASN terkait kompetensi jabatan masing-masing ASN.

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$
$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran kinerja
CKi : Capaian kinerja
RAKi : Realisasi anggaran kinerja
NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(448.497.000 \times 1,18) - 445.381.150}{448.497.000 \times 1,18} \times 100\%$$
$$E = 15,59\%$$
$$NE = 50\% + \left(\frac{15,59}{20} \times 50\right)$$
$$NE = 88,98\%$$

Untuk indikator 7 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 448.257.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 445.381.150,- serta capaian indikator sebesar 117,65%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 15,55%, sehingga nilai efisiensinya 88,87%. Selain itu efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas secara daring, tanpa membutuhkan anggaran biaya pelaksanaan.
- 2) Mengikuti peningkatan kapasitas yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan LMS

- 3) Kewajiban mengikuti peningkatan kapasitas PADI ‘Pengetahuan Anti Korupsi Dasar dan Integritas’.

8. Indikator Kedelapan

Persentase Realisasi Anggaran

Target Persentase Realisasi Anggaran sebesar 96%.

a. Pengertian

Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

b. Definisi Operasional

Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran.

Persentase realisasi anggaran BBKK Makassar Tahun 2024 diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan RI.

c. Rumus (cara perhitungan)

Pengukuran persentase realisasi anggaran dihitung berdasarkan jumlah realisasi anggaran belanja dibagi dengan jumlah keseluruhan pagu anggaran dikali 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Jumlah Keseluruhan Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran capaian indikator kedelapan ini yaitu persentase realisasi anggaran dibagi dengan persentase target indikator kedelapan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Persentase Target Indikator}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

Pada pengukuran kinerja indikator kedelapan, Persentase Realisasi Anggaran diambil dari Aplikasi OM SPAN Kemenkeu RI, sebagaimana dalam *screenshot* gambar III.5 di bawah ini :

RD	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	REKAMAN	SABANG	MODAL	JENIS BELANJA						TOTAL
						PERAN	DAKASI	REBAH	DAKASO	LAINLAIN	TRANSFER	
1	410145 BALAI BESAR KEKAWANTAMAN KESEHATAN MAKASSAR	PAGU	20.010.013.000	10.052.337.000	305.130.000	0	0	0	0	0	0	30.367.500.000
		REALISASI	19.999.910.417	9.923.294.352	299.890.845	0	0	0	0	0	0	30.222.085.614
			(99,99%)	(98,72%)	(97,95%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(99,52%)
		SISA	10.102.583	120.042.648	6.239.155	0	0	0	0	0	0	145.414.386
GRAND TOTAL		PAGU	20.010.013.000	10.052.337.000	305.130.000	0	0	0	0	0	0	30.367.500.000
		REALISASI	19.999.910.417	9.923.294.352	299.890.845	0	0	0	0	0	0	30.222.085.614
			(99,99%)	(98,72%)	(97,95%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(99,52%)
		SISA	10.102.583	120.042.648	6.239.155	0	0	0	0	0	0	145.414.386

Gambar III.5 Screenshot Persentase Realisasi Anggaran BBKK Makassar

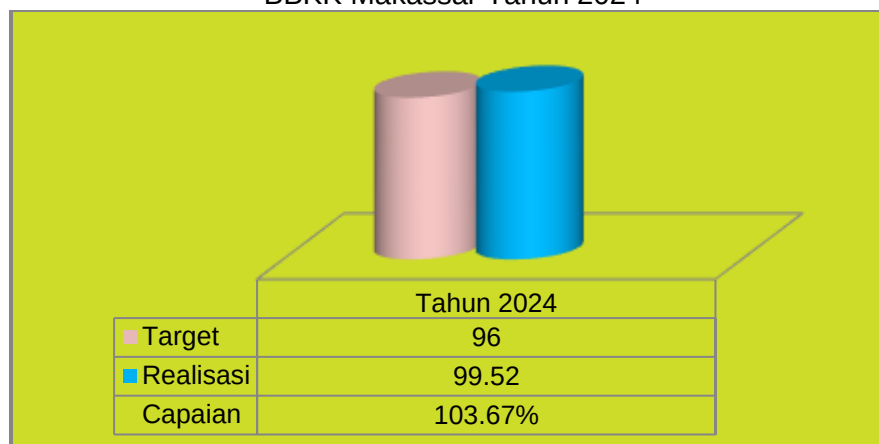
Berdasarkan gambar III.3 di atas, realisasi anggaran BBKK Makassar tahun 2024 sebesar 99,69%, dengan persentase capaian indikator pada rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Persentase Target Indikator}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{99,52\%}{96\%} \times 100\%$$

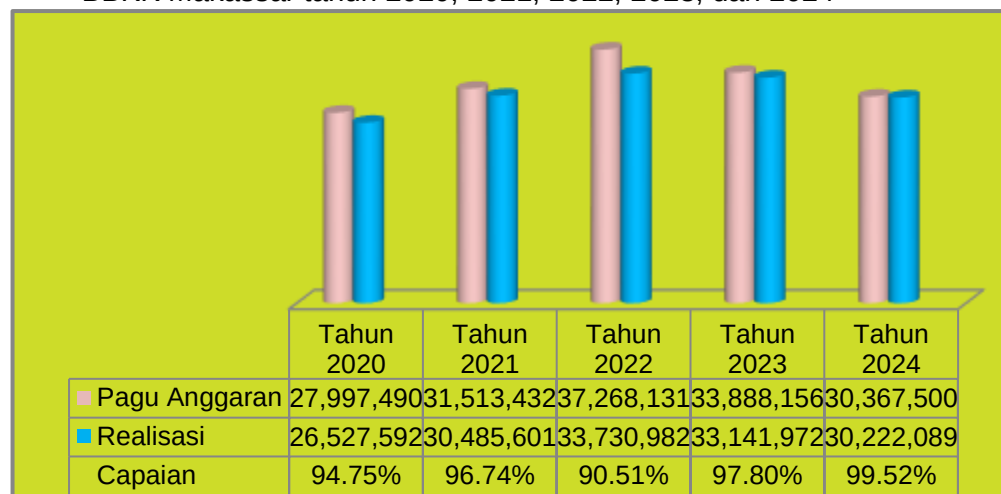
$$\text{Capaian} = 103,67\%$$

Grafik III.34 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-8
BBKK Makassar Tahun 2024



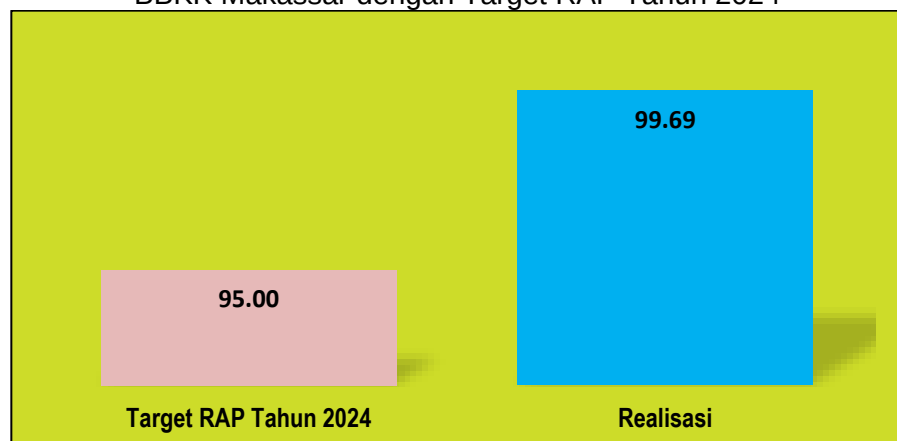
Dari grafik III.34 terlihat realisasi tercapai dari target indikator kinerja yang telah ditentukan. Realisasi anggaran sebesar 99,69% dengan target sebesar 96%. Kegiatan berjalan sesuai dengan RPK dan RPD yang telah ditetapkan dan juga kolaborasi yang kompak dengan lintas sector dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang terdapat dalam RKA-K/L tahun 2024. Terdapat *self blocking* terhadap anggaran perjalanan dinas di akhir triwulan IV, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan diatur kembali sesuai dengan anggaran perjalanan dinas yang masih bisa digunakan.

Grafik III.35 Perbandingan Realisasi Anggaran
dengan Pagu Anggaran
BBKK Makassar tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024



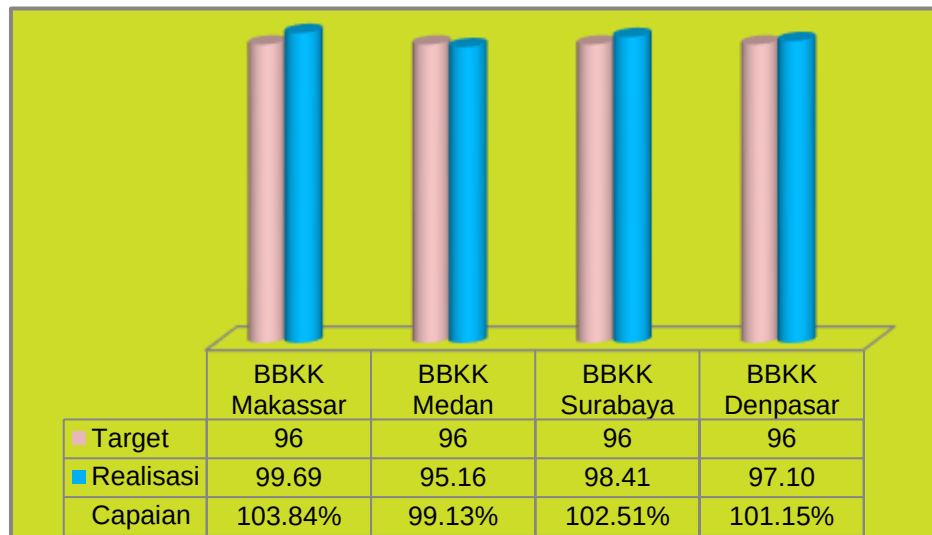
Dari grafik III.35 dapat dilihat realisasi anggaran pada tahun 2020 sd 2024 secara keseluruhan berada di atas 90%. Indikator persentase realisasi anggaran baru pada tahun 2023 dijadikan sebagai indikator dalam Perjanjian Kinerja. Sehingga untuk perbandingan persentase, BBKK Makassar menggunakan perbandingan realisasi terhadap pagu anggaran per tahunnya. Tahun 2024 merupakan capaian tertinggi persentase dari realisasi anggaran, namun untuk realisasi terbesar terdapat di tahun 2022 karena jumlah pagu anggaran terbesar pada tahun tersebut.

Grafik III.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Ke-8 BBKK Makassar dengan Target RAP Tahun 2024



Dari grafik III.36 menunjukkan realisas kinerja indikator 8 BBKK Makassar lebih besar dibanding dengan target RAP tahun 2024. Indikator persentase realisasi anggaran merupakan indikator direktif pimpinan yang targetnya ditetapkan sama untuk semua BKK. Terlihat tahun 2024 realisasi anggaran berada di atas target yang telah ditetapkan.

Grafik III.37 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-8
BBKK Makassar dengan BBKK Medan,
BBKK Surabaya dan BBKK Denpasar
Tahun 2024



Berdasarkan Grafik III.37 terlihat bahwa untuk Tahun 2024 dari ke 4 BBKK terdapat 1 BBKK yaitu BBKK Medan yang tidak terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk BBKK Denpasar, Surabaya dan Makassar realisasi anggaran mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase realisasi terbesar diperoleh oleh BBKK Makassar 99,69%, selanjutnya BBKK Surabaya 98,41%, dan BBKK Denpasar dengan realisasi 97,10%. Untuk BBKK Medan belum mencapai target, hanya sebesar 95,16% dari target 96%.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Dukungan anggaran yang tersedia baik di substansi teknis maupun dukungan manajemen untuk pelaksanaan kegiatan;
- 2) Dukungan lintas sektor dan lintas program yaitu Dinkes Prov., Kota/Kab., PT. Angkasa Pura I, Otoritas Pelabuhan, Otoritas Bandara, Kesyahbandaran, KSOP, maskapai penerbangan, agen kapal dan travel dalam pelaksanaan kekarantinaan kesehatan.
- 3) Optimalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPD

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Untuk pertanggungjawaban kegiatan yang berada di Wilker/Pos BBKK Makassar membutuhkan waktu untuk mengirimkan bukti fisik kegiatan sehingga proses pembuatan SPM kadang terkendala.
- 2) Terdapat komponen Belanja SBK (Konsumsi Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandara dan Pelabuhan Penyeberangan) yang tidak dapat dicairkan karena sesuai arahan Itjen pemberian konsumsi dapat dicairkan apabila melibatkan Eselon I berbeda termasuk SBK.

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Dengan membuat inovasi D'Tawang (Dokumen Partanggungjawaban Keuangan), sehingga memberikan kemudahan kepada Wilker/Pos yang jaraknya jauh dari kantor Induk untuk mengupload data dukung kegiatan untuk diverifikasi, sehingga proses pembuatan SPM dapat berjalan;
- 2) Melakukan revisi anggaran .

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(30.367.500.000 \times 1,04) - 30.222.089.364}{30.367.500.000 \times 1,04} \times 100\%$$

$$E = 4,16\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{4,16}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 60,40\%$$

Untuk indikator 8 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.367.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.222.089.364,- serta capaian indikator sebesar 103,67%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,16%, sehingga nilai efisiensinya 60,40%.

Selain itu efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Terdapat kegiatan yang dilaksanakan secara parallel, sehingga terdapat efisiensi anggaran.
- 2) Beberapa kegiatan peningkatan kapasitas dilaksanakan secara daring, tanpa membutuhkan anggaran biaya pelaksanaan dan biaya perjalanan dinas.
- 3) Terdapat sarana dan prasarana pendukung yang membantu dalam pengawasan pelaku perjalanan.
- 4) Penerapan aplikasi online dalam penerbitan dokumen kesehatan, sehingga mempersingkat waktu dan menyederhanakan alur pelayanan.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Berdasarkan Sumber Dana

Realisasi Anggaran berdasarkan sumber dana dapat dilihat dalam tabel III.31 di bawah ini.

Tabel III.31 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2024

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Rupiah Murni (RM)	28.722.223.000	28.604.558.449	99,59

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1.645.277.000	1.617.530.915	98,31
	Total	30.367.500.000	30.222.089.364	99,52

2. Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel III.32 di bawah ini.

Tabel III.32 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	20.010.013.000	19.999.910.417	99,95
2	Belanja Barang	10.052.337.000	9.923.298.102	98,72
3	Belanja Modal	305.150.000	298.880.845	97,95
	Total	30.367.500.000	30.222.089.364	99,69

3. Berdasarkan Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan, Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output dapat dilihat dalam tabel III.33

Tabel III.33 Realisasi Anggaran berdasarkan
Klasifikasi Rincian Output (KRO)
dan Rincian Output (RO) Kegiatan
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2024

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
BBKK Makassar				30,367,500,000	30,222,089,364	99.52%
DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		98.45%	3,796,894,000	3,738,059,089	98.98%
DO.4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		98.45%	3,796,894,000	3,738,059,089	98.98%
PEA	Koordinasi	8	99.40%	153,048,000	152,123,682	99.40%
PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS)	8	99.40%	153,048,000	152,123,682	99.40%

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	32705	98.05%	1,397,545,000	1,370,342,170	99.38%
QAA.011	Pelayanan kesehatan haji (HS)	31864	98.47%	1,338,605,000	1,318,155,390	99.84%
QAA.012	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (HS)	841	88.54%	58,940,000	52,186,780	88.89%
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1382	98.37%	1,681,302,000	1,653,818,287	98.41%
QAH.016	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS)	18	99.30%	158,690,000	157,575,911	99.30%
QAH.017	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS)	17	99.18%	288,156,000	285,795,960	99.46%
QAH.U01	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan (HS)	240	99.76%	158,400,000	158,015,500	99.76%
QAH.U02	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara (HS)	240	99.85%	211,200,000	210,884,200	99.85%
QAH.U07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD (HS)	88	96.75%	105,952,000	102,507,800	96.75%
QAH.U08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes (HS)	112	96.91%	316,400,000	306,637,716	96.91%
QAH.U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS)	56	73.18%	26,824,000	19,630,000	73.18%
QAH.U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS)	310	99.82%	111,600,000	111,399,300	99.82%
QAH.U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS)	40	99.26%	68,800,000	68,288,500	99.26%
QAH.U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS)	152	99.67%	54,720,000	54,539,400	99.67%
QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS)	35	96.61%	45,990,000	44,430,000	96.61%
QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS)	14	99.50%	76,370,000	75,987,000	99.50%

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
QAH.U20	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS)	60	99.87%	58,200,000	58,127,000	99.87%
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	20	99.59%	413,972,000	412,287,500	99.59%
RAB.001	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS)	20	99.59%	413,972,000	412,287,500	99.59%
TBC	Layanan Manajemen SDM Internal	21	99.64%	150,027,000	149,487,450	99.64%
TBC.001	Pelatihan kesehatan (HS)	21	99.64%	150,027,000	149,487,450	99.64%
WA	Program Dukungan Manajemen		99.67%	26,571,606,000	26,484,030,275	99.79%
WA.4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		99.67%	26,571,606,000	26,484,030,275	99.79%
AEA	Koordinasi	6	94.70%	64,970,000	61,528,914	96.09%
AEA.501	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program	1	91.73%	13,138,000	12,050,849	98.79%
AEA.502	Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	1	99.32%	10,294,000	10,223,600	99.32%
AEA.503	Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran	1	99.94%	24,388,000	24,374,200	99.94%
AEA.504	Koordinasi lintas program lintas sektor hukum dan organisasi	1	99.89%	8,615,000	8,605,685	99.89%
AEA.505	Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum	2	73.52%	8,535,000	6,274,580	73.52%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	26	99.83%	25,436,216,000	25,393,414,500	99.83%
EBA.956	Layanan BMN	4	94.64%	40,306,000	38,147,500	95.74%
EBA.957	Layanan Hukum	2	95.98%	26,596,000	25,527,857	95.98%

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2	99.96%	34,140,000	34,124,850	99.96%
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3	99.71%	80,068,000	79,839,061	100.00%
EBA.962	Layanan Umum	2	99.29%	62,512,000	62,068,851	99.29%
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	99.93%	20,520,000	20,506,080	99.93%
EBA.994	Layanan Perkantoran	12	99.85%	25,172,074,000	25,133,200,301	99.85%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	95.22%	131,000,000	124,740,445	95.22%
EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1	95.22%	131,000,000	124,740,445	95.22%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	200	99.14%	298,470,000	295,893,700	99.22%
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	130	98.74%	176,144,000	173,918,300	98.74%
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	70	99.71%	122,326,000	121,975,400	99.91%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	59	94.93%	640,950,000	608,452,716	99.63%
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	13	99.48%	182,471,000	181,513,763	99.64%
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	24	95.19%	233,079,000	221,874,189	99.34%
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	19	90.65%	212,770,000	192,884,804	99.94%
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	3	96.44%	12,630,000	12,179,960	100.00%

4. Berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja BBKK Makassar

Realisasi anggaran berdasarkan indikator Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Tahun 2024.

Tabel III.34 Realisasi Anggaran berdasarkan
Indikator Perjanjian Kinerja
Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah	1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1	1	100.00%	2,160,531,000	2,129,260,843	98.55%
		2. Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	100%	100%	100.00%	506,610,000	503,754,800	99.44%
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0.96	1.00	104.17%	564,754,000	543,268,496	96.20%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	85	95.92	112.85%	361,285,000	356,768,762	98.75%
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90	99.88	110.98%	26,050,200,000	25,980,461,371	99.73%
		6. Kinerja implementasi WBK Satker	81	86.94	107.33%	106,664,000	105,366,918	98.78%
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%	100.00%	117.65%	448,497,000	445,381,150	99.31%
		8. Persentase Realisasi Anggaran	96%	99.52%	103.67%	30,367,500,000	30,222,089,364	99.52%

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja berdasarkan Target kinerja BBKK Makassar tahun 2024 yang tertulis di dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Dirjen P2P dengan Kepala BBKK Makassar, dapat disimpulkan :

1. Terdapat 8 indikator dalam Perjanjian Kinerja BBKK Makassar tahun 2024, meliputi :
 - a. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan target 1 realisasi 1 dengan nilai capaian 100%;
 - b. Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan target 100% realisasi 100% dengan nilai capaian 100%;
 - c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan target 0,96 realisasi 1 dengan nilai capaian 104,17%;
 - d. Nilai kinerja anggaran dengan target 85 realisasi 95,92 dengan nilai capaian 112,85%;
 - e. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan target 90 realisasi 99,88 dengan nilai capaian 110,98%;
 - f. Kinerja implementasi WBK Satker dengan target 81 realisasi 86,94 dengan nilai capaian 107,33%;
 - g. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan target 85% realisasi 100% dengan nilai capaian 117,65%, dan;
 - h. Persentase realisasi anggaran dengan target 96% realisasi 99,52% dengan nilai capaian 103,67%.

Secara keseluruhan indikator mencapai target yang telah ditetapkan, dengan nilai rata-rata capaian sebesar 107,08%.
2. Selama kurun waktu lima tahun yaitu 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 BBKK Makassar memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar :
 - a. Tahun 2020 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 113,32%;
 - b. Tahun 2021 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 109,67%;

- c. Tahun 2022 dengan rata-rata capaian sebesar 101,69%;
- d. Tahun 2023 dengan rata-rata capaian sebesar 104,19%.
- e. Tahun 2024 dengan rata-rata capaian sebesar 107,08%.

Rata-rata capaian kinerja paling rendah di tahun 2022 sebesar 101,69% dan tertinggi di Tahun 2020 sebesar 113,32%.

3. Perbandingan rata-rata capaian kinerja tahun 2024 dengan BKK dengan klasifikasi yang sama yaitu BBKK Medan, BBKK Surabaya dan BBKK Denpasar sebesar :

- a. BBKK Makassar sebesar 107,08%;
- b. BBKK Medan sebesar 104,58%;
- c. BBKK Surabaya sebesar 108,80%;
- d. BBKK Denpasar sebesar 107,21%.

Rata-rata capaian kinerja paling rendah berada di BBKK Medan dan yang paling tinggi adalah capaian kinerja BBKK Surabaya.

4. Peran sumber daya dalam mewujudkan realisasi kinerja sangatlah penting, dalam menganalisis efisiensi sumber daya diperoleh efisiensi untuk setiap indikator yaitu :

- a. indikator 1 sebesar 1,45%;
- b. indikator 2 sebesar 0,56%;
- c. indikator 3 sebesar 7,66%;
- d. indikator 4 sebesar 12,49%;
- e. indikator 5 sebesar 10,13%;
- f. indikator 6 sebesar 7,96%;
- g. indikator 7 sebesar 15,59%;
- h. indikator 8 sebesar 4,16%.

Efisiensi sumber daya terbesar terdapat pada indikator 7 sebesar 15,59% hal ini dipengaruhi oleh realisasi anggaran yang lebih kecil dari anggaran yang disediakan, karena untuk peningkatan kapasitas bisa dilaksanakan secara daring yang tidak membutuhkan anggaran untuk kegiatan tersebut.

5. Anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator BBKK Makassar untuk tahun 2024 sebesar Rp. 30.222.089.364,- dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 30.367.500.000,-, sehingga realisasi menjadi 99,52%.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan capaian kinerja BBKK Makassar di tahun berikutnya, terdapat rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan :

Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan tenaga pengambilan sampel uji air, karena pada saat ini di BBKK Makassar khususnya di Wilker dan Pos BBKK Makassar tenaga yang berkompeten masih sangat kurang, sehingga dalam pengambilan sampel air di Wilker atau Pos masih dilakukan oleh petugas dari induk. Dan juga lokus pengambilan uji sampel air yang dijadikan sebagai target dalam Perjanjian Kinerja indicator 3 hanya yang berada di Kota Makassar, karena terkendala di tenaga bersertifikat.

PUSTAKA ACUAN

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan

Peraturan MENPAN-RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantina Kesehatan

Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes Tahun 2020-2024

Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBKK Makassar Tahun 2020-2024, BBKK Makassar Revisi ke-5 Maret 2024

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBKK Makassar tahun anggaran 2024

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) BBKK Makassar, Juni tahun 2024

Laporan Kinerja KKP Kelas I Makassar, KKP Kelas I Makassar tahun 2023

Laporan Keuangan BBKK Makassar Semester I tahun 2024

PENYUSUN

Pengarah	:	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Penanggung Jawab	:	Kasubag Adum
Ketua	:	Arni Angriany Amir, ST
Anggota	:	Mardiyana, SKM, M.Adm.Kes Andi Kudrat, SKM Nining Ayu Purnama, S.Kom Arfiani, SKM Amriana Amin, SE Saydaturrizky, AMd.Ak

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 33.888.156.000, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

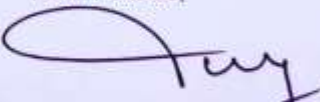
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003


Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
NIP 196908221993031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1
		2	Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	100%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,96
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai Kinerja Anggaran	85
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		6	Kinerja Implementasi WBK Satker	81
		7	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	80%
		8	Persentase Realisasi Anggaran	95%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Rp.	8.222.987.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rp.	25.665.169.000
TOTAL		Rp. 33.888.156.000

Jakarta, Desember 2023

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar


Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003


Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
NIP 196908221993031005

Perjanjian Kinerja Revisi Januari Tahun 2024

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
Jabatan : Kepala Balai Besar Kekejarantinaa Kesehatan Makassar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



**Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu,
DHSM, MARS**

Jakarta, 30-01-2024

Pihak Pertama

Agus Jamaludin, SKM, M.Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

No	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
1	2	3	4
A	Sasaran Strategis (08)		
	Menguatnya surveilans yang adekuat	Presentase kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus)	80 Persen
I	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor resiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	40 Persen
I	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		
	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1,00 Indeks
		Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	100 Persen
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,96 Indeks
B	Sasaran Strategis (17)		
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik	90 Indeks
I	Program Dukungan Manajemen		
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	98 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95 Nilai
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjut Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95 Persen
		Persentase realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	96 Persen

No	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
1	2	3	4
1	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Kinerja Anggaran	85 Nilai
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90 Nilai
		Kinerja Implementasi WBK Satker	81 Nilai
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	85 Persen
		Persentase Realisasi Anggaran	96 Persen
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	95 Persen

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	3,795,894,000.00
2	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	26,571,606,000.00
TOTAL			30,367,500,000.00

Pihak Kedua



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu,
DHSM, MARS

Jakarta, 30-01-2024

Pihak Pertama

Agus Jamaludin, SKM, M.Kes

Perjanjian Kinerja Revisi November Tahun 2024

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
Jabatan : Kepala Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Yudhi Pramono, MARS
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

dr. Yudhi Pramono, MARS

Jakarta, 16 November 2024

Pihak Pertama

Agus Jamaludin, SKM, M.Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

No	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
1	2	3	4
A	Sasaran Strategis (08)		
	Menguatnya surveilans yang adekuat	Presentase kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus)	80 Persen
I	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor resiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	40 Persen
1	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		
	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1,00 Indeks
		Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	100 Persen
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,96 Indeks
B	Sasaran Strategis (17)		
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik	90 Indeks
I	Program Dukungan Manajemen		
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95 Nilai
		Nilai Reformasi Birokrasi	98 Nilai
		Persentase realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	96 Persen

No	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
1	2	3	4
1	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Kinerja Anggaran	85 Nilai
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90 Nilai
		Kinerja Implementasi WBK Satker	81 Nilai
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	85 Persen
		Persentase Realisasi Anggaran	96 Persen

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	3,795,894,000.00
2	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	26,571,606,000.00
TOTAL			30,367,500,000.00

Pihak Kedua



dr. Yudhi Pramono, MARS

Jakarta, 16 November 2024

Pihak Pertama



Agus Jamaludin, SKM, M.Kes

SK Tim Pengelola SAKIP



Kementerian Kesehatan
BBKK Makassar

📍 Jalan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Maros
Sulawesi Selatan 90552
☎ (0411) 4834926
🌐 <https://bbkkmakassar.com>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
NOMOR : HK.02.03/C.IX.3/3869/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya peningkatan tugas dan fungsi pada Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar;
 - b. bahwa untuk tercapainya point 1 tersebut di atas, salah satunya melalui peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar tentang Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar;
- Mengingat:
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
1. KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR



- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar;
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar adalah :
- Melakukan koordinasi untuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Menyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu atas laporan kinerja;
 - Melakukan inventarisasi data dukung yang diperlukan dalam evahasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 27 Agustus 2024

Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan
Makassar,



Agus Jamaludin

Lampiran :
Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan
Kesehatan Makassar Tentang Tim Pengelola
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Nomor : HK.02.03/C.IX.3/3869/2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

**TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR**

Pengarah	:	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Penanggung Jawab	:	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
Ketua	:	Arni Angriany Amir, ST
Sekretaris	:	Nining Ayu Purnama, S.Kom
Anggota	:	Mardiyana, SKM, M.Adm.Kes
		Andi Kudrat, SKM
		Arfiani, SKM
		Amriana Amin, SE
		Saydaturrizky, AMd.Ak

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar,



Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
NIP 196908221993031005

SOP Pengumpulan Data Kinerja

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIJEN P2P  BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR		NOMOR SOP	: OT.02.02/1.2/0403/2023
		TGL PEMBUATAN	: 14 November 2018
		REVISI	: Ke-3
		TANGGAL EFEKTIF	: 21 Juni 2024
		DISAHKAN OLEH	 Agus Jamaludin, SKM, M.Kes NIP. 196908221993031005
SUB BAGIAN PROGRAM DAN LAPORAN		NAMA SOP	PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. IHR Tahun 2005 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan		1. Umum, minimal SLTA sederajat 2. Memahami Tata Administrasi Arsip	
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP Pengukuran Kinerja 2. SOP Pengarsipan Dokumen		1. Alat Tulis Kantor 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Komputer	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
		1. Buku Penomoran Surat; 2. Lembar Disposisi, dll	

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA BALAI	KASUBAG ADUM	KETUA TIM KERJA	PERENCANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan pengumpulan data kinerja					SK Tim Penyusun Lakip, Surat dan Disposisi	1 hari	Disposisi	
2	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing Timker dan Subag Adum						1 hari	Format Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja	
3	Mengisi form kinerja masing-masing Timker Timker dan Subag Adum					Format Pengumpulan Data dan informasi Kinerja	3 hari	Format Pengumpulan Data dan informasi dari Timker dan Subag Adum	
4	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing Timker dan Subag Adum					Format Pengumpulan Data dan informasi dari Timker dan Subag Adum	1 hari	Hasil Kompilasi Pengumpulan Data dan Informasi dari Timker dan Subag Adum	
5	Memverifikasi semua data kinerja untuk bahan final laporan kinerja bulanan					Hasil Kompilasi Pengumpulan Data dan Informasi dari Timker dan Subag Adum diverifikasi	3 hari	Kertas Kerja Pengumpulan Data dan Informasi Hasil Pengukuran Kinerja yang telah diverifikasi	
6	Melaporkan hasil verifikasi data kinerja ke Kasubag Adum					Kertas Kerja Pengumpulan Data dan Informasi Hasil Pengukuran Kinerja yang telah diverifikasi Data Kinerja	30 menit	Data Kinerja	
7	Melakukan input data kinerja ke dalam format rekapitulasi bulanan						1 hari	File format data kinerja laporan bulanan	
8	Menyimpan data kinerja bulanan					File format data kinerja laporan bulanan	30 menit	Arsip file format data kinerja laporan bulanan	

SOP Pengukuran Kinerja

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIJEN P2P  Kemenkes BBKK Makassar BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">NOMOR SOP</td> <td style="padding: 2px 5px;">: OT.02.02/1.2/0404/2023</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">TGL. PEMBUATAN</td> <td style="padding: 2px 5px;">: 12 November 2018</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">REVISI</td> <td style="padding: 2px 5px;">: Ke-3</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">TANGGAL EFEKTIF</td> <td style="padding: 2px 5px;">: 21 Juni 2024</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">DISAHKAN OLEH</td> <td style="padding: 2px 5px;">  Agus Jamaludin, SKM, M.Kes NIP. 196908221993031005 </td> </tr> </table>	NOMOR SOP	: OT.02.02/1.2/0404/2023	TGL. PEMBUATAN	: 12 November 2018	REVISI	: Ke-3	TANGGAL EFEKTIF	: 21 Juni 2024	DISAHKAN OLEH	 Agus Jamaludin, SKM, M.Kes NIP. 196908221993031005
NOMOR SOP	: OT.02.02/1.2/0404/2023										
TGL. PEMBUATAN	: 12 November 2018										
REVISI	: Ke-3										
TANGGAL EFEKTIF	: 21 Juni 2024										
DISAHKAN OLEH	 Agus Jamaludin, SKM, M.Kes NIP. 196908221993031005										
SUB BAGIAN PROGRAM DAN LAPORAN	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black; padding: 2px 5px;">NAMA SOP</td> <td style="padding: 2px 5px;">PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA</td> </tr> </table>	NAMA SOP	PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA								
NAMA SOP	PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA										
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :										
1. IHR Tahun 2005 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	1. Umum, minimal SLTA sederajat 2. Memahami Tata Administrasi Arsip										
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN										
1. SOP Pengumpulan Data Kinerja 2. SOP Pengarsipan Dokumen	1. Alat Tulis Kantor 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Komputer										
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN										
	1. Buku Penomoran Surat; 2. Lembar Disposisi, dll										

PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PERENCANA	MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA BALAI	KASUBAG ADUM	TIM PENYUSUN LKj		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan penyusunan pengukuran kinerja					SK Tim Penyusun LKj, Surat dan Format	1 hari	Disposisi	
2	Mengolah data dan menganalisa data kinerja dari pengumpulan data kinerja ke dalam kertas kerja perhitungan kinerja					Disposisi dan data kinerja	1 hari	Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	
3	Memeriksa dan melakukan koreksi hasil perhitungan kinerja					Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	3 hari	Hasil Koreksi Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	
4	Melakukan pengesahan atas kertas kerja perhitungan kinerja yang telah valid					Hasil Koreksi Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	1 hari	Kertas Kerja Perhitungan Kinerja yang sudah disahkan	
5	Menyusun hasil perhitungan kinerja ke dalam format laporan kinerja					Kertas Kerja Perhitungan Kinerja yang sudah Format laporan kinerja	1 hari	Draft Laporan Kinerja	
6	Memeriksa dan melakukan koreksi atas draft laporan kinerja					Draft Laporan Kinerja	2 hari	Laporan Kinerja yang sudah di ttd oleh Kepala Balai	
7	Mengesahkan draft laporan kinerja yang telah valid					Laporan Kinerja yang sudah di ttd oleh Kepala Balai	30 menit	Laporan Kinerja yang sudah di ttd oleh Kepala Balai	
8	Penandatanganan Laporan kinerja oleh Kepala Balai					Laporan Kinerja yang sudah di ttd oleh Kepala Balai	30 menit	Laporan Kinerja yang sudah di ttd oleh Kepala Balai	
9	Penggandaan laporan kinerja dan pengiriman ke Eselon 1 via email atau Jasa Kirim					Laporan Kinerja yang sudah di ttd oleh Kepala Balai	30 menit	Laporan Kinerja yang sudah di ttd oleh Kepala Balai	SOP Pengukuran Kinerja

**Matriks RAK Kegiatan dan Pendanaan
serta Matriks Revisi RAK
BBKK MAKASSAR TAHUN 2020-2024**

Matriks Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dan Pendanaan Tahun Anggaran 2020 – 2024 Revisi 1 Bulan Desember Tahun 2020
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

No	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp)					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	3,722,715	1,697,238	1,951,824	2,244,597	2,581,287	2,938,296,000	2,952,987,480	3,395,935,602	3,905,325,942	4,491,124,834	Bidang PKSE, UKLW dan PRL
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	95%	95%	96%	153,734,000	154,502,670	177,678,071	204,329,781	234,979,248	Bidang PKSE, UKLW dan PRL
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	90%	90%	90%	90%	1,449,308,000	1,456,554,540	1,675,037,721	1,926,293,379	2,215,237,386	Bidang PKSE, UKLW dan PRL
		4. Nilai kinerja anggaran	80	83	83	83	83	176,192,000	177,072,960	203,633,904	234,178,990	269,305,838	Bagian Tata Usaha
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%					17,575,756,000					Bagian Tata Usaha
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran		93	93	93	93		16,958,428,420	19,502,192,683	22,427,521,585	25,791,649,823	Bagian Tata Usaha
		6. Kinerja implementasi WBK satker	70	72	75	75	75	5,485,586,000	5,513,013,930	6,339,966,020	7,290,960,922	8,384,605,061	Bagian Tata Usaha
		7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	80%	80%	80%	80%	218,618,000	218,618,000	251,410,700	289,122,305	332,490,651	Bagian Tata Usaha

Sumber : Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024 Revisi 1 Bulan Desember Tahun 2020

Matriks Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dan Pendanaan Tahun Anggaran 2020 – 2024 Revisi 2 Bulan Desember Tahun 2021
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

No.	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp)					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	3,722,715	2,652,728	3,050,637	3,508,233	4,034,468	2,938,296,000	6,526,618,000	7,701,409,240	8,856,620,626	10,185,113,720	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	95%	95%	96%	153,734,000	562,344,000	663,565,920	763,100,808	877,565,929	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	90%	90%	90%	90%	1,449,308,000	588,408,000	694,321,440	798,469,656	918,240,104	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	80	83	83	83	83	176,192,000	311,270,000	367,298,600	422,393,390	485,752,399	Substansi Tata Usaha
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%					17,575,756,000					Substansi Tata Usaha
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran		93	93	93	93		23,049,248,000	27,083,543,880	31,146,075,462	35,817,986,781	Substansi Tata Usaha
		6. Kinerja implementasi WBK satker	70	80	81	81	81	5,485,586,000	209,060,000	129.353.000	131.708.000	151,464,000	Substansi Tata Usaha
		7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	70%	80%	80%	80%	218,618,000	266,484,000	518.750.000	528.200.000	607,430,000	Substansi Tata Usaha

Sumber : Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024 Revisi 2 Bulan Desember Tahun 2021

Matriks Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dan Pendanaan Tahun Anggaran 2020 – 2024 Revisi 3 Bulan Juli Tahun 2022
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

No.	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp)					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Kekegiatan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekegiatan kesehatan	3,722,715	2,652,728				2,938,296,000	6,526,618,000				Substansi PKSE, UKLW dan PRL
		1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara			1	1	1			5.316.162.000	5.413.916.000	6,226,003,000	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	100%	100%	100%	153,734,000	562,344,000	700.235.000	712.979.000	819,926,000	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	90%	0,96	0,98	1	1,449,308,000	588,408,000	1.246.691.000	1.269.381.000	1,459,788,000	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	80	83	85	86	86	176,192,000	311,270,000	478.136.000	486.838.000	559,864,000	Substansi Tata Usaha
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%					17,575,756,000					Substansi Tata Usaha
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran		93	93	93	93		23,049,248,000	28.873.804.000	29.401.001.000	33,811,151,000	Substansi Tata Usaha
		6. Kinerja implementasi WBK satker	70	80	81	81	81	5,485,586,000	209,060,000	246,690,800	283,694,420	326,248,583	Substansi Tata Usaha
		7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	80%				218,618,000	266,484,000				Substansi Tata Usaha
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya			80%	80%	80%			314,451,120	361,618,788	415,861,606	Substansi Tata Usaha

Sumber : Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024 Revisi 3 Bulan Juli Tahun 2022

Matriks Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dan Pendanaan Tahun Anggaran 2020 – 2024 Revisi 4 Bulan Februari Tahun 2023
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

No.	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp)					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	3,722,715	2,652,728				2,938,296,000	6,526,618,000				Substansi PKSE, UKLW dan PRL
		1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara			1	1	1			5.316.162.000	4.034.657.000	3,499,350,000	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	100%	100%	100%	153,734,000	562,344,000	700.235.000	462.850.000	416,565,000	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	90%	0,96	0,98	1	1,449,308,000	588,408,000	1.246.691.000	1.637.114.000	1,473,402,000	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	80	83	85	86	86	176,192,000	311,270,000	478.136.000	570.231.000	513,208,000	Substansi Tata Usaha
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%					17,575,756,000					Substansi Tata Usaha
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran		93	93	93	93		23,049,248,000	28.873.804.000	26.278.059.000	23,650,253,000	Substansi Tata Usaha
		6. Kinerja implementasi WBK satker	70	80	81	81	81	5,485,586,000	209,060,000	129.353.000	88.513.000	79,663,000	Substansi Tata Usaha
		7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	80%				218,618,000	266,484,000				Substansi Tata Usaha
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya			80%	80%	80%			518.750.000	816.732.000	735,059,000	Substansi Tata Usaha

No.	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp)					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		8. Persentase Realisasi Anggaran				95%	95%				33.888.156.000	30.367.500.000	Substansi Tata Usaha
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti				92,5%	92,5%					0	Substansi Tata Usaha

Matriks Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dan Pendanaan Tahun Anggaran 2020 – 2024 Revisi Tahun 2024
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar

No.	Sasaran	Indikator	Target						Alokasi (Rp)					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2024 Rev	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	3,722,715	2,652,728					2,938,296,000	6,526,618,000				Substansi PKSE, UKLW dan PRL
		1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara			1	1	1	1			5.316.162.000	4.034.657.000	3,499,350,000	Timker 1, 2, 3, dan 4
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	100%	100%	100%	100%	153,734,000	562,344,000	700.235.000	462.850.000	416,565,000	Timker 1, 2, 3, dan 4
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	90%	0,96	0,98	0,96	0,96	1,449,308,000	588,408,000	1.246.691.000	1.637.114.000	1,473,402,000	Timker 1, 2, 3, dan 4
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	80	83	85	85	85	85	176,192,000	311,270,000	478.136.000	570.231.000	513,208,000	Subbag Adum dan Timker 5
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%						17,575,756,000					Substansi Tata Usaha
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran		93	93	93	90	90		23,049,248,000	28.873.804.000	26.278.059.000	23,650,253,000	Subbag Adum dan Timker 5
		6. Kinerja implementasi WBK satker	70	80	81	81	81	81	5,485,586,000	209,060,000	129.353.000	88.513.000	79,663,000	Subbag Adum dan Timker 5
		7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	80%					218,618,000	266,484,000				Substansi Tata Usaha
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya			80%	80%	85%	85%			518.750.000	816.732.000	735,059,000	Subbag Adum dan Timker 5

No.	Sasaran	Indikator	Target						Alokasi (Rp)					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2024 Rev	2020	2021	2022	2023	2024	
		8. Persentase Realisasi Anggaran				95%	96%	96%				33.888.156.000	30.367.500.000	Subbag Adum dan Timker 5
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti				92,5%	95%						0	Subbag Adum dan Timker 5

**Kertas Kerja Perhitungan Kinerja
Balai Besar Kekejarantinaa Kesehatan Makassar Tahun 2024**

**Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Kekejarantinaa di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
Indikator 1 : Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN**



Kementerian Kesehatan
BBKK Makassar

Jalan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Maros
Sulawesi Selatan 90552
(0411) 4834926
<https://bbkkmakassar.com>

Nomor : PR.05.06/C.IX.3.9/0089/2025 8 Januari 2025
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 1 Tahun 2024

Yth.

**Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar**

Sehubungan dengan Surat Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Nomor: PR.05.06/C.IX.3/0085/2025, Tanggal 7 Januari 2025, Hal: Undangan Penyusunan Lakip dan Profil BBKK Makassar 2024 TA 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 1 (Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan) BBKK Makassar Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

8 Januari 2025
Ketua Tim Kerja 1
(Surveilans dan Penindakan Pelanggaran
Kekarantinaan Kesehatan)



H. Tubianto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid
NIP 197806212005011005



Kementerian Kesehatan
BBKK Makassar

Jalan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Maros
Sulawesi Selatan 90552
(0411) 4834926
<https://bbkkmakassar.com>

Nomor : PR.05.06/C.IX.3.12/0090/2025 8 Januari 2025
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 2 Tahun 2024

Yth.

**Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar**

Sehubungan dengan Surat Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Nomor: PR.05.06/C.IX.3/0085/2025, Tanggal 7 Januari 2025, Hal: Undangan Penyusunan Lakip dan Profil BBKK Makassar 2024 TA 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 2 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang) BBKK Makassar Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

8 Januari 2025
Ketua Tim Kerja 2
(Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat
Angkut dan Barang),



Dra. Aisyah Sufrie, MSc.PH
NIP 196905012001122001



Kementerian Kesehatan
BBKK Makassar

📍 Jalan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Maros
Sulawesi Selatan 90552
☎️ (0411) 4834926
🌐 <https://bbkkmakassar.com>

Nomor : PR.05.06/C.IX.3.10/0091/2025 8 Januari 2025
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 3 Tahun 2024

Yth.

**Kepala Balai Besar Kekarantina Kesehatan
Makassar**

Sehubungan dengan Surat Kepala Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar Nomor: PR.05.06/C.IX.3/0085/2025, Tanggal 7 Januari 2025, Hal: Undangan Penyusunan Lakip dan Profil BBKK Makassar 2024 TA 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 3 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan) BBKK Makassar Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

8 Januari 2025
Ketua Tim Kerja 3
(Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan
Lingkungan)

Ibrahim, SKM, M.Kes
NIP. 197508242000031003

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://lta.kominfo.go.id/verifyPDF>. Atau laporkan ke layanan pengaduan BBKK Makassar, Email bbkkmakassar@yahoo.co.id, Telp (0411) 4834926, 4834215, WA 085256044660



Kementerian Kesehatan
BBKK Makassar

📍 Jalan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Maros
Sulawesi Selatan 90552
☎️ (0411) 4834926
🌐 <https://bbkkmakassar.com>

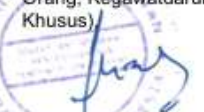
Nomor : PR.05.06/C.IX.3.11/0092/2025 8 Januari 2025
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 4 Tahun 2024

Yth.

**Kepala Balai Besar Kekarantina Kesehatan
Makassar**

Sehubungan dengan Surat Kepala Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar Nomor: PR.05.06/C.IX.3/0085/2025, Tanggal 7 Januari 2025, Hal: Undangan Penyusunan Lakip dan Profil BBKK Makassar 2024 TA 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 4 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus) BBKK Makassar Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

8 Januari 2025
Ketua Tim Kerja 4
(Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan
Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi
Khusus)

dr. Ridha Ilahi
NIP 196905012001122001

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://lta.kominfo.go.id/verifyPDF>. Atau laporkan ke layanan pengaduan BBKK Makassar, Email bbkkmakassar@yahoo.co.id, Telp (0411) 4834926, 4834215, WA 085256044660



Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Tim Kerja 1 (Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan)
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2024

Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
Indikator 1: Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Definisi Operasional: Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.														
Formula Perhitungan: $Indeks = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$ S = score Smax = score maksimal Smin = score minimal														
- Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage) - Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max) - Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min)														
Target dan capaian indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN dihitung bulanan sesuai cara perhitungan.														
PERSENTASE ORANG YANG DIPERIKSA SESUAI STANDAR														
Bandara														
1. Jumlah Penumpang Pesawat Datang Khusus bagi yang Bisa Melakukan Pemeriksaan	374622	327596	362217	443677	383874	417723	454115	421635	406007	411577	378442	455160	4836645	Tim Kerja 1
2. Jumlah Penumpang Pesawat Berangkat Khusus bagi yang Bisa Melakukan Pemeriksaan	243659	215272	211290	280361	254064	245958	289735	268738	254059	249460	230486	263317	3006399	
3. Pemeriksaan Personil Pesawat (Kedatangan)	15855	13034	14051	16111	15901	15675	17227	15963	15640	15726	15308	16932	187423	
Pelabuhan														
1. Jumlah Penumpang Kapal Datang Khusus bagi yang Bisa Melakukan Pemeriksaan	108461	91664	101347	165562	107605	132180	135546	112424	113832	117159	98424	133234	1417438	
2. Jumlah Penumpang Kapal Berangkat Khusus bagi yang Bisa Melakukan Pemeriksaan	126788	91030	97665	158906	120916	125177	160084	107243	114545	120830	102062	120399	1445645	
3. Pemeriksaan Awak Kapal (Kedatangan)	26369	26561	26356	26274	27200	24531	27767	28379	28661	30637	29129	28420	330284	

Makassar, 10 Januari 2025
Mengetahui,
Ketua Tim Kerja 1



H. Tubianto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid
NIP. 1978.6212005011005

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Tim Kerja 2 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang)
Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2024

Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
Indikator 1: Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Definisi Operasional: Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.														
Formula Perhitungan: $Indeks = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$ S = score S _{max} = score maksimal S _{min} = score minimal														
• Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage) • Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max) • Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min) Target dan capaian indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN dihitung bulanan sesuai cara perhitungan.														
PERSENTASE ALAT ANGKUT YANG DIPERIKSA SESUAI STANDAR														
Bandara Jumlah General Declaration (Gendec) Terverifikasi (Ttd/Stempel)	71	78	64	56	74	50	77	93	79	74	68	79	863	Tim Kerja 2
Pelabuhan Jumlah COP Jumlah PHQC	20 1424	17 1260	20 1471	21 1420	14 1531	21 1479	25 1630	19 1583	15 1569	21 1760	19 1654	21 1594	233 18375	
PERSENTASE BARANG YANG DIPERIKSA SESUAI STANDAR														
Bandara Surat Izin Angkut Jenazah	57	66	55	61	60	59	72	64	69	68	61	57	749	
Pelabuhan Surat Izin Angkut Jenazah	6	9	9	4	5	6	4	4	7	6	3	10	73	

Makassar, 10 Januari 2025
Mengetahui
Ketua Tim Kerja 2

Dra. Aisyah Sufrie, MSc.PH
NIP.196905012001122001

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Tim Kerja 3 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan)
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2024

Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

Indikator 1: Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Definisi Operasional: Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.														
Formula Perhitungan: $Indeks = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$ S = score Smax = score maksimal Smin = score minimal														
• Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage) • Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max) • Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min)														
Target dan capaian indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN dihitung bulanan sesuai cara perhitungan.														
PERSENTASE LINGKUNGAN YANG DIPERIKSA SESUAI STANDAR														
<u>Bandara</u>														
Form Inspeksi Hygiene & Sanitasi TTU	1	1	1	2	21	13	14	3	2	2	12	1	73	Tim Kerja 3
Form Inspeksi Hygiene & Sanitasi TPP	7	6	6	10	48	15	8	9	8	8	8	12	145	
Form Inspeksi Sarana PAB	3	4	3	3	2	2	6	3	3	3	2	2	36	
Rekapitulasi Hasil Survei Vektor														
Survei Aedes Aegypti (Jumlah Kontainer)														
Bandara Hasanuddin	555	583	308	369	442	365	297	434	375	549	301	281	4859	
Bandara Tampa Padang & Pos Pelabuhan Mamuju	185	204	128	200	131	112	109	78	27	97	34	96	1401	
Bandara Tana Toraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Survei Anopheles (Jumlah Habitat)														
Bandara Hasanuddin	19	21	19	19	20	21	19	15	16	19	19	18	225	
Bandara Tampa Padang & Pos Pelabuhan Mamuju	0	16	10	14	12	18	18	17	5	6	8	13	137	
Bandara Tana Toraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Survei Tikus (Jumlah Perangkap)														
Bandara Hasanuddin	400	0	400	400	800	400	400	400	0	400	400	0	4000	
Bandara Tampa Padang & Pos Pelabuhan Mamuju	0	0	800	400	400	400	400	0	400	400	0	400	3600	

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Bandara Tana Toraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Survei Lalat (Jumlah Bangunan Disurvei)														
Bandara Hasanuddin	6	6	6	5	5	5	4	5	5	5	5	6	63	
Bandara Tampa Padang & Pos Pelabuhan Mamuju	3	5	6	0	11	6	6	5	5	5	1	5	58	
Bandara Tana Toraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Survei Kecoa (Jumlah Bangunan Disurvei)														
Bandara Hasanuddin	18	15	19	11	12	9	15	6	16	8	8	6	143	
Bandara Tampa Padang & Pos Pelabuhan Mamuju	0	1	0	0	2	1	1	2	1	1	5	1	15	
Bandara Tana Toraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pelabuhan														
Form Inspeksi Hygiene & Sanitasi TTU	21	21	21	20	20	20	20	20	21	20	21	20	245	
Form Inspeksi Hygiene & Sanitasi TPP	44	44	44	48	52	52	52	53	53	53	53	53	601	
Form Inspeksi Sarana PAB	14	21	24	14	19	18	17	24	22	19	17	19	228	
Rekapitulasi Hasil Survei Vektor														
Survei Aedes Aegypti (Jumlah Kontainer)														
Wilker Pelabuhan Awerange	44	45	49	49	43	50	44	44	44	45	49	47	553	
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone	589	642	913	800	852	993	1144	878	785	528	609	496	9229	
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	7	7	111	
Wilker Pelabuhan Biringkassi	168	168	168	168	168	168	168	173	173	173	173	173	2041	
Wilker Pelabuhan Makassar	57	67	96	94	133	283	194	332	431	236	151	265	2339	
Wilker Pelabuhan Malili	110	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	330	
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua	128	157	117	155	140	150	246	280	304	222	265	215	2379	
Wilker Pelabuhan Parepare	470	360	297	360	322	310	299	268	276	265	259	262	3748	
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba	136	124	126	125	123	112	102	93	93	97	104	111	1346	
Pos Pelabuhan Majene & Silopo	9	17	14	14	10	11	10	12	8	16	11	8	140	
Pos Pelabuhan Paotere	179	177	178	166	171	189	185	198	124	111	147	151	1976	
Pos Pelabuhan Pasangkayu	72	65	66	63	63	68	68	70	67	71	67	71	811	
Pos Pelabuhan Siwa	45	45	45	45	45	45	45	45	45	29	29	0	463	
Pos Pelabuhan Perikanan Untia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Survei Anopheles (Jumlah Habitat)														
Wilker Pelabuhan Awerange	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone	0	21	0	21	0	21	21	21	21	21	21	21	189	
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju	0	0	0	1	1	0	6	6	6	6	6	6	38	
Wilker Pelabuhan Biringkassi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
Wilker Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wilker Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wilker Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pos Pelabuhan Majene & Silopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pos Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pos Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	35	
Pos Pelabuhan Siwa	0	10	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	50	
Pos Pelabuhan Perikanan Untia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Survei Tikus (Jumlah Perangkap)														
Wilker Pelabuhan Awerange	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	3200	
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone	400	0	400	400	0	400	400	400	0	400	400	400	3600	
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju	0	0	0	400	400	400	0	400	400	0	400	400	2800	
Wilker Pelabuhan Biringkassi	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800	
Wilker Pelabuhan Makassar	0	400	400	0	400	400	0	400	400	400	600	400	3800	
Wilker Pelabuhan Malili	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	600	
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua	400	400	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400	3200	

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Wilker Pelabuhan Parepare	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	3200	
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	2400	
Pos Pelabuhan Majene & Silopo	400	398	400	0	400	0	400	0	400	400	400	0	3198	
Pos Pelabuhan Paotere	400	400	0	400	400	0	400	400	400	0	400	400	3600	
Pos Pelabuhan Pasangkayu	400	400	0	400	0	400	400	400	0	400	0	0	2800	
Pos Pelabuhan Siwa	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	3200	
Pos Pelabuhan Perikanan Untia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Survei Lalat (Jumlah Bangunan Survei)														
Wilker Pelabuhan Awerange	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	118	
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	48	
Wilker Pelabuhan Biringkassi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Wilker Pelabuhan Makassar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
Wilker Pelabuhan Malili	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Wilker Pelabuhan Parepare	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	21	
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Pos Pelabuhan Majene & Silopo	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	0	41	
Pos Pelabuhan Paotere	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
Pos Pelabuhan Pasangkayu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
Pos Pelabuhan Siwa	5	5	5	5	5	0	5	0	0	0	0	0	30	
Pos Pelabuhan Perikanan Untia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Survei Keco (Jumlah Bangunan Survei)														
Wilker Pelabuhan Awerange	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju	12	12	12	12	6	6	6	6	2	2	2	2	80	
Wilker Pelabuhan Biringkassi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
Wilker Pelabuhan Makassar	12	8	8	8	10	12	9	13	13	12	13	14	132	
Wilker Pelabuhan Malili	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
Wilker Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	6	
Pos Pelabuhan Majene & Silopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pos Pelabuhan Paotere	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	69	
Pos Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pos Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pos Pelabuhan Perikanan Untia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Makassar, 10 Januari 2025

Mengetahui,

Ketua Tim Kerja 3



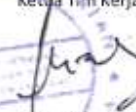
Ibrahim, SKM, M.Kes

NIP.197508242000031003

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Tim Kerja 4 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus)
Balai Besar Keкарantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2024

Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Keкарantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
Indikator 1: Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Definisi Operasional: Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.														
Formula Perhitungan: $\text{Indeks} = \frac{S}{(S_{\text{max}} - S_{\text{min}})}$ S = score Smax = score maksimal Smin = score minimal • Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage) • Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max) • Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min)														
Target dan capaian indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN dihitung bulanan sesuai cara perhitungan.														
PERSENTASE ORANG YANG DIPERIKSA SESUAI STANDAR Laporan Kesehatan Penjamah Makanan untuk Pekerja di Bandara	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	41	Tim Kerja 4
Laporan Kesehatan Penjamah Makanan untuk Pekerja di Pelabuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Masyarakat di Wilayah Pelabuhan & Bandara 1. Jumlah Skrining HIV 2. Jumlah Skrining TB 3. Jumlah Skrining Malaria	71 48 21	269 203 139	121 71 149	104 133 208	50 50 36	21 21 397	91 91 209	157 194 494	288 302 323	101 40 130	202 203 149	134 162 25	1609 1518 2280	

Makassar, 10 Januari 2025
Mengetahui,
Ketua Tim Kerja 4

dr. Ridha Ilahi
NIP. 196905012001122001

**Kertas Kerja Perhitungan Kinerja
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2024**

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

Indikator 2 : Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan



Kementerian Kesehatan
BBKK Makassar

Jalan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Maros
Sulawesi Selatan 90552
(0411) 4834926
<https://bbkkmakassar.com>

Nomor : PR.05.06/C.IX.3.9/0089/2025 8 Januari 2025
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 1 Tahun 2024

Yth.

**Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar**

Sehubungan dengan Surat Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Nomor: PR.05.06/C.IX.3/0085/2025, Tanggal 7 Januari 2025, Hal: Undangan Penyusunan Lakip dan Profil BBKK Makassar 2024 TA 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 1 (Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan) BBKK Makassar Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

8 Januari 2025
Ketua Tim Kerja 1
(Surveilans dan Penindakan Pelanggaran
Kekarantinaan Kesehatan)



H. Tubianto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid
NIP. 197806212005011005



Kementerian Kesehatan
BBKK Makassar

Jalan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Maros
Sulawesi Selatan 90552
(0411) 4834926
<https://bbkkmakassar.com>

Nomor : PR.05.06/C.IX.3.12/0090/2025 8 Januari 2025
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 2 Tahun 2024

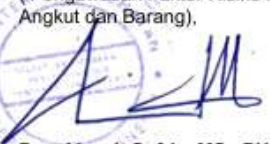
Yth.

**Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar**

Sehubungan dengan Surat Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Nomor: PR.05.06/C.IX.3/0085/2025, Tanggal 7 Januari 2025, Hal: Undangan Penyusunan Lakip dan Profil BBKK Makassar 2024 TA 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 2 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang) BBKK Makassar Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

8 Januari 2025
Ketua Tim Kerja 2
(Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat
Angkut dan Barang)



Dra. Aisyah Sufrie, MSc.PH
NIP. 196905012001122001

Nomor : PR.05.06/C.IX.3.10/0091/2025 8 Januari 2025
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 3 Tahun 2024

Yth.

**Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar**

Sehubungan dengan Surat Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Nomor: PR.05.06/C.IX.3/0085/2025, Tanggal 7 Januari 2025, Hal: Undangan Penyusunan Lakip dan Profil BBKK Makassar 2024 TA 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 3 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan) BBKK Makassar Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

8 Januari 2025
Ketua Tim Kerja 3
(Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan
Lingkungan).



Ibrahim, SKM, M.Kes
NIP 197508242000031003

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Tim Kerja 1 (Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan)
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2024

Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
Indikator 3: Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Definisi Operasional: Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun Formula Perhitungan: $Indeks = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$ S = score Smax = score maksimal Smin = score minimal - Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage) - Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max) - Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min) Target dan capaian indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara dihitung bulanan sesuai cara perhitungan														
Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Timker 1
Berdasarkan Data Pengawasan Penumpang 2024														
1 Penyelidikan Epidemiologi (PE)	0	0	1	0	0	34	5	0	0	0	0	0	40	
2 Penumpang Meninggal di Pesawat	1	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	2	9	
3 Jamaah Umroh Demam => Notifikasi	1	1	4	0	0	4	22	4	1	0	0	0	37	
4 Hasil Skrining HIV Positif => Notifikasi	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
5 Hasil Skrining TB Positif => Notifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Hasil Skrining Malaria Positif => Notifikasi	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	6	
7 Penumpang dengan Antigen/PCR Positif => Notifikasi	2	0	5	0	1	0	2	0	0	0	0	0	10	
8 Penumpang dengan Penyakit Menular yang Menimbulkan Wabah => SKTLT	1	1	3	1	2	1	1	2	4	1	1	1	19	

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
9 Penumpang Sakit (Termasuk Saturasi < 95, HB < 8,5) atau Pertolongan Darurat => SKTLT	3	4	14	2	2	4	3	0	2	4	1	1	40	
10 Penumpang Hamil > 32 Minggu => SKTLT	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	2	1	9	
11 Penumpang Demam (Suhu > 37,5) => SKTLT	0	0	3	0	4	1	3	0	2	2	2	0	17	
12 Kontak Erat Jamaah Yang Meninggal (Arrival) => Notifikasi	9	2	16	0	0	13	0	0	0	0	0	0	40	
13 Jamaah Haji Hamil < 14 Minggu dan > 26 Minggu => Berita Acara Tidak Laik Terbang	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
14 Jamaah Haji / Umroh Belum Vaksin Meningitis => Berita Acara Tolak Berangkat bahwa Ybs Harus Divaksinasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Buku ICV Palsu/Expired => Berita Acara Tolak Berangkat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	

Makassar, 10 Januari 2025
Mengetahui,
Ketua Tim Kerja 1


H. Tubianto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid
NIP 197806212005011005

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Tim Kerja 2 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang)
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2024

Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

Indikator 2: Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan

[illegible]

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Jumlah Faktor Risiko Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Faktor Risiko Dikendalikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jenazah Tidak Diberangkatkan atau Tunda Keberangkatan sampai Dokumen Lengkap (Surat Izin Angkut Jenazah Penyakit Menular & Potensial Wabah)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Makassar, 10 Januari 2025

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja 2



Dra. Aisyah Sufrie, MSc.PH
NIP.196905012001122001

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Tim Kerja 3 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan)
Balai Besar Kekekarantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2024

Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kekekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
Indikator 2: Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Jumlah Faktor Risiko Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Definisi Operasional: Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan dalam satu tahun														
Formula Perhitungan: Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%														
Target dan capaian dihitung bulanan sesuai cara perhitungan.														
Jumlah Faktor Risiko pada Lingkungan yang Dikendalikan	0	8	8	0	0	0	8	0	0	1	0	0	25	Tim Kerja 3
Faktor Risiko Ditemukan	0	8	8	0	0	0	8	0	0	1	0	0	25	
1. Hygiene & Sanitasi TTU (Suhu & Kelembaban, Fisik & Kimia Lingkungan) yang Tidak Memenuhi Syarat/Indeks Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Hygiene & Sanitasi TPP (Fisik, E Coli, MPN Coliform, ALT untuk Alat Usap Makan & Masak) yang Tidak Memenuhi Syarat/Indeks Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
3. Inspeksi Sarana PAB (E Coli, MPN Coliform, Risiko Pencemaran Tinggi & Amat Tinggi) yang Tidak Memenuhi Syarat/Indeks Tinggi	0	4	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	12	
4. Pemeriksaan Kualitas Air (Lokus) yang Tidak Memenuhi Syarat/Indeks Tinggi:														
Pemeriksaan Fisik, Kimia, Bakteriologis yang Tidak Memenuhi Syarat														
- Pemeriksaan Fisik Tidak Memenuhi Syarat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
- Pemeriksaan Kimia Tidak Memenuhi Syarat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Pemeriksaan Bakteriologis Tidak Memenuhi Syarat	0	3	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	11	

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Jumlah Faktor Risiko Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Faktor Risiko Dikendalikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Hygiene & Sanitasi TTU yang Memenuhi Syarat dari yang Sebelumnya Tidak Memenuhi Syarat/Indeks Tinggi													0	
2. Hygiene & Sanitasi TPP yang Memenuhi Syarat dari yang Sebelumnya Tidak Memenuhi Syarat/Indeks Tinggi													0	
3. Inspeksi Sarana PAB yang Memenuhi Syarat dari yang Sebelumnya Tidak Memenuhi Syarat/Indeks Tinggi													0	
4. Pemeriksaan Kualitas Air (Lokus) yang Memenuhi Syarat dari yang Sebelumnya Tidak Memenuhi Syarat/Indeks Tinggi														
- Pemeriksaan Fisik													0	
- Pemeriksaan Kimia													0	
- Pemeriksaan Bakteriologis													0	

Makassar, 10 Januari 2025

Mengetahui,

Ketua Tim Kerja 3



Ibrahim, SKM, M.Kes
NIP 197508242000031003

**Kertas Kerja Perhitungan Kinerja
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2024**

**Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
Indikator 3 : Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN**



Kementerian Kesehatan
BBKK Makassar

📍 Jalan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Maros
Sulawesi Selatan 90552
☎ (0411) 4834926
🌐 <https://bbkkmakassar.com>

Nomor : PR.05.06/C.IX.3.9/0089/2025 8 Januari 2025
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 1 Tahun 2024

Yth.

**Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar**

Sehubungan dengan Surat Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Nomor: PR.05.06/C.IX.3/0085/2025, Tanggal 7 Januari 2025, Hal: Undangan Penyusunan Lakip dan Profil BBKK Makassar 2024 TA 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 1 (Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan) BBKK Makassar Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

8 Januari 2025
Ketua Tim Kerja 1
(Surveilans dan Penindakan Pelanggaran
Kekarantinaan Kesehatan)


H. Tubianto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid
NIP. 197806212005011005



Kementerian Kesehatan
BBKK Makassar

📍 Jalan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Maros
Sulawesi Selatan 90552
☎ (0411) 4834926
🌐 <https://bbkkmakassar.com>

Nomor : PR.05.06/C.IX.3.10/0091/2025 8 Januari 2025
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 3 Tahun 2024

Yth.

**Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar**

Sehubungan dengan Surat Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Nomor: PR.05.06/C.IX.3/0085/2025, Tanggal 7 Januari 2025, Hal: Undangan Penyusunan Lakip dan Profil BBKK Makassar 2024 TA 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 3 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan) BBKK Makassar Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

8 Januari 2025
Ketua Tim Kerja 3
(Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan
Lingkungan)


Ibrahim, SKM, M.Kes
NIP. 197508242000031003

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Tim Kerja 1 (Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan)
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2024

Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
Indikator 3: Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Definisi Operasional: Status faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun Formula Perhitungan: $\text{Indeks} = \frac{S}{(S_{\text{max}} - S_{\text{min}})}$ S = score Smax = score maksimal Smin = score minimal • Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage) • Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max) • Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min) Target dan capaian indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara dihitung bulanan sesuai cara perhitungan														
Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Timker 1
Berdasarkan Data Pengawasan Penumpang 2024														
1 Penyelidikan Epidemiologi (PE)	0	0	1	0	0	34	5	0	0	0	0	0	40	
2 Penumpang Meninggal di Pesawat	1	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	2	9	
3 Jamaah Umroh Demam => Notifikasi	1	1	4	0	0	4	22	4	1	0	0	0	37	
4 Hasil Skrining HIV Positif => Notifikasi	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
5 Hasil Skrining TB Positif => Notifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Hasil Skrining Malaria Positif => Notifikasi	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	6	
7 Penumpang dengan Antigen/PCR Positif => Notifikasi	2	0	5	0	1	0	2	0	0	0	0	0	10	
8 Penumpang dengan Penyakit Menular yang Menimbulkan Wabah => SKTLT	1	1	3	1	2	1	1	2	4	1	1	1	19	

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
9 Penumpang Sakit (Termasuk Saturasi < 95, HB < 8,5) atau Pertolongan Darurat => SKTLT	3	4	14	2	2	4	3	0	2	4	1	1	40	
10 Penumpang Hamil > 32 Minggu => SKTLT	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	2	1	9	
11 Penumpang Demam (Suhu > 37,5) => SKTLT	0	0	3	0	4	1	3	0	2	2	2	0	17	
12 Kontak Erat Jamaah Yang Meninggal (Arrival) => Notifikasi	9	2	16	0	0	13	0	0	0	0	0	0	40	
13 Jamaah Haji Hamil < 14 Minggu dan > 26 Minggu => Berita Acara Tidak Laik Terbang	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
14 Jamaah Haji / Umroh Belum Vaksin Meningitis => Berita Acara Tolak Berangkat bahwa Ybs Harus Divaksinasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Buku ICV Palsu/Expired => Berita Acara Tolak Berangkat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	

Makassar, 10 Januari 2025
Mengetahui,
Ketua Tim Kerja 1



H. Tubianto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid
NIP 177806212005011005



Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
Indikator 3: Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2024												Jumlah	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Realisasi	
Definisi Operasional: Status faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun Formula Perhitungan: $Indeks = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$ S = score Smax = score maksimal Smin = score minimal • Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage) • Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max) • Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min) Target dan capaian indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara dihitung bulanan sesuai cara perhitungan														
1 Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Pinjal ≤ 1 Wilker Pelabuhan Awerange Wilker Pelabuhan Bajoe Bone Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju Wilker Pelabuhan Biringkassi Wilker Pelabuhan Makassar Wilker Pelabuhan Malili Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua Wilker Pelabuhan Parepare Pos Pelabuhan Bira Bulukumba Pos Pelabuhan Majene & Silopo Pos Pelabuhan Paotere Pos Pelabuhan Pasangkayu	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Timker 3
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Wilker Pelabuhan Awerange	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	Timker 3
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Biringkassi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Makassar	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
Wilker Pelabuhan Malili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Parepare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Majene & Silopo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Paotere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Pasangkayu	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Siwa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Perikanan Untia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bandara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju	0.00	1.10	0.30	0.00	1.00	1.30	1.90	0.00	0.30	0.00	1.00	0.00		
Bandara Tana Toraja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Kantor Induk / Bandara Hasanuddin	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
6 Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Perimeter=0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Timker 3
Wilker Pelabuhan Awerange	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Biringkassi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Makassar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Malili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Parepare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Majene & Silopo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Paotere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Pasangkayu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Siwa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Perikanan Untia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bandara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bandara Tana Toraja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Kantor Induk / Bandara Hasanuddin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7 Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Buffer < 1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Timker 3
Wilker Pelabuhan Awerange	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Biringkassi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Makassar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Malili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Parepare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Pos Pelabuhan Majene & Silopo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	Timker 3
Pos Pelabuhan Paotere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Pasangkayu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Siwa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Perikanan Untia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bandara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bandara Tana Toraja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Kantor Induk / Bandara Hasanuddin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8 Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Wilayah Kerja / Pos	108.33%	108.33%	108.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Timker 3
Wilker Pelabuhan Awerange	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Wilker Pelabuhan Biringkassi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Wilker Pelabuhan Makassar	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2		
Wilker Pelabuhan Malili														
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Wilker Pelabuhan Parepare	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Pos Pelabuhan Majene & Silopo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Pos Pelabuhan Paotere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Pos Pelabuhan Pasangkayu	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Pos Pelabuhan Perikanan Untia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pos Pelabuhan Siwa														
Bandara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju														
Bandara Tana Toraja														
Kantor Induk / Bandara Hasanuddin	1	1	1	1	21	12	14	1	2	1	12	1		
9 Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Wilayah Kerja / Pos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Timker 3
Wilker Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Wilker Pelabuhan Biringkassi	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
Wilker Pelabuhan Makassar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Wilker Pelabuhan Malili	0													
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Wilker Pelabuhan Parepare	7	7	7	7	15	15	15	15	15	15	15	15		
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Pos Pelabuhan Majene & Silopo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Pos Pelabuhan Paotere	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5		
Pos Pelabuhan Pasangkayu														
Pos Pelabuhan Siwa														

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Pos Pelabuhan Perikanan Untia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bandara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju	1	0	0	1	0	0	1	3	0	3	3	0		
Bandara Tana Toraja	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kantor Induk / Bandara Hasanuddin	6	6	6	9	48	15	7	6	8	4	5	12		
10 Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	42.86%	71.43%	71.43%	71.43%	85.71%	85.71%	Timker 3
Wilayah Kerja / Pos	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
Pelabuhan Laut Makassar														
1. Reservoir Pelabuhan Soekarno	TMS	MS	MS	MS	MS	MS	TMS	MS	MS		MS	MS		
2. Reservoir Pelabuhan Hatta	TMS	-	MS	MS	MS	MS	TMS	MS	MS		MS	MS		
Pos Pelabuhan Paotere														
1. Depot Azhka	MS	MS	TMS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS			
2. Warung Rustam	-	-	-	-	-	MS	MS	MS	MS	MS	TMS	MS		
3. Warkop Pintu Dua	MS	MS	MS	-	-	-	-	MS	MS					
Bandara Hasanuddin														
1. GWT	TMS	-	-	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS			
2. WTP	TMS	MS	-	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS			

Makassar, 10 Januari 2025

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja 3



Ibrahim, SKM, M.Kes
NIP 197508242000031003

**Kertas Kerja Perhitungan Kinerja
Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar Tahun 2024**

**Sasaran : Meningkatnya Dukuingan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indikator 4 : Nilai kinerja anggaran**

Nomor : PR.05.06/C.IX.3.1/0094/2025 8 Januari 2025
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Subbag Adum Tahun 2024

Yth.

**Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar**

Sehubungan dengan Surat Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Nomor: PR.05.06/C.IX.3/0085/2025, Tanggal 7 Januari 2025, Hal: Undangan Penyusunan Lakip dan Profil BBKK Makassar 2024 TA 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Sub Bagian Administrasi Umum BBKK Makassar Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

8 Januari 2025
Kepala Sub Bagian
Administrasi Umum


Yusrianto, SKM
NIP 197208112000031005

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Sub Bagian Administrasi Umum
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2024

Sasaran: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indikator 4: Nilai Kinerja Anggaran

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Definisi Operasional: Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang tertera pada <i>dashboard</i> aplikasi SMART Kemenkeu RI 1 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari beberapa indikator, yaitu: Capaian Realisasi Output dengan bobot sebesar 75%, Efisiensi SBK dengan bobot sebesar 15%, dan Penggunaan SBK dengan bobot sebesar 10%. 2 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari beberapa indikator, yaitu: Revisi DIPA dengan bobot sebesar 10%, Deviasi Halaman III DIPA dengan bobot sebesar 15%, Penyerapan Anggaran dengan bobot sebesar 20%, Belanja Kontraktual dengan bobot sebesar 10%, Penyelesaian Tagihan dengan bobot sebesar 10%, Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot sebesar 10%, Capaian Output dengan bobot sebesar 25%, dan Dispensasi SPM (sebagai pengurang). Formula Perhitungan: Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker dihitung dengan menjumlahkan 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Target dan capaian dihitung secara kumulatif.														
Nilai				24.72	40.93	48.59	78.58	80.21	81.15	85.29	88.49	95.92	95.92	Subag Adum

Makassar, 10 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Subbag Administrasi Umum


Yusrianto, SKM
NIP 197208112000031005

**Kertas Kerja Perhitungan Kinerja
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2024**

**Sasaran : Meningkatnya Dukuingan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indikator 5 : Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran**

Nomor : PR.05.06/C.IX.3.1/0094/2025 8 Januari 2025
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Subbag Adum Tahun 2024

Yth.

**Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar**

Sehubungan dengan Surat Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Nomor: PR.05.06/C.IX.3/0085/2025, Tanggal 7 Januari 2025, Hal: Undangan Penyusunan Lakip dan Profil BBKK Makassar 2024 TA 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Sub Bagian Administrasi Umum BBKK Makassar Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

8 Januari 2025
Kepala Sub Bagian
Administrasi Umum


Yusrianto, SKM
NIP 197208112000031005

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Sub Bagian Administrasi Umum
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2024

Sasaran: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indikator 5: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Definisi Operasional: Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/ satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.														
Formula Perhitungan: Nilai agregat dari 8 parameter perhitungan Nilai IKPA yakni: 1. Revisi DIPA 2. Revisi Hal III DIPA 3. Penyerapan Anggaran 4. Belanja Kontraktual 5. Penyelesaian Tagihan 6. Pengelolaan UP dan TUP 7. Dispensasi SPM 8. Capaian Output Target dan capaian dihitung secara kumulatif.														
Nilai	62.42	86.33	95.96	93.04	93.07	95.64	94.03	96.52	97.24	96.22	99.39	99.88	99.88	Subag Adum

Makassar, 10 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Subbag Administrasi Umum


Yusrianto, SKM
 NIP. 19.208112000031005

**Kertas Kerja Perhitungan Kinerja
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2024**

**Sasaran : Meningkatnya Dukuingan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indikator 6 : Kinerja implementasi WBK satker**

Nomor : PR.05.06/C.IX.3.8/0093/2025 8 Januari 2025
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 5 Tahun 2024

Yth.

**Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar**

Sehubungan dengan Surat Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Nomor: PR.05.06/C.IX.3/0085/2025, Tanggal 7 Januari 2025, Hal: Undangan Penyusunan Lakip dan Profil BBKK Makassar 2024 TA 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 5 (Layanan Publik dan Zona Integritas) BBKK Makassar Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

8 Januari 2025
Ketua Tim Kerja 5
(Layanan Publik dan Zona Integritas)

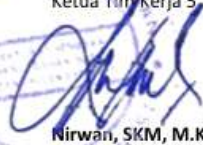


Nirwan, SKM, M.Kes
NIP 197406251997031002

Sasaran: Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indikator 6: Kinerja Implementasi WKB Satker

[illegible]

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
4 Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker diambil berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Pendahuluan BBKK Makassar Menuju WBK Nasional oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Kesehatan RI Pada Tanggal 22-25 Juli 2024 dengan Nilai 86,69														
5 Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker diambil berdasarkan Surat Inspektur Investigasi Kemenkes, Tanggal 13 Agustus 2024, Nomor PS.08.02/G.VI/727/2024, Hal: Surat Pemberitahuan Hasil Self Assessment Menuju WBK/WBBM Nasional Tahun 2024 bahwa BBKK Makassar Memenuhi syarat minimal WBK dan Diusulkan Menuju WBK Nasional ke Kemenpan RB dengan Nilai 86,94														
Nilai	81.46	81.46	81.46	81.46	81.46	82.19	83.15	86.69	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	Timker 5

Makassar, 10 Januari 2025
 Mengetahui,
 Ketua Tim Kerja 5

 Nirwan, SKM, M.Kes
 NIP 19.406251997031002

**Kertas Kerja Perhitungan Kinerja
Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar Tahun 2024**

**Sasaran : Meningkatnya Dukuingan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indikator 7 : Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya**

Nomor : PR.05.06/C.IX.3.1/0094/2025 8 Januari 2025
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Subbag Adum Tahun 2024

Yth.

**Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar**

Sehubungan dengan Surat Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Nomor: PR.05.06/C.IX.3/0085/2025, Tanggal 7 Januari 2025, Hal: Undangan Penyusunan Lakip dan Profil BBKK Makassar 2024 TA 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Sub Bagian Administrasi Umum BBKK Makassar Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

8 Januari 2025
Kepala Sub Bagian
Administrasi Umum



Yusrianto, SKM
NIP 197208112000031005

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Sub Bagian Administrasi Umum
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2024

Sasaran: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Indikator 7: Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Definisi Operasional: ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.														
Formula Perhitungan: Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JP dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100% Target dan capaian dihitung secara kumulatif														
Persentase	67.23%	71.65%	83.15%	89.34%	93.76%	102.61%	112.34%	113.22%	114.11%	116.76%	117.65%	117.65%	117.65%	Subag Adum
Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 20 JP	76 Orang	81 Orang	94 Orang	101 Orang	106 Orang	116 Orang	127 Orang	128 Orang	129 Orang	132 Orang	133 Orang	133 Orang	133 Orang	Subag Adum

Makassar, 10 Januari 2025

Mengetahui,

Kepala Subbag Administrasi Umum



Yusrianto, SKM

NIP 197208112000031005

**Kertas Kerja Perhitungan Kinerja
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2024**

**Sasaran : Meningkatnya Dukuingan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indikator 8 : Persentase Realisasi Anggaran**

Nomor : PR.05.06/C.IX.3.1/0094/2025 8 Januari 2025
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Subbag Adum Tahun 2024

Yth.

**Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar**

Sehubungan dengan Surat Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Nomor: PR.05.06/C.IX.3/0085/2025, Tanggal 7 Januari 2025, Hal: Undangan Penyusunan Lakip dan Profil BBKK Makassar 2024 TA 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Sub Bagian Administrasi Umum BBKK Makassar Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

8 Januari 2025
Kepala Sub Bagian
Administrasi Umum



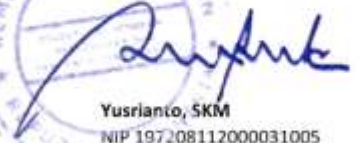
Yusrianto, SKM
NIP 197208112000031005

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Sub Bagian Administrasi Umum
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2024

Sasaran: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indikator 8: Persentase Realisasi Anggaran

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2024												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Definisi Operasional: Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran.														
Formula Perhitungan: Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah pagu anggaran satker dikali 100%. Target dan capaian dihitung secara kumulatif														
Persentase	2.10%	10.22%	22.25%	29.56%	36.72%	50.44%	59.19%	67.63%	74.53%	81.58%	88.49%	99.52%	99.52%	Subag Adum

Makassar, 10 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Subbag Administrasi Umum


 Yusrianto, SKM
 NIP 197208112000031005